



Katalog: 9101002

LAPORAN HASIL SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI 2015



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN HASIL SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI 2015



LAPORAN HASIL SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA TERINTEGRASI 2015

ISSN: 2460-982X

No. Publikasi: 06130.1601

Katalog BPS: 9101002

Ukuran Buku: 21 x 29,7 cm

Jumlah Halaman: vi + 160 Halaman/*Pages*

Naskah:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Subdirektorat Statistik Transportasi

Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, serta

Subdirektorat Statistik Keuangan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Laporan Hasil Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2015 di 33 provinsi yang terdiri dari: sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, komunikasi dan teknologi informasi, lembaga keuangan bukan bank, dan keuangan pemerintah merupakan publikasi tahunan dari Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi yang dilakukan pada tahun 2015.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian mengenai indeks nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi, serta sektor keuangan yang berkesinambungan (triwulanan).

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, publikasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Jakarta, Oktober 2016

Kepala Badan Pusat Statistik



Sunariyanto

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Survei.....	2
1.3 Cakupan	2
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Ruang Lingkup.....	5
2.2 Desain Sampling	13
2.3 Kerangka Sampel.....	14
2.4 Jumlah dan Alokasi Sampel.....	14
2.5 Metode Pengumpulan Data	16
2.6 Alur Pencacahan	16
2.7 Pelaksanaan Lapangan.....	17
2.8 Konsep dan Definisi	19
2.9 Batasan Penyajian	47
BAB III PEMBAHASAN	51
3.1 Perdagangan	55
3.2 Transportasi dan Pergudangan	72
3.3 Informasi.....	92
3.4 Lembaga Keuangan Bukan Bank.....	109
3.5 Keuangan Pemerintah.....	123
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	133
4.1 Kesimpulan.....	133
4.2 Saran	137
LAMPIRAN	139

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuesioner STKU-G 2015	141
Lampiran 2. Kuesioner STKU-H 2015	145
Lampiran 3. Kuesioner STKU-J 2015	149
Lampiran 4. Kuesioner STKU-K 2015.....	153
Lampiran 5. Kuesioner STKU-O 2015	157

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi pada tingkat nasional digambarkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) dan pada tingkat provinsi/kabupaten/kota digambarkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB disusun dalam periode triwulanan dan tahunan.

Penyusunan PDB/PDRB memerlukan data statistik sektoral yang merupakan data dasar dan data pendukung, salah satunya adalah data produksi/indikator produksi. Beberapa sektor yang merupakan sektor jasa dalam penyusunan angka PDB/PDRB tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan sektor jasa-jasa.

Sektor perdagangan dan jasa semakin berkembang pesat di Indonesia, bukan saja aktifitas perdagangan dalam negeri, perdagangan antar pulau, antar provinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia semakin besar perannya dalam perekonomian nasional maupun daerah. Begitu pula peran berbagai jenis jasa seperti: jasa transportasi, pergudangan, Informasi dan komunikasi dan jasa keuangan semakin intensif dan membesar kontribusinya.

Dari sisi penyediaan data pada sektor-sektor tersebut, Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri, Statistik Transportasi, Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, serta Statistik Keuangan masih belum memiliki data-data yang lengkap dan berkesinambungan untuk mendukung penghitungan PDB/PDRB. Sementara itu, Direktorat Neraca Produksi dan Neraca Pengeluaran sebagai pengguna utama sangat membutuhkan data-data indikator produksi pada sektor-sektor tersebut, yang perlu dipantau perkembangannya secara berkala guna penyusunan PDB maupun PDRB.

Oleh karena itu, kegiatan usaha yang tercakup dalam sektor-sektor tersebut terus dipantau perkembangannya secara terintegrasi melalui Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU), yang pelaksanaan lapangannya dimulai awal April 2015. STKU Terintegrasi 2015 ini adalah survei yang dirancang untuk memantau perkembangan perusahaan/usaha sektor perdagangan, transportasi dan pergudangan, informasi, lembaga keuangan, dan keuangan pemerintah daerah secara triwulanan.

1.2 Tujuan Survei

Tujuan dilaksanakannya kegiatan STKU Terintegrasi 2015 adalah:

- a. Menyediakan data tentang indeks nilai produksi/pendapatan/output perusahaan/usaha pada sektor perdagangan, sektor transportasi dan pergudangan, informasi, serta sektor keuangan yang berkesinam-bungan (triwulanan).
- b. Memberikan gambaran tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan PDB dan PDRB Triwulanan.
- c. Memperoleh informasi terkini dan tercepat dalam bentuk data kuantitas mengenai indikator produksi triwulanan dan data kualitas sebagai pendukung data kuantitas.

1.3 Cakupan

1.3.1 Cakupan Kegiatan Usaha

Kegiatan yang dicakup STKU Terintegrasi 2015 adalah:

- a. Perusahaan/usaha pada kegiatan perdagangan dan jasa reparasi, transportasi dan pergudangan, serta lembaga keuangan bukan bank, untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tertentu yang berskala menengah dan besar, yang mengacu pada UU No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (UK):

Skala Usaha Menengah : Omset 1 Miliar - 3 Miliar

Skala Usaha Besar : Omset > 3 Miliar

Skala ini digunakan sesuai *frame* hasil Sensus Ekonomi 2006.

- b. Seluruh perusahaan baik perusahaan menengah besar maupun mikro kecil untuk kegiatan informasi untuk KBLI tertentu.
- c. Kegiatan Usaha Keuangan Pemerintah Daerah.

1.3.2 Cakupan Wilayah

STKU Terintegrasi 2015 dilaksanakan di seluruh provinsi, yang meliputi seluruh ibukota provinsi di Indonesia dan beberapa kabupaten/kota di sekitar ibukota provinsi.

1.3.3 Cakupan Variabel

Data dan keterangan yang dikumpulkan dalam pelaksanaan STKU Terintegrasi 2015 diantaranya meliputi:

- a. Nama dan alamat perusahaan,
- b. Kegiatan perusahaan/usaha,
- c. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,
- d. Jumlah pekerja,
- e. Balas jasa pekerja,
- f. Indikator produksi,
- g. Pendapatan usaha, dan
- h. Prospek usaha

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

BAB II METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Distribusi dan Jasa 2015 dilaksanakan setiap triwulan meliputi sektor perdagangan, transportasi, informasi, dan lembaga keuangan yang akan dilaksanakan di seluruh provinsi. Yang meliputi seluruh ibukota provinsi dan beberapa kabupaten/kota disekitar ibukota provinsi yang tercantum dalam tabel 2.1A dan khusus untuk STKU Keuangan Pemerintahan Daerah cakupan kota/kabupaten tercantum dalam tabel 2.1B.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan menengah dan besar untuk sektor perdagangan, transportasi dan lembaga keuangan serta seluruh perusahaan baik perusahaan menengah besar maupun mikro kecil untuk sektor informasi dan komunikasi dan teknologi informasi untuk KBLI tertentu yang tercantum pada tabel 2.2.

Tabel 2.1A Cakupan Kabupaten/ Kota Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2015 Menurut Provinsi

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota Sekitar
(1)	(2)	(3)
11	Aceh	(08) Aceh Besar, (71) Banda Aceh
12	Sumatera Utara	(12) Deli Serdang, (13) Langkat, (75) Medan, (76) Binjai
13	Sumatera Barat	(03) Solok, (06) Padang Pariaman, (71) Padang, (72) Solok
14	Riau	(04) Pelalawan, (06) Kampar, (71) Pekanbaru
15	Jambi	(05) Muaro Jambi, (71) Jambi
16	Sumatera Selatan	(07) Banyu Asin, (10) Ogan Ilir, (71) Palembang
17	Bengkulu	(03) Bengkulu Utara, (71) Bengkulu
18	Lampung	(10) Pringsewu, (71) Bandar Lampung
19	Kep. Bangka Belitung	(01) Bangka, (71) Pangkal Pinang
21	Kepulauan Riau	(71) Batam, (72) Tanjung Pinang
31	DKI Jakarta	(71) Jakarta Selatan, (72) Jakarta Timur, (73) Jakarta Pusat, (74) Jakarta Barat, (75) Jakarta Utara
32	Jawa Barat	(04) Bandung, (05) Garut, (73) Bandung, (75) Bekasi, (77) Cimahi

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota Sekitar
(1)	(2)	(3)
33	Jawa Tengah	(20) Jepara, (22) Semarang, (24) Kendal, (74) Semarang, 75 (Pekalongan)
34	DI Yogyakarta	(04) Sleman, (71) Yogyakarta, (01) Kulon Progo, (03) Gunung Kidul
35	Jawa Timur	(14) Pasuruan, (15) Sidoarjo, (25) Gresik, (76) Mojokerto, (78) Surabaya, (75) Pasuruan
36	Banten	(71) Kota Tangerang, (73) Kota Serang, (72) Cilegon
51	Bali	(03) Badung, (04) Gianyar, (71) Denpasar
52	Nusa Tenggara Barat	(01) Lombok Barat, (71) Mataram
53	Nusa Tenggara Timur	(03) Kupang, (71) Kota Kupang
61	Kalimantan Barat	(04) Pontianak, (71) Kota Pontianak
62	Kalimantan Tengah	(09) Katingan, (71) PalangkaRaya, (05) Barito Utara, (07) Lamandau, (08) Seruyan
63	Kalimantan Selatan	(03) Banjar, (04) Barito Kuala, (71) Banjarmasin
64	Kalimantan Timur	(03) Kutai Kartanegara, (71) Balikpapan, (72) Samarinda, (05) Berau, (73) Tarakan
71	Sulawesi Utara	(02) Minahasa, (71) Manado
72	Sulawesi Tengah	(05) Donggala, (71) Palu
73	Sulawesi Selatan	(06) Gowa, (08) Maros, (71) Makassar
74	Sulawesi Tenggara	(03) Konawe, (71) Kendari
75	Gorontalo	(02) Gorontalo, (71) Kota Gorontalo
76	Sulawesi Barat	(01) Majene, (04) Mamuju, (02) Polewali Mandar
81	Maluku	(06) Seram Bagian Barat, (71) Ambon
82	Maluku Utara	(71) Ternate, (72) Tidore Kepulauan
91	Papua Barat	(05) Manokwari, (71) Sorong
94	Papua	(03) Jayapura, (20) Keerom, (71) Kota Jayapura

Tabel 2.1B Cakupan Kabupaten/ Kota Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Keuangan Pemerintah Daerah 2015 Menurut Provinsi

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota
(1)	(2)	(3)
11	Aceh	(08) Aceh Besar, (12) Aceh Barat Daya, (71) Banda Aceh, (73) Langsa, (74) Lhoksumawe
12	Sumatera Utara	(06) Toba Samosir, (11) Karo, (19) Batu Bara, (74) Tebing Tinggi, (75) Medan
13	Sumatera Barat	(03) Solok, (06) Padang Pariaman, (08) Lima Puluh Koto, (71) Padang, (72) Solok
14	Riau	(04) Pelalawan, (06) Kampar, (08) Bengkalis, (71) Pekanbaru, (73) Dumai
15	Jambi	(04) Batang Hari, (05) Muaro Jambi, (07) Tanjung Jabung Barat, (08) Tebo, (71) Jambi
16	Sumatera Selatan	(03) Muara Enim, (06) Musi Banyu Asin, (07) Banyu Asin, (10) Ogan Ilir, (71) Palembang
17	Bengkulu	(01) Bengkulu Selatan, (02) Rejang Lebong, (03) Bengkulu Utara, (04) Kaur, (71) Bengkulu
18	Lampung	(04) Lampung Timur, (05) Lampung Tengah, (09) Pesawaran, (10) Pringsewu, (71) Bandar Lampung
19	Kep. Bangka Belitung	(01) Bangka, (03) Bangka Barat, (04) Bangka Tengah, (05) Bangka Selatan, (71) Pangkal Pinang
21	Kepulauan Riau	(01) Karimun, (02) Kepulauan Riau, (03) Natuna, (71) Batam, (72) Tanjung Pinang
31	DKI Jakarta	-
32	Jawa Barat	(04) Bandung, (05) Garut, (73) Bandung, (75) Bekasi, (77) Cimahi
33	Jawa Tengah	(20) Jepara, (22) Semarang, (24) Kendal, (74) Semarang, (75) Pekalongan
34	DI Yogyakarta	(01) Kulon Progo, (02) Bantul, (03) Gunung Kidul, (04) Sleman, (71) Yogyakarta
35	Jawa Timur	(14) Pasuruan, (15) Sidoarjo, (25) Gresik, (76) Mojokerto, (78) Surabaya, (75) Pasuruan
36	Banten	(04) Serang, (71) Tangerang, (72) Cilegon, (73) Kota Serang, (74) Tangerang Selatan
51	Bali	(02) Tabanan, (03) Badung, (04) Gianyar, (05) Klungkung, (71) Denpasar
52	Nusa Tenggara Barat	(01) Lombok Barat, (02) Lombok Tengah, (06) Bima, (07) Sumbawa, (71) Mataram
53	Nusa Tenggara Timur	(02) Sumba Timur, (03) Kupang, (05) Timor Tengah Utara, (13) Manggarai, (71) Kota Kupang
61	Kalimantan Barat	(04) Pontianak, (05) Sangau, (06) Ketapang, (07) Sintang, (71) Kota Pontianak
62	Kalimantan	(05) Barito Utara, (07) Lamandau, (08) Seruyan, (09)

Kode Prov.	Nama Provinsi	Kabupaten/ Kota
(1)	(2)	(3)
	Tengah	Katingan, (71) Palangkaraya
63	Kalimantan Selatan	(03) Banjar, (04) Barito Kuala, (05) Tapin,(71) Banjarmasin, (72) Banjar baru
64	Kalimantan Timur	(01)Paser, (03) Kutai Kartanegara, (05) Berau,(71) Balikpapan, (72) Samarinda
65	Kalimantan Utara	(01) Malinau, (02) Bulungan, (71) Tarakan
71	Sulawesi Utara	(01) Bolaang Mongondow, (02) Minahasa,(05) Minahasa Selatan, (71) Manado, (72) Bitung
72	Sulawesi Tengah	(02) Banggai, (04) Poso, (05) Donggala, (08) Parigi Moutong, (71) Palu
73	Sulawesi Selatan	(04) Jeneponto, (06) Gowa, (08) Maros, (09) Pangkajene Kepulauan, (71) Makassar
74	Sulawesi Tenggara	(02) Muna, (03) Konawe, (04) Kolaka, (05) Konawe Selatan, (71) Kendari
75	Gorontalo	(01) Boalemo, (02) Gorontalo, (03) Pahuwato, (04) Bone Bolango, (71) Kota Gorontalo
76	Sulawesi Barat	(01) Majene, (02) Polewali Mandar, (03) Mamasa, (04) Mamuju, (05) Mamuju Utara
81	Maluku	(01) Maluku Tenggara Barat, (05) Kepulauan Aru, (02) Maluku Tenggara, (06) Seram Bagian Barat, (71) Ambon
82	Maluku Utara	(03) Kepulauan Sula, (04) Halmahera Selatan, (06) Halmahera Timur, (71) Ternate, (72) Tidore Kepulauan
91	Papua Barat	(02) Kaimana, (04) Teluk Bintuni, (05) Manokwari, (07) Sorong, (71) Sorong
94	Papua	(03) Jayapura, (08) Yapen Waropen, (12) Mimika, (20) Keerom, (71) Kota Jayapura

Tabel 2.2. Cakupan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Terintegrasi 2015 Menurut KBLI

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perdagangan	1	PB Hasil Pertanian		
		1 PB Padi dan Palawija, PB Beras	46201, 46311	51211
		2 PB Binatang Hidup	46205	51212
		3 PB Hasil Perikanan	46206	51213
		4 PB Buah-buahan, PB Sayuran, PB Rokok dan Tembakau	46312,46313, 46335	51220
		5 PB Buah yang Mengandung Minyak	46202	51211
		6 PB Kopi, Teh, dan Kakao	46314	51220
		7 PB Gula, Coklat, dan Kembang Gula	46331	51220

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2	PE Hasil Pertanian		
	1	PE Padi dan Palawija	47211	52211
	2	PE Buah-buahan	47212	52212
	3	PE Sayuran	47213	52213
	4	PE Hasil Peternakan	47214	52214
	5	PE Hasil Perikanan	47215	52215
	6	PE Beras	47241	52221
	3	PB Kendaraan Bermotor		
	1	PB Mobil Baru, PB Mobil Bekas	45101, 45102	50101
	2	PB Sepeda Motor Baru, PB Sepeda Motor Bekas	45401, 45402	50301
	3	PB Suku Cadang dan Aksesori Mobil dan Motor	45301, 45405	50201,50301
	4	PE Kendaraan Bermotor		
	1	PE Mobil Baru, PE Mobil Bekas	45103, 45104	50102
	2	PE Sepeda Motor Baru, PE Sepeda Motor Bekas	45403, 45404	50302
	3	PE Suku Cadang dan Aksesori Mobil dan Motor	45302, 45406	50202,50302
	5	Reparasi		
		Reparasi Mobil dan Motor	45201, 45407	93040,95050
	6	SPBU		
		PE Bahan Bakar Kendaraan di SPBU	47301	50400
	7	PB Hasil Industri Pengolahan		
	1	PB Rokok dan Tembakau	46335	51220
	2	PB Tekstil, PB Pakaian	46411, 46412	51310
	3	PB Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	46491	51391
	4	PB Peralatan Telekomunikasi	46523	51900
	5	PB Kertas dan Karton	46695	51900
	8	PE Hasil Industri Pengolahan		
	1	PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau di Supermarket/Minimarket	47111	52111
	2	PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Bukan di Supermarket/Minimarket (Tradisional)	47112	52112
	3	PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Departmen Store)	47191	52191
	4	PE Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan	47192	52192

Sektor	No	Rincian		KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
			Makanan, Minuman atau Tembakau Bukan di Toserba (Departmen Store)		
		5	PE Khusus Rokok dan Tembakau di Toko	47230	52227
		6	PE Tekstil	47511	52321
		7	PE Pakaian	47711	52322
		8	PE Furniture	47591	52331
		9	PE Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko	47420	52332
		10	PE Alat Telekomunikasi	47414	52338
		11	PE Kertas, Kertas Karton dan Barang dari Kertas/Karton	47650	52361
	9	PB Ekspor		-	531,532,533,534, 535,539
		1	P Ekspor Bahan Baku Hasil Pertanian	46201, 46206	53211
		2	P Ekspor Binatang Hidup	46205	53212
		3	P Ekspor Hasil Perikanan	46206	53213
		4	P Ekspor Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	46411	53310
		5	P Ekspor Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga	46491	53391
	10	PB Impor			
		1	P Impor Bahan Baku Hasil Pertanian	46201, 46206	54211
		2	P Impor Binatang Hidup	46205	54212
		3	P Impor Hasil Perikanan	46206	54213
		4	P Impor Tekstil, Pakaian Jadi dan Kulit	46411	54310
		5	P Impor Peralatan dan Perlengkapan RumahTangga	46491	54391
Transportasi	1	Angkutan Bus Penumpang			
		1	Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)	49211	60211
		2	Angkutan Bus Perbatasan	49212	60212
		3	Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)	49213	60213
		4	Angkutan Bus Kota	49214	60214
		5	Angkutan Bus Lintas Batas Negara	49215	60217
		6	Angkutan Bus Khusus	49221	60216
		7	Angkutan Bus Pariwisata	49222	60223
	2	Angkutan Penumpang Non Bus			
		1	Angkutan Perbatasan Bukan Bus	49411	60212
		2	Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus	49412	60213
		3	Angkutan Perkotaan	49413	60214

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4	Angkutan Perdesaan	49414	60215
	5	Angkutan Taksi	49421	60221
	6	Angkutan Sewa	49422	60222
	3	Angkutan Barang		
	1	Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum	49431	60231
	2	Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus	49432	60232
	4	Angkutan Sungai, Danau, dan Penyebrangan		
	1	Angkutan Sungai dan Danau untuk Penumpang Dengan Trayek Tetap dan Teratur	50211	61211
	2	Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur	50212	61212
	3	Angkutan Sungai dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur Untuk Wisata	50213	61213
	4	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Penumpang	50214	61222
	5	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang	50215	61223
	6	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50216	61224
	7	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Penumpang	50217	61225
	8	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Penumpang	50218	61226
	9	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara	50219	61221
	10	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan	50221	61214
	11	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Khusus	50222	61215
	12	Angkutan Sungai dan Danau Untuk Barang Berbahaya	50223	61216
	13	Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk	50224	61222

Sektor	No	Rincian	KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Barang		
	14	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang	50225	61223
	15	Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50226	61224
	16	Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/Kota Untuk Barang	50227	61225
	17	Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/Kota Untuk Barang	50228	61226
	18	Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarneegara	50229	61221
	5	Pergudangan		
	1	Pergudangan	52101	63210
	2	Jasa Cold Storage	52102	63220
	6	Jasa Penunjang Angkutan Darat		
	1	Jasa Perparkiran di Badan Jalan (<i>On Street Parking</i>)	52214	63351
	2	Jasa Perparkiran di Luar Badan Jalan (<i>Off Sreet Parking</i>)	52215	63352
	7	Penanganan Kargo (Bongkar Muat)	52240	63100
	8	Jasa Penunjang Angkutan Lainnya		
	1	JPT	52291	63510
	2	EMKA & EAD	52292	63520
	3	EMKL	52293	63530
	4	EMPU	52294	63540
	9	Kurir	53200	64130
Informasi dan komunikasi	1	Penerbit Surat Kabar, Jurnal, dan Majalah		
	1	Penerbitan Surat Kabar	58130	22120
	2	Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi		
	1	Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Pemerintah	59111	92111
	2	Produksi Film, Video dan Program Televisi oleh Swasta	59112	92112
	3	Penyiaran Radio		
	1	Penyiaran Radio Oleh Pemerintah	60101	92131

Sektor	No	Rincian		KBLI 2009	KBLI 2005
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
		2	Penyiaran Radio Oleh Swasta	60102	92132
	4	Penyiaran dan Pemrograman Televisi			
		1	Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah	60201	92131
		2	Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta	60202	92132
Lembaga Keuangan	1	Penyelenggaraan pemerintah Negara & kesekretariatan Negara		84112	75112
	2	Perasuransian			
		1	Asuransi Jiwa Konvensional	65111	66010
		2	Asuransi Jiwa Syariah	65112	66010
		3	Asuransi Non Jiwa Konvensional	65121	66030
		4	Asuransi Non Jiwa Syariah	65122	66030
		5	Reasuransi Konvensional	65201	
		6	Reasuransi Syariah	65202	
	3	Dana Pensiun		65300	66020
	4	Koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam		64140	65950
	5	Pegadaian		64921	65940
	6	Pedagang Valuta Asing		66197	67191
	7	Pembiayaan			
		1	Perusahaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (<i>Financial Leasing</i>)	64910	65910
		2	Perusahaan Pembiayaan Anjak Piutang (<i>Factoring</i>)	64992	65921
		3	Usaha Kartu Kredit (<i>Credit Card</i>)	64923	65923
		4	Perusahaan Pembiayaan Konsumen (<i>Consumer Credit</i>)	64922	65922
	8	Modal Ventura		64991	65930
	9	Penunjang Asuransi			
		1	Adjuster (Jasa Penilai Risiko Dan Kerusakan)	66210	67202
		2	Aktuaria	66291	67203

*) Termasuk hasil industri rokok

2.2 Desain Sampling

Metode sampling yang digunakan dalam STKU Terintegrasi 2015 adalah metode sistematis sampling. Perusahaan sampel terpilih akan dicacah selama 4 triwulan.

2.3 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan dalam survei ini adalah

1. Daftar perusahaan/usaha sektor lembaga keuangan, perdagangan dan transportasi hasil SE2006-SS Usaha Menengah Besar (UMB) serta daftar perusahaan/usaha komunikasi dan teknologi informasi hasil Listing SE 2006 untuk KBLI yang telah ditentukan.
2. Updating Direktori perusahaan/usaha
 - a. Informasi tahun 2009 yang kemudian diupdate tiap tahun
 - b. Lembaga Keuangan yang dilaksanakan tiap tahun
3. Asosiasi
4. Internet

Pemilihan sampel dilakukan secara independen untuk masing-masing provinsi dan sektor dengan memperhatikan komposisi usaha berdasarkan kegiatan usahanya (misalnya sektor perdagangan dibagi menurut perdagangan mobil, perdagangan sepeda motor, perdagangan besar bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan eceran bukan mobil dan sepeda motor, perdagangan eceran di swalayan, perdagangan eceran di *department store*). Metode yang digunakan adalah dengan metode sistematis sampling. Untuk kegiatan STKU 2015 ini perusahaan yang terpilih sampel adalah perusahaan yang berhasil dicacah pada STKU 2014 pada Triwulan I dan apabila masih ada target sampel 2015 yang belum terpenuhi maka dipilih secara sistematis sampling dari kerangka sampel yang belum terpilih.

2.4 Jumlah dan Alokasi Sampel

Jumlah sampel perusahaan adalah sebanyak 12.068 sampel perusahaan/usaha yang dibagi secara merata kedalam 4 triwulan, sehingga tiap triwulan jumlah sampel adalah 3.017 sampel. Secara lengkap alokasi sampel per triwulan menurut provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3. Alokasi Sampel STKU Terintegrasi 2015 Menurut Provinsi dan Kegiatan Usaha per Triwulan

Provinsi	Lembaga Keuangan		Perdagangan	Transportasi	KTI	Jumlah Sampel
	LKBB	Pemda				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3	6	28	11	10	58
Sumatera Utara	38	6	45	40	33	162
Sumatera Barat	43	6	30	20	13	112
Riau	2	6	35	25	20	88
Jambi	3	6	29	15	10	63
Sumatera Selatan	27	6	29	24	10	96
Bengkulu	3	6	22	10	10	51
Lampung	2	6	29	21	10	68
Kep. Bangka Belitung	3	6	20	18	10	57
Kepulauan Riau	3	6	20	11	8	48
DKI Jakarta	76	1	80	60	52	269
Jawa Barat	27	6	84	39	68	224
Jawa Tengah	39	6	92	47	43	227
D.I. Yogyakarta	3	6	29	17	29	84
Jawa Timur	16	6	79	47	47	195
Banten	2	6	20	16	13	57
Bali	39	6	36	40	24	145
Nusa Tenggara Barat	42	6	30	20	7	105
Nusa Tenggara Timur	3	6	25	21	10	65
Kalimantan Barat	3	6	19	23	9	60
Kalimantan Tengah	3	6	25	19	10	63
Kalimantan Selatan	2	6	27	22	10	67
Kalimantan Timur	7	6	23	19	8	63
Kalimantan Utara	-	4	1	6	3	14
Sulawesi Utara	3	6	19	18	6	52
Sulawesi Tengah	3	6	30	17	10	66
Sulawesi Selatan	14	6	35	22	7	84
Sulawesi Tenggara	3	6	31	19	9	68
Gorontalo	3	6	20	10	10	49
Sulawesi Barat	3	6	20	10	6	45
Maluku	2	6	18	13	10	49
Maluku Utara	3	6	16	13	10	48
Papua Barat	3	6	20	13	7	49
Papua	2	6	24	24	10	66
Jumlah	428	197	1.090	750	552	3.017

2.5 Metode Pengumpulan Data

Pencacahan perusahaan dilakukan setelah daftar sampel diterima. Pengumpulan data dari perusahaan/usaha yang terpilih sampel dilakukan melalui wawancara. Untuk perusahaan/usaha yang relatif besar, maka kunjungan bisa dilakukan lebih dari satu kali.

2.6 Alur Pencacahan

1. Triwulan I

Pencacahan triwulan I dilaksanakan pada bulan **April 2015**. Berdasarkan STKU16.DSPU, petugas mencacah perusahaan yang terpilih sebagai sampel. Keberadaan perusahaan dituliskan di STKU16.DSPU kolom 8.

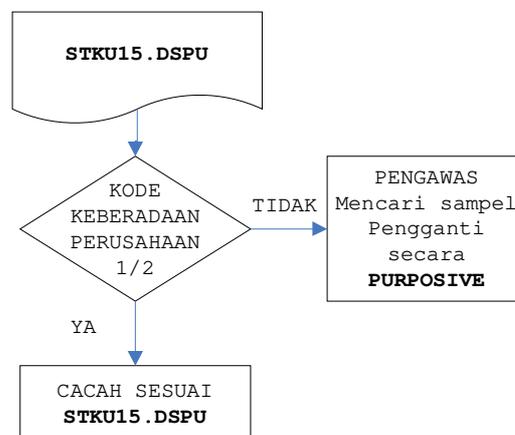
Apabila hasil isian keberadaan perusahaan adalah kode 3 (ditemukan tetapi kegiatan usahanya berubah di luar cakupan KBLI yang diteliti), 4 (pindah dan tidak dapat ditelusuri), 5 (tutup), dan 6 (tidak ditemukan), 7 (ganda/*double*) maka **PENGAWAS** melakukan penggantian sampel yang memiliki kegiatan utama yang sama secara *purposive*:

Apabila sampel yang terpilih adalah sampel *purposive*, maka pemberian nomor urut perusahaan pada kolom (2) dimulai dari nomor 8001 dan seterusnya.

2. Triwulan II, III, dan IV

Pencacahan pada triwulan II, III, dan IV dilakukan secara rutin masing-masing pada bulan Juli, Oktober, dan Januari. Perusahaan sampel yang dikunjungi adalah perusahaan hasil pencacahan triwulan I.

Diagram Alur Pencacahan Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) 2015



2.7 Pelaksanaan Lapangan

1. Organisasi Lapangan

a. Organisasi di Pusat:

- 1) Kegiatan perencanaan dan perumusan konsep dilakukan oleh *subject matter* (Subdit. Stat. PDN, Stat. Transportasi, Stat. KTI dan Stat. Keuangan) bersama-sama dengan direktorat- direktorat yang terkait di Badan Pusat Statistik.
- 2) Kegiatan pengolahan dan tabulasi dilakukan oleh *subject matter* (Subdit. Stat. PDN, Stat. Transportasi, Stat. KTI dan Stat. Keuangan) bersama-sama dengan direktorat-direktorat yang terkait di Badan Pusat Statistik.
- 3) Kegiatan evaluasi hasil dilakukan oleh *subject matter* (Subdit. Stat. PDN, Stat. Transportasi, Stat. KTI dan Stat. Keuangan).

b. Organisasi di Daerah

Kegiatan pengumpulan data dilakukan oleh BPS Provinsi/Kabupaten/Kota dengan beban tugas:

- 1) Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab umum kegiatan.
- 2) Kepala Bidang Statistik Distribusi di BPS Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan dan pengawasan baik di bidang teknis maupun administrasi.
- 3) Kasie Statistik Niaga dan Jasa dan/atau Kasie Statistik Keuangan dan Harga Pedesaan di BPS Provinsi atau Kasie Statistik Distribusi Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab harian teknis pelaksanaan, pengawasan, dan pengiriman data ke BPS Pusat.
- 4) Staf teknis BPS Provinsi/Kabupaten/Kota atau Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) sebagai tenaga pencacah, dan sekaligus menjadi tenaga pengolah.

2. Jadwal Pelaksanaan Lapangan

Pelaksanaan kegiatan STKU Terintegrasi 2015 di BPS pusat dan di daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4**Penanggung Jawab dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No	Kegiatan	Penanggung Jawab	Pelaksanaan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penyusunan Kuesioner	Subdit Stat. PDN, Transportasi, KTI, Keuangan	23 – 27 Februari 2015
2	Penyusunan Buku Pedoman	Subdit Stat. PDN, Transportasi, KTI, Keuangan	2 - 10 Maret 2015
3	Pencetakan dan Pengiriman Kuesioner dan Buku Pedoman	Bagian Penggandaan, Pengadaan, Arsip dan Ekspedisi	12 – 18 Maret 2015
4	Pelaksanaan Lapangan	Bid. Distribusi	
	4.1. Pengumpulan Data	Petugas	
	a. Data Triwulan I 2015		April 2015
	b. Data Triwulan II 2015		Juli 2015
	c. Data Triwulan III 2015		Oktober 2015
	d. Data Triwulan IV 2015		Januari 2016
	4.2. Pengawasan dan Pengiriman Hasil Pencacahan Lapangan	Kasi Stat. Niaga & Jasa dan/atau Kasie Stat. Keuangan & Harga Pedesaan, dan Kasie Stat. Distribusi	
	a. Data Triwulan I 2015		April 2015
	b. Data Triwulan II 2015		Juli 2015
	c. Data Triwulan III 2015		Oktober 2015
	d. Data Triwulan IV 2015		Januari 2016
5	Pengolahan Hasil Pencacahan	Subdit Stat. PDN, Transportasi, KTI, Keuangan	
	a. Data Triwulan I 2015		April 2015
	b. Data Triwulan II 2015		Juli 2015
	c. Data Triwulan III 2015		Oktober 2015
	d. Data Triwulan IV 2015		Januari 2016

Pencacahan Triwulan I 2015 dilakukan pada bulan April 2015, sedangkan pencacahan triwulan II dan III, dilakukan pada bulan Juli dan Oktober. Untuk triwulan IV 2015, pencacahan dilakukan pada Januari 2016.

2.8 Konsep dan Definisi

1. Konsep dan Definisi Umum

Beberapa konsep dan definisi umum yang digunakan pada setiap kuesioner dalam survei ini antara lain:

- a. **Perusahaan/ usaha adalah** setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan).
- b. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)** merupakan klasifikasi baku mengenai kegiatan ekonomi yang terdapat di Indonesia, yang dirinci menurut kategori. KBLI hanya mengelompokkan unit produksi menurut kegiatan ekonomi, tidak membedakan unit produksi menurut kepemilikan, badan hukum, formal atau informal. Kode KBLI yang digunakan adalah Peraturan Kepala BPS No.57 tahun 2009 tentang KBLI.
- c. **Pekerja adalah** semua orang yang terlibat secara langsung dalam pekerjaan/kegiatan di perusahaan/usaha. Yang termasuk dalam pekerja adalah pekerja dibayar dan tidak dibayar. Dan juga pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja tidak tetap.
- d. **Pekerja dibayar adalah** pekerja yang bekerja pada perusahaan/ usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan/usaha tersebut, baik berupa uang maupun barang.
- e. **Pekerja tidak dibayar adalah** pekerja pemilik dan atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha, tetapi tidak mendapat upah/gaji. Bagi pekerja tidak dibayar yang bekerja kurang dari 1/3 (sepertiga) jam kerja yang biasa berlaku (dalam satu minggu) di perusahaan/usaha tidak termasuk sebagai pekerja.
- f. **Balas jasa adalah** seluruh pengeluaran yang diberikan kepada pekerja/karyawan yang dibayar, seperti: upah/gaji, upah lembur, tunjangan, bonus dan sejenisnya, asuransi, dana pensiun dan lain-lain baik dalam bentuk uang/barang.
- g. **Upah/ gaji adalah** adalah balas jasa pekerja/karyawan, sebelum dikurangi pajak baik dalam bentuk uang maupun barang. Perkiraan

sewa rumah dinas, fasilitas kendaraan, dan sejenisnya dimasukkan dalam upah dan gaji walaupun tidak tertulis dalam neraca perusahaan. Upah/gaji yang sudah seharusnya dikeluarkan tetapi belum dibayarkan tetap dimasukkan di rincian upah/gaji.

- h. **Upah lembur adalah** upah yang diberikan/dibayarkan kepada pekerja yang bekerja di luar jam kerja biasa.
- i. **Hadiah adalah** pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang diberikan kepada pekerja/karyawan. Pengeluaran ini sifatnya hanya sewaktu-waktu saja.
- j. **Tunjangan adalah** pengeluaran perusahaan/usaha berupa uang dan atau barang yang dibayarkan kepada instansi/yayasan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/karyawan.
- k. **Pendapatan adalah** nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu usaha. Termasuk pendapatan lain-lain.

2. Konsep dan Definisi Khusus

a. STKU - PERDAGANGAN (STKU-G) 2015

- 1) **Kegiatan Perdagangan adalah** kegiatan membeli dan menjual barang, baik barang baru maupun bekas untuk tujuan penyaluran/pendistribusian **tanpa mengubah bentuk** barang tersebut.
- 2) **Perusahaan/ usaha perdagangan adalah** perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas, yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, sub agen, grosir, pengumpul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran.
- 3) **Perdagangan besar adalah** penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2015**).
- 4) **Perdagangan eceran adalah** penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga, melalui toko, *departement store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu,

pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (**Buku KBLI 2015**).

- 5) **Jenis komoditi merupakan** uraian lebih lanjut dari kelompok komoditi. Setiap kelompok komoditi diuraikan menjadi satu atau beberapa jenis komoditi.
- 6) **Kelompok komoditi adalah** suatu klasifikasi barang ekonomi perdagangan yang homogen seperti kelompok komoditi sayuran, buah-buahan, elektronik, furniture, dan lain sebagainya.
- 7) **Kegiatan utama adalah** kegiatan yang mempunyai nilai penjualan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha. Misal: Suatu perusahaan/usaha menjual berbagai macam keperluan rumah tangga, disamping itu dia juga menerima barang titipan (konsinyasi) untuk dijual, dimana omset terbesarnya adalah dari penjualan berbagai macam keperluan rumah tangga. Jadi kegiatan utama perusahaan/usaha tersebut adalah perdagangan berbagai macam keperluan rumahtangga. Bila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama dari perusahaan/usaha.
- 8) **Nilai penjualan (Omset)** adalah hasil penjualan barang dagangan yang terjual, tidak termasuk barang konsinyasi.
- 9) **Nilai pembelian adalah** uang yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha untuk membeli barang dagangan yang terjual.
- 10) **Margin adalah** selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian barang dagangan yang terjual.
- 11) **Pendapatan dari fee/ komisi barang konsinyasi adalah** komisi yang diterima dari barang dagangan titipan yang terjual.

Cakupan **KBLI** pada **STKU-PERDAGANGAN** (STKU-G) 2015 adalah sebagai berikut:

- **PERDAGANGAN BESAR MOBIL BARU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45101**).

- **PERDAGANGAN BESAR MOBIL BEKAS**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus,

pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45102**).

- **PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BARU**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45103**).

- **PERDAGANGAN ECERAN MOBIL BEKAS**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran mobil bekas, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, karavan, mikrobus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi-trailer dan berbagai kendaraan pengangkut bermotor lainnya (**45104**).

- **REPARASI MOBIL**

Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris tidak sebagai bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya. (**45201**)

- **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangan mobilnya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. (**45301**)

- **PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG DAN AKSESORI MOBIL**

Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangan mobilnya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan. (**45302**)

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BARU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped (**45401**).

- **PERDAGANGAN BESAR SEPEDA MOTOR BEKAS**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped (**45402**).
- **PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BARU**
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped (**45403**).
- **PERDAGANGAN ECERAN SEPEDA MOTOR BEKAS**
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped (**45404**).
- **PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya. (**45405**)
- **PERDAGANGAN ECERAN SUKU CADANG SEPEDA MOTOR DAN AKSESORINYA**
Kelompok ini mencakup usaha penjualan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya. (**45406**)
- **REPARASI DAN PERAWATAN SEPEDA MOTOR**
Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya. (**45407**)
- **PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman padi dan palawija sebagai bahan baku atau bahan dasar dari suatu kegiatan berikutnya, seperti padi, jagung, gabah, kacang-kacangan dan sebagainya (**46201**).
- **PERDAGANGAN BESAR BUAH YANG MENGANDUNG MINYAK**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pertanian tanaman buah yang mengandung minyak, seperti kelapa dan kelapa sawit (**46202**).
- **PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar yang berhubungan dengan binatang hidup, seperti bibit unggas, ternak potong dan ternak atau binatang hidup lainnya (**46205**).
- **PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil perikanan sebagai bahan baku atau bahan dasar dari kegiatan berikutnya,

seperti ikan, udang, kepiting, tiram, mutiara, kerang, bibit ikan, bibit udang, rumput laut, bunga karang dan kodok (**46206**).

- **PERDAGANGAN BESAR BERAS**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir (**46311**).

- **PERDAGANGAN BESAR BUAH-BUAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar buah-buahan untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti jeruk, apel, pear, mangga dan buah lainnya (**46312**).

- **PERDAGANGAN BESAR SAYURAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar sayur-sayuran untuk digunakan sebagai konsumsi akhir, seperti bayam, kangkung, kol dan sayuran lainnya (**46313**).

- **PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kopi, teh dan kakao untuk digunakan sebagai konsumsi akhir (**46314**).

- **PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar gula, coklat dan kembang gula (**46331**).

- **PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil pengolahan tembakau dan bumbu rokok, seperti rokok kretek dan rokok putih (**46335**).

- **PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar hasil industri tekstil, seperti bermacam-macam tekstil/kain, kain batik dan lain-lain. Termasuk barang linen rumah tangga (bahan kain untuk keperluan rumah tangga) dan lain-lain (**46411**).

- **PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki (**46412**).

- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan

perlengkapannya, radio, televisi, alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, *wallpaper*, karpet dan sebagainya (46491).

- **PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi (46523).

- **PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar macam-macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain (46638).

- **PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar kertas dan karton (46695).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI SUPERMARKET/ MINIMARKET**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/ makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (*self service*/swalayan). Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, mainan anak-anak, kosmetik dan pakaian. Misalnya supermarket atau minimarket (47111).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI SUPERMARKET/ MINIMARKET (TRADISIONAL)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/ makanan, minuman atau tembakau di dalam bangunan bukan swalayan/supermarket/minimarket. Di samping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti pakaian, perabot rumah tangga, kosmetik dan mainan anak. Misalnya warung atau toko bahan kebutuhan pokok (47112).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA/ DEPARTMENT STORE**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (*department store*), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik (47191).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG BUKAN DI TOSERBA/ DEPARTMENT STORE)**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau bukan toserba/*department store*. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, perabot rumah tangga, perhiasan, mainan anak-anak dan kosmetik, yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Misalnya toko barang kelontong (47192).

- **PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus padi dan palawija, di dalam bangunan seperti gabah, jagung, ubi jalar, ubi kayu, talas, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hitam dan kacang polong (47211).

- **PERDAGANGAN ECERAN BUAH-BUAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus buah-buahan di dalam bangunan, seperti apel, anggur, alpokat, belimbing, duku, durian, jambu, jeruk, mangga, manggis, nanas, pisang, pepaya, rambutan, sawo, salak dan semangka (47212).

- **PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sayuran di dalam bangunan, seperti bawang merah, bawang putih, kentang, wortel, terong, buncis, mentimun, labu siam, kacang panjang dan kacang merah (47213).

- **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil peternakan di dalam bangunan, seperti susu dan telur, termasuk pula daging ternak dan unggas (47214).

- **PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus hasil perikanan di dalam bangunan, seperti udang segar, ikan segar, cumi-cumi segar, ikan hias, nener (benih ikan bandeng), benur (benih udang), benih ikan/ikan hias dan rumput laut (47215).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERAS**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai jenis beras di dalam bangunan, seperti beras cianjur, beras cisadane, beras Saigon dan beras ketan (47241).

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus rokok dan atau tembakau di dalam bangunan seperti rokok kretek, rokok putih, rokok cerutu, rokok kelembak, tembakau krosok, tembakau susur dan tembakau pipa/papier (47230).

- **PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti *handphone*, pesawat telepon dan perlengkapannya serta usaha jasa penjualan pulsa, baik berupa voucher maupun elektronik, termasuk pula jasa penjualan kartu perdana telepon selular (47414).

- **PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, *tape recorder*, *audio amplifier* dan *cassete recorder*. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD (47420).

- **PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR KENDARAAN DI SPBU**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran bahan bakar untuk mobil dan sepeda motor (seperti bensin, solar, dan LPG), termasuk pula bahan bakar untuk speed boat dan genset. Biasanya kegiatan ini dikombinasikan dengan penjualan bahan-bahan pelumas, *cooling products*, bahan-bahan pembersih dan barang-barang lain untuk keperluan mobil dan sepeda motor. Apabila kegiatan utama adalah menjual bahan bakar dan pelumas mobil dan sepeda motor, maka termasuk dalam kelompok ini (47301). Perdagangan besar bahan bakar dimasukkan dalam kelompok 46610. Perdagangan eceran LPG dan bahan bakar untuk keperluan memasak atau pemanas dimasukkan dalam kelompok 47772.

- **PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain

batik (kain batik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman (47511).

- **PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus berbagai macam material bangunan, seperti semen, pasir, paku, cat dan lain-lain (47528).

- **PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus furniture, seperti meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak buku, rak sepatu dan bufet. Termasuk juga usaha perdagangan eceran khusus kasur dan bantal/guling (47591).

- **PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/ KARTON**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus kertas, karton dan barang dari kertas/karton, seperti kertas HVS, kertas doorslag, kertas kraft, kertas tipis, kertas kalkir, kertas berwarna, karton manila, karton buffalo skin, karton serat (*fiber board*), kertas pembungkus (*wrapping*), karton kemasan untuk makanan/minuman, kantong kertas, kertas/karton berlapis, kertas surat (*stationary*), stensil sheet, kertas karbon dan kertas duplikator (47650).

- **PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN**

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah (47711).

b. STKU - TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN (STKU-H) 2015

- 1) **Perusahaan angkutan** adalah usaha angkutan yang diselenggarakan/dikelola secara komersial, umumnya terletak pada suatu lokasi dan mempunyai catatan administrasi tersendiri meliputi biaya, output/omzet, pekerja dan balas jasa pekerja yang digunakan dalam proses usaha. **Catatan:** Kendaraan yang digunakan dalam usaha angkutan dapat kendaraan milik sendiri atau kendaraan milik orang lain.

- 2) **Kegiatan Transportasi dan pergudangan** mencakup penyediaan angkutan penumpang atau barang, baik yang berjadwal maupun tidak, dengan menggunakan rel, saluran pipa, jalan darat, air atau udara dan kegiatan yang berhubungan, seperti fasilitas terminal dan parkir, bongkar muat, pergudangan dan lain-lain. Termasuk dalam kategori ini penyewaan alat angkutan dengan pengemudi atau operator, juga kegiatan pos dan kurir.
- 3) **Kegiatan utama** adalah kegiatan yang mempunyai nilai pendapatan paling besar di antara beberapa jenis kegiatan dalam suatu perusahaan/usaha. Bila suatu perusahaan/usaha hanya melakukan satu jenis kegiatan maka jenis kegiatan tersebut merupakan jenis kegiatan utama dari perusahaan/ usaha.

Cakupan **KBLI STKU–TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN (STKU–H) 2015** adalah sebagai berikut:

- **Angkutan Penumpang(Bus)**
 - **Angkutan Bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP)** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan(**49211**).
 - **Angkutan Bus Perbatasan** mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP(**49212**).
 - **Angkutan Bus Antarkota Dalam Provinsi (AKDP)** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan (**49213**).
 - **Angkutan Bus Kota** mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan mobil bus umum (bus besar/sedang) yang terikat dalam trayek(**49214**).
 - **Angkutan Bus Lintas Batas Negara** mencakup usaha pengangkutan orang dari satu kota ke kota lain yang melewati batas negara dengan menggunakan mobil bus umum (besar/sedang) yang terikat dalam trayek(**49215**).
 - **Angkutan Bus Khusus** mencakup usaha pengangkutan orang yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, meliputi angkutan antar jemput, angkutan karyawan, angkutan pemukiman dan

angkutan pemadu moda menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) (**49221**).

- **Angkutan Bus Pariwisata** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor (bus umum besar/sedang) untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial, bus wisata. Misalnya White Horse, Blue Bird, Blue Star (**49222**).
- **Angkutan Penumpang (Bukan Bus)**
 - **Angkutan Perbatasan Bukan Bus** mencakup usaha pengangkutan orang pada kabupaten/kota yang berbatasan langsung menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dan belum terlayani trayek AKAP/AKDP (**49411**).
 - **Angkutan Antarkota Dalam Provinsi (AKDP) Bukan Bus** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor bukan bus dengan jadwal dan trayek AKDP yang ditetapkan (**49412**).
 - **Angkutan Perkotaan** mencakup usaha pengangkutan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah Kota atau wilayah ibu kota Kabupaten atau dalam Daerah Khusus Ibu Kota dengan menggunakan kendaraan bermotor selain bus atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek (**49413**).
 - **Angkutan Perdesaan** mencakup usaha pengangkutan penumpang dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten, yang menghubungkan antarperdesaan dan atau ibukota kabupaten, dengan menggunakan kendaraan bermotor selain bus berdasarkan trayek dan tidak berdasarkan jadwal tertentu (**49414**).
 - **Angkutan Taksi** mencakup usaha pengangkutan orang dengan menggunakan mobil penumpang yang diberi tanda khusus dan dilengkapi dengan argometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan wilayah operasi terbatas (**49421**).
 - **Angkutan Sewa** mencakup usaha pengangkutan penumpang dengan menggunakan mobil penumpang umum yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif dan tarif berdasarkan kesepakatan antara pengguna dengan penyedia angkutan (**49422**).

- **Angkutan Barang**

- **Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum** mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang, seperti angkutan dengan truk, pick up dan container (**49431**).
- **Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus** mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk barang yang secara khusus mengangkut satu jenis barang, seperti angkutan bahan bakar minyak (BBM), angkutan barang berbahaya dan angkutan barang alat-alat berat (**49432**).

- **Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan**

Mencakup angkutan penumpang atau barang pada perairan dalam, termasuk persewaan kapal pesiar dengan kru untuk perairan dalam. ASDP terdiri dari kegiatan:

- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tetap Dan Teratur (**50211**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Penumpang Dengan Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur (**50212**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Dengan Trayek Tidak Tetap Dan Tidak Teratur Untuk Wisata (**50213**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Penumpang (**50214**)
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Penumpang (**50215**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang (**50216**)
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Penumpang (**50217**)
- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota Untuk Penumpang (**50218**)
- Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Penumpang Termasuk Penyeberangan Antarnegara (**50219**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Umum Dan Atau Hewan (**50221**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Khusus (**50222**)
- Angkutan Sungai Dan Danau Untuk Barang Berbahaya (**50223**)

- Angkutan Penyeberangan Umum Antarprovinsi Untuk Barang **(50224)**
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarprovinsi Untuk Barang **(50225)**
- Angkutan Penyeberangan Umum Antarkabupaten/kota Untuk Barang **(50226)**
- Angkutan Penyeberangan Perintis Antarkabupaten/kota Untuk Barang **(50227)**
- Angkutan Penyeberangan Umum Dalam Kabupaten/kota Untuk Barang **(50228)**
- Angkutan Penyeberangan Lainnya Untuk Barang Termasuk Penyeberangan Antarnegara **(50229)**
- **Pergudangan** mencakup perusahaan fasilitas penyimpanan dan penggudangan untuk semua jenis barang, seperti gudang tertutup tempat penyimpan butir-butiran makanan ternak, gudang barang dagangan umum, tangki penyimpanan (minyak, air dan lain-lain). Di sini juga mencakup penggudangan dari barang dalam zona perdagangan luar negeri. Tidak termasuk fasilitas parkir untuk kendaraan bermotor, pengelolaan fasilitas penyimpanan sendiri dan penyewaan ruang kosong **(52101)**
- **Jasa Cold Storage** mencakup usaha jasa penyimpanan barang yang memerlukan pendinginan dalam jangka waktu pengawetan tertentu, sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir. **(52102)**
- **Perparkiran** mencakup usaha penyelenggaraan parkir yang dilakukan di badan jalan dan penyelenggaraan parkir diluar badan jalan, seperti gedung parkir, lapangan parkir yang terdapat di gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, rumahsakit dan jasa perparkiran di luar badan jalan lainnya. **(52214 dan 52215)**
- **Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)** mencakup: kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang) terlepas dari jenis angkutan yang digunakan, kegiatan bongkar muat kapal, kegiatan bongkar muat kendaraan dengan kereta gerbong barang **(52240)**
- **Jasa Ekspedisi** mencakup usaha jasa pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar melalui berbagai armada transportasi, seperti:
 - **Jasa Pengurusan Transportasi (JPT)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar,

melalui angkutan kereta api, angkutan darat, angkutan laut maupun angkutan udara. (52291)

- **Jasa Ekspedisi Muatan Kereta Api Dan Ekspedisi Angkutan Darat (EMKA & EAD)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, baik yang diangkut melalui kereta api maupun alat angkutan darat (52292).
- **Jasa Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui angkutan laut (52293).
- **Jasa Ekspedisi Muatan Pesawat Udara (EMPU)** mencakup usaha pengiriman dan atau pengepakan barang dalam volume besar, yang diangkut melalui alat angkutan udara (52294).
- **Kurir** mencakup usaha jasa pelayanan menyelenggarakan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, bungkusan kecil, paket, dan uang yang dilakukan oleh swasta, seperti TIKI (Titipan Kilat), DHL. Tidak termasuk pengiriman surat, warkat pos dan kartu pos yang berperangko. Keegiatannya mencakup pengambilan, penyortiran, pengangkutan dan pengiriman (domestik atau internasional) surat pos dan bingkisan (berbentuk surat) dan bungkusan oleh perusahaan yang tidak beroperasi di bawah pelayanan umum. Satu atau lebih moda transportasi mungkin dilibatkan dan aktivitas pengiriman mungkin dilakukan dengan angkutan pribadi atau angkutan umum. Termasuk pendistribusian dan pengiriman surat dan bingkisan/parsel (53200).

c. **STKU - INFORMASI (STKU-J) 2015**

- 1) **Informasi** adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan.
- 2) **Penerbitan** adalah suatu usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan proses editorial, produksi, dan pemasaran barang-barang, naskah tercetak yang didistribusikan kepada pembaca.
- 3) **Koran** atau **surat kabar** adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang, biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Topiknya bisa berupa even politik, kriminalitas, olahraga, tajuk rencana, cuaca. Jenis surat kabar umum biasanya diterbitkan setiap hari, kecuali pada hari-hari libur. Surat kabar sore juga umum di beberapa negara. Selain itu, juga terdapat surat kabar mingguan (tabloid) yang biasanya

lebih kecil dan kurang prestisius dibandingkan dengan surat kabar harian dan isinya biasanya lebih bersifat hiburan.

- 4) **Tiras/ Oplah** adalah jumlah surat kabar yang diterbitkan menurut periode terbit.
- 5) **Siaran** adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
- 6) **Radio** adalah media elektronik yang bersifat khas sebagai media audio.
- 7) **Penyiaran Radio** adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan, informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
- 8) **Penyiaran dan Pemrograman Televisi** mencakup kegiatan pembuatan program saluran televisi lengkap, dari komponen program yang dibeli (misalnya film, dokumentasi, dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (misalnya berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi dari hal tersebut.
- 9) **Durasi adalah** lamanya sesuatu berlangsung/rentang waktu.
- 10) **Iklan/pariwara** adalah informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan (promosi barang, jasa, perusahaan, ide yang harus dibayar oleh sebuah sponsor).
- 11) **Iklan Komersial** adalah iklan yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
- 12) **Iklan Non Komersial/iklan layanan masyarakat** adalah iklan yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.

13) Produksi film, video dan program televisi mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film.

Cakupan **KBLI** pada **STKU – INFORMASI** (STKU – J) 2015 adalah sebagai berikut:

- **Penerbitan surat kabar, jurnal, buletin atau majalah** adalah kegiatan yang mencakup usaha penerbitan surat kabar iklan, jurnal, buletin, majalah umum dan teknis, termasuk komik, penerbitan jadwal siaran radio dan televisi dan sebagainya. Informasi ini dapat dipublikasikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, termasuk di internet. Dalam kegiatan ini tidak mencakup perdagangan eceran *software*, penerbitan surat kabar periklanan, dan penyediaan *software* secara online (aplikasi hosting dan penyediaan jasa aplikasi). **(58130)**.
- **Penyiaran Radio Oleh Pemerintah**, mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran radio, seperti penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat atau pendengar; kegiatan jaringan radio, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan program sinyal suara untuk para pendengar lewat udara, kabel atau satelit; kegiatan penyiaran radio lewat internet (stasiun radio internet); dan penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio. Termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran radio **(60101)**.
- **Penyiaran Radio Oleh Swasta**, mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan siaran radio yang dikelola oleh swasta, seperti penyiaran sinyal suara melalui studio penyiaran radio dan fasilitas untuk transmisi pemrograman sinyal suara kepada masyarakat atau pendengar; kegiatan jaringan radio, yaitu mengumpulkan dan mengirimkan program sinyal suara untuk pendengar lewat udara, kabel atau satelit; kegiatan penyiaran radio lewat internet (stasiun radio internet); dan penyiaran data yang terintegrasi dengan penyiaran radio. Termasuk juga stasiun relay (pemancar kembali) siaran radio **(60102)**.

- **Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Pemerintah**, mencakup kegiatan pemerintah dalam usaha penyelenggaraan siaran televisi, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli (seperti film, dokumenter dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya; pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit **(60201)**.
- **Penyiaran dan Pemrograman Televisi Oleh Swasta**, mencakup kegiatan dalam usaha penyelenggaraan kegiatan televisi yang dikelola oleh swasta, termasuk juga station relay (pemancar kembali) siaran televisi, seperti pembuatan program saluran televisi lengkap dari komponen program yang dibeli [seperti film, dokumenter, dan lain-lain), komponen program yang dihasilkan sendiri (seperti berita lokal, laporan langsung) atau kombinasi keduanya]; pemrograman dari saluran video atas dasar permintaan; dan penyiaran data yang diintegrasikan dengan siaran televisi. Program televisi lengkap dapat disiarkan sendiri atau melalui distribusi pihak ketiga, seperti perusahaan kabel atau provider televisi satelit. Pemrograman dapat bersifat umum atau khusus (misalnya format terbatas seperti program berita, olahraga, pendidikan atau program yang ditujukan untuk anak muda), dapat dibuat dengan bebas tersedia untuk pemakai atau dapat hanya tersedia atas dasar langganan **(60202)**.
- **Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Pemerintah** mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh pemerintah atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film **(59111)**.

- **Produksi Film, Video dan Program Televisi Oleh Swasta** mencakup usaha pembuatan dan produksi gambar bergerak, film, video, program televisi atau iklan bergerak televisi yang dikelola oleh swasta atas dasar balas jasa juga usaha pembuatan film untuk televisi dan jasa pengiriman film dan agen pembukuan film (59112).

d. STKU – LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK (STKU-K) 2015

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan di setiap kuesioner dalam survei ini antara lain:

1) Jenis lapangan usaha adalah klasifikasi lapangan usaha menurut kegiatan ekonomi. Adapun lapangan usaha yang dicakup dalam survei ini meliputi 16 kelompok, diantaranya adalah:

- a) Asuransi Jiwa Konvensional,
- b) Asuransi Jiwa Syariah,
- c) Asuransi Jiwa Non Konvensional,
- d) Asuransi Jiwa Syariah,
- e) Reasuransi Konvensional,
- f) Reasuransi Syariah,
- g) Dana Pensiun,
- h) Koperasi Simpan Pinjam,
- i) Pedagang Valuta Asing,
- j) Sewa Guna Usaha,
- k) Anjak Piutang,
- l) Kartu Kredit,
- m) Pembiayaan Konsumen,
- n) Manager Investasi,
- o) *Adjuster*, dan
- p) Aktuaris.

Klasifikasi kegiatan usaha yang tercakup dalam survei ini adalah sebagai berikut:

a) ASURANSI

Kelompok ini mencakup usaha yang berkaitan dengan asuransi, yakni perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi,

untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Usaha yang tercakup dalam kelompok ini adalah Asuransi Jiwa Konvensional (65111), Asuransi Jiwa Syariah (65112), Asuransi Non Jiwa Konvensional (65121), Asuransi Non Jiwa Syariah (65122), Reasuransi Konvensional (65201), dan Reasuransi Syariah (65202).

- ❖ **Asuransi Jiwa:** asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Contoh: PT. AJB Bumiputera 1912, PT. Astra CMG Life.
- ❖ **Asuransi Non Jiwa:** asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- ❖ **Reasuransi:** asuransi yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

b) DANA PENSIUN

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan sejumlah uang yang dibayarkan secara berkala ataupun sekaligus pada masa pensiun sebagai santunan hari tua/uang pensiun. Termasuk dalam kelompok ini usaha mengumpulkan dan menginvestasikan dana untuk keperluan pembayaran sejumlah uang pada masa pensiun. Yang termasuk ke dalam usaha dana pensiun adalah Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Dana Pensiun Pemberi Kerja. (65300)

c) KOPERASI SIMPAN PINJAM

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha simpan pinjam bagi para anggotanya. (64140)

d) PEGADAIAN

Kelompok ini mencakup usaha penyediaan fasilitas pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai. Kredit atau pinjaman yang diberikan didasarkan pada nilai jaminan barang bergerak yang diserahkan, dengan tidak memperhatikan penggunaan dana pinjaman yang diberikan. (64921)

e) PEDAGANG VALUTA ASING

Pedagang valuta asing adalah perusahaan yang memperoleh izin Bank Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli mata uang asing/valuta asing. (66197)

f) PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah badan usaha di luar bank yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Kegiatan ini terdiri dari sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen. (64300)

❖ **Perusahaan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi (Financial Leasing)** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara *Finance Lease* maupun *Operating Lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*Lessee*) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala. Contoh: Exim SB Leasing.

❖ **Perusahaan Anjak Piutang (Factoring)** adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Contoh: Niaga Factoring.

❖ **Perusahaan Usaha Kartu Kredit (Credit Card)**: badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk membeli barang dan jasa pemegang kartu kredit. **Contoh:** PT. Dinner Jaya Indonesia Internasional.

❖ **Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Credit)**: badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran/berkala oleh konsumen. Contoh: Adira Dinamika

Finance.

g) MODAL VENTURA

Modal ventura adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal pada suatu perusahaan pasangan usaha (PPU) untuk jangka waktu tertentu (maksimal 10 tahun). Perusahaan Modal Ventura terlibat secara tidak langsung dalam aspek-aspek manajemen, administrasi, pemasaran yang tujuannya untuk mengembangkan PPU. (64991)

h) JASA PENUNJANG ASURANSI

Jasa penunjang asuransi adalah usaha yang berkaitan dengan jasa penunjang perusahaan asuransi. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah broker, penilai kerugian asuransi (*adjuster*), dan aktuaris.

❖ **Adjuster** adalah seseorang atau badan usaha independen yang bertugas memeriksa penyebab, menaksir, dan menghitung kerugian-kerugian yang diderita tertanggung karena suatu musibah, dan memberikan pendapat/pandangannya apakah kerugian tersebut disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin sesuai polis yang dikeluarkan. (66210)

❖ **Aktuaris** adalah kegiatan usaha perseorangan yang menerapkan prinsip-prinsip matematika untuk menentukan atau menghitung kemungkinan-kemungkinan berdasarkan data-data statistik dalam menyusun atau merancang berbagai jenis program asuransi jiwa, dan menentukan besarnya tarif premi. (66291)

- 2) **Pekerja usaha Dana Pensiun:** Pada usaha Dana Pensiun, pekerja yang dimaksud adalah pengelola usaha Dana Pensiun.
- 3) **Pekerja usaha Koperasi Simpan Pinjam:** Pada usaha Koperasi Simpan Pinjam, pekerja yang dimaksud adalah pengelola usaha Koperasi Simpan Pinjam.
- 4) **Premi yang diterima** adalah uang yang diterima oleh perusahaan asuransi/reasuransi dari pihak tertanggung.
- 5) **Klaim yang dibayarkan** adalah uang yang harus dibayarkan oleh perusahaan asuransi/reasuransi kepada tertanggung.
- 6) **Kredit/ pembiayaan yang disalurkan** adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara pihak pemberi kredit dengan penerima kredit.

- 7) **Posisi simpanan yang diterima** adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada koperasi dalam bentuk tabungan, deposito, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- 8) **Nilai penjualan/ Nilai valas yang dijual** adalah seluruh nilai valas yang dijual oleh perusahaan pedagang valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs jual) yang berlaku pada saat transaksi terjadi.
- 9) **Nilai pembelian/ Nilai Valas yang dibeli:** seluruh nilai valas yang dibeli oleh perusahaan pedagang valuta asing dengan harga rata-rata nilai tukar (kurs beli) yang berlaku pada saat transaksi terjadi.

e. **STKU– KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STKU – O) 2015**

Beberapa konsep dan definisi yang digunakan dalam kuesioner STKU-O ini adalah :

- 1) **Pendapatan daerah** adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a) Pendapatan Asli Daerah
- b) Dana Perimbangan
- c) Lain-lain Pendapatan yang Sah

a) **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan atau peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

- **Pajak Daerah** adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah provinsi antara lain pajak kendaraan bermotor,

bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain-lain. Sedangkan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, parkir, air bawah tanah, sarang burung walet, lingkungan, dan lain-lain.

- **Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- **Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah pendapatan yang berupa hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), bagian laba Lembaga Keuangan Bank, bagian laba Lembaga Keuangan Non Bank, bagian laba Perusahaan Milik Daerah Lainnya, serta bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.
- **Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** adalah pendapatan asli daerah terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

b) **Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

- **Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak**

- **Bagi Hasil Pajak** adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan PPh Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

- **Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam** adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan sumber daya alam kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.
 - **Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.
 - **Dana Alokasi Khusus (DAK)** adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus dana alokasi umum.
 - Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional.
 - Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.
 - Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.
- c) **Lain-lain Pendapatan yang Sah** adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

2) **Belanja Daerah** adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Belanja Daerah terdiri dari:

- a) Belanja Tidak Langsung
- b) Belanja Langsung

a) **Belanja Tidak Langsung** adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tidak langsung terdiri dari: belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

- **Belanja Pegawai** adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.
- **Belanja Bantuan Sosial** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- **Belanja tidak langsung lainnya** adalah belanja yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.
- **Belanja Bunga** adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang

dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

- **Belanja Subsidi** adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.
- **Belanja Hibah** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, badan/ lembaga/organisasi swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.
- **Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa** adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota

- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

- **Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa** adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/ pemerintah desa lainnya

b) Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

- **Belanja Pegawai** adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- **Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa

dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak dan peng-gandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai, dan lain-lain belanja barang dan jasa.

- **Belanja Modal** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksana-kan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, serta belanja aset lainnya.

3) Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

4) Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah.

2.9 Batasan Penyajian

Pada hakikatnya kegiatan STKU Terintegrasi 2015 adalah untuk mendapatkan gambaran data secara *continue* (triwulanan) dan komprehensif dari usaha-usaha yang tercakup. STKU Terintegrasi 2015 merupakan panel survei yaitu suatu responden akan dicacah setiap triwulan dari triwulan I

sampai dengan triwulan IV. Permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan data tersebut adalah beberapa responden memberikan jawaban pada triwulan I, kemudian tidak memberikan jawaban pada triwulan II, III, dan/atau IV (tidak lengkap 4 triwulan). Dengan metode panel survei ada kecenderungan respon responden makin menurun dari triwulan I sampai dengan triwulan IV yang berakibat pada ketidaklengkapan series data dalam satu tahun.

Berdasarkan kondisi data yang diperoleh, maka penyajian data dalam publikasi ini STKU-Perdagangan (STKU-G) dibatasi hanya menyajikan indeks nilai penjualan dan indeks nilai pembelian setiap triwulan dalam satu tahun baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. Disamping itu disajikan pula indeks pekerja, indeks nilai produktivitas tenaga kerja dan prospek kegiatan usaha (omset) pada triwulan mendatang.

Sebagaimana dalam tujuan survei telah disebutkan bahwa akan diperoleh indeks nilai margin perdagangan dan pengangkutan. Untuk menghitung nilai indeks tersebut diperlukan informasi nilai pembelian dan nilai penjualan untuk barang yang sama dalam suatu periode tertentu seperti triwulanan. Berdasarkan hasil lapangan masih ditemui permasalahan pada data yang diperoleh maka indeks tersebut belum dapat disajikan.

Permasalahan pada data tersebut diantaranya pada nilai pembelian barang dagangan yang terjual pada bulan-bulan (triwulan) pencacahan, data yang diperoleh adalah nilai pembelian barang dagangan pada bulan-bulan (triwulan) pencacahan. Akibatnya data pada beberapa responden terjadi nilai pembelian barang dagangan lebih besar dari nilai penjualan.

Pada STKU Transportasi dan Pergudangan (STKU-H), seperti STKU sektor lainnya, penyajian data mengenai kegiatan usaha Transportasi dan Pergudangan dibatasi pula hanya menyajikan indeks (pekerja, balas jasa pekerja, pendapatan, produktivitas pekerja, dan produksi perusahaan) setiap triwulan dalam satu tahun. Di samping itu, tidak semua kegiatan usaha pada sektor Transportasi dan Pergudangan dicakup dalam STKU Terintegrasi 2015 ini. Hanya delapan kegiatan usaha yang dicakup, yaitu angkutan penumpang, angkutan barang, ASDP-Non PT.ASDP (Persero), pergudangan/*cold storage*, perparkiran, bongkar muat, ekspedisi, dan kurir. Sehingga dalam pembahasan hasil, yang dimaksud kegiatan usaha

Transportasi dan Pergudangan adalah kegiatan usaha yang menjadi cakupan STKU 2013 yaitu delapan kegiatan usaha tersebut.

STKU-Informasi (STKU-J) dibatasi hanya untuk indeks jumlah pekerja, indeks balas jasa pekerja, indeks pendapatan, dan indeks output setiap triwulan atas dasar harga berlaku. Disamping itu seperti halnya STKU-Perdagangan disajikan pula indeks nilai produktivitas tenaga kerja. Karena adanya kendala series data yang tidak lengkap, indeks triwulan IV tahun 2015 terhadap triwulan IV tahun 2015 (*year on year index*) belum dapat disajikan.

Penyajian analisis perkembangan kegiatan STKU-K dalam publikasi ini tidak didasarkan pada nilai nominal, namun berdasarkan nilai indeks setiap triwulannya, dikarenakan keterbatasan jumlah sampel dan tingkat respon. Karakteristik yang dicakup dalam survei ini dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu karakteristik perusahaan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus dimana biasanya indikator ini melekat pada suatu jenis usaha, namun tidak dimiliki oleh jenis usaha lain. Karakteristik ataupun indikator umum meliputi; jumlah pekerja/tenaga kerja, balas jasa pegawai (gaji dan lainnya), dan pendapatan usaha.

<http://www.bps.go.id>

BAB III

PEMBAHASAN

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) terintegrasi Tahun 2015 mencakup usaha-usaha pada sektor Perdagangan, Transportasi, Komunikasi dan Teknologi Informasi (KTI) dan Lembaga Keuangan. Analisis hasil STKU Tahun 2015 disajikan menurut sektor serta karakteristik data masing-masing sektor.

1. Perdagangan

Perdagangan Mobil, Perdagangan Sepeda Motor, Perdagangan Besar selain Mobil dan Sepeda Motor, Perdagangan Eceran selain Mobil dan Sepeda Motor, Swalayan, Department Store.

2. Transportasi

Angkutan penumpang jalan raya, angkutan barang jalan raya, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP), Pergudangan, Perparkiran, Bongkar muat, Ekspedisi, Kurir.

3. Komunikasi dan Teknologi Informasi (KTI)

Penerbitan surat kabar, produksi film video dan program televisi, penyiaran radio oleh pemerintah, penyiaran radio oleh swasta, penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta.

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank

Asuransi, Pembiayaan dan modal ventura, Dana Pensiun, Pegadaian, Pedagang Valuta Asing, Koperasi simpan pinjam.

5. Keuangan Pemerintah Daerah

Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

<http://www.bps.go.id>

PERKEMBANGAN SEKTOR PERDAGANGAN BERDASARKAN JENIS KEGIATAN USAHA DI INDONESIA TAHUN 2015



Perdagangan Mobil & Sepeda Motor

Penjualan mobil & motor di Indonesia tahun 2015 cenderung menurun dibandingkan penjualan tahun 2014 dikarenakan melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015.

Perdagangan Besar Selain Mobil & Sepeda Motor

Peningkatan penjualan pada triwulan III kemungkinan dipicu adanya momen Idul Fitri, gaji 13, dan tahun ajaran baru sekolah.



Perdagangan Eceran Selain Mobil & Sepeda Motor

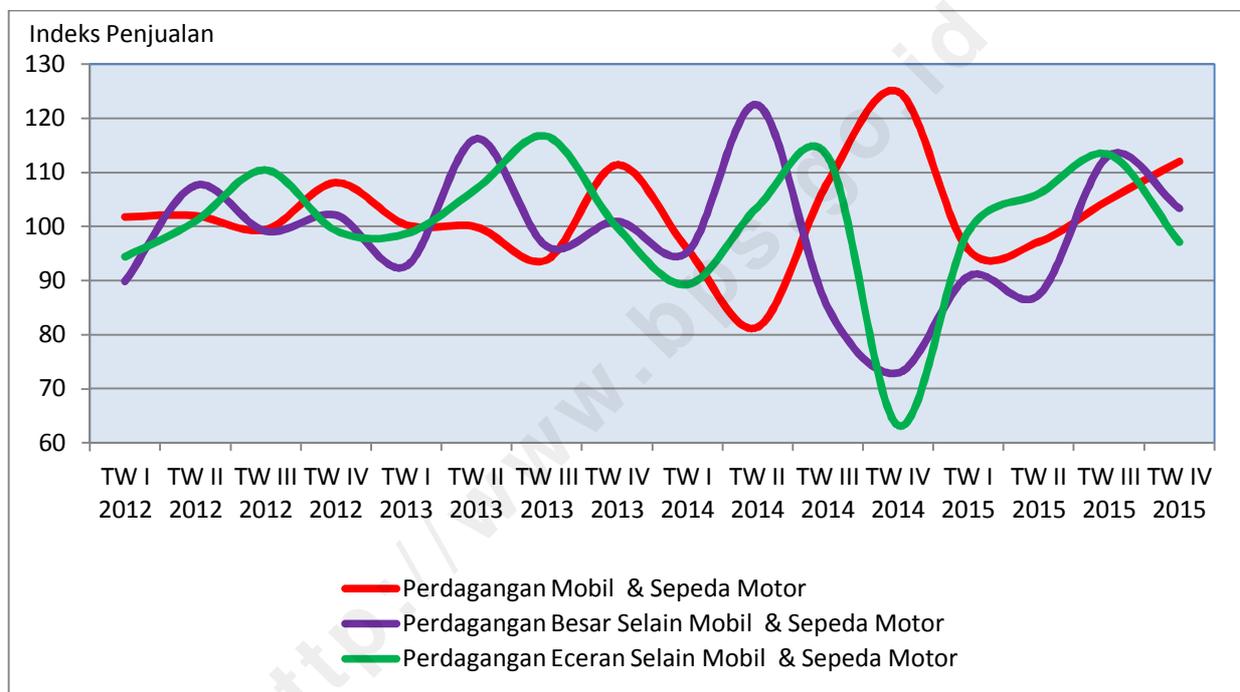
Perdagangan eceran mengalami peningkatan penjualan tertinggi pada triwulan III karena bertepatan dengan Ramadhan, Idul Fitri, serta momen lain yang memicu pertumbuhan penjualan.

<http://www.bps.go.id>

3.1 PERDAGANGAN

3.1.1 Perkembangan Kegiatan Usaha Perdagangan Tahun 2012 - 2015

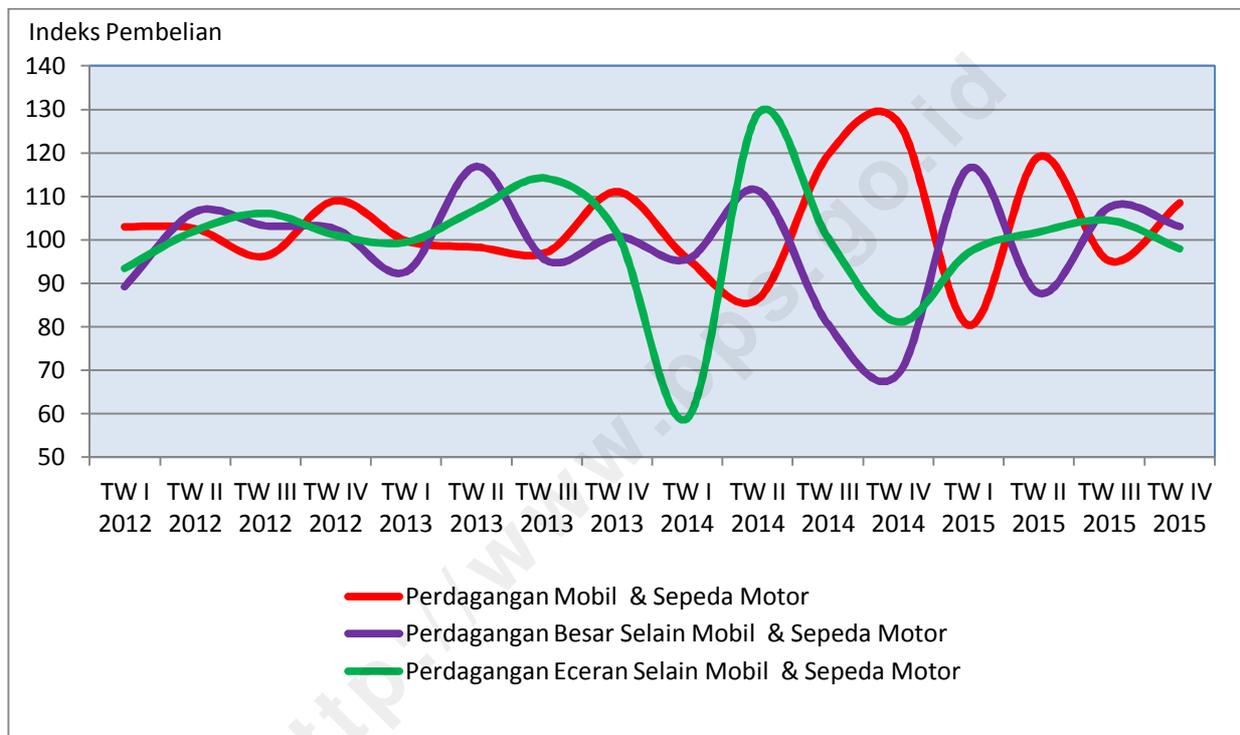
Selama 4 tahun terakhir perkembangan indeks penjualan tertinggi dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi pada Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor di Triwulan IV 2014 sebesar 124,86 persen (naik 24,86%), sedangkan terendah pada Perdagangan Eceran (PE) Selain Mobil dan Sepeda Motor di Triwulan IV 2014 sebesar 63,25 persen (turun 36,75%). Selama tahun 2012-2013 fluktuasi indeks penjualan cukup stabil berada pada range 89,95% - 116,64%. Indeks mengalami fluktuasi tajam dimulai tahun 2014 dan mulai kembali stabil mulai tahun 2015.



Grafik 3.1.1.1
Indeks Nilai Penjualan Triwulanan
Menurut Jenis Kegiatan di Indonesia, 2012-2015

Perkembangan nilai penjualan yang sangat fluktuatif pada tahun 2014, diduga sebagai efek dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami perlambatan sepanjang tahun 2014 akibat dari faktor eksternal, yakni pemulihan ekonomi global yang belum maksimal, dan juga faktor internal, yakni kisruh politik momen pergantian presiden berlanjut pada adanya kebijakan kenaikan BBM oleh presiden yang baru. Mengamati Grafik 3.1.1.1 di atas, fluktuasi yang cukup mencolok terjadi pada triwulan IV 2014, yakni pada perdagangan mobil dan sepeda motor yang meningkat sebesar 25 persen sedangkan dua jenis kegiatan

lainnya mengalami penurunan sekitar 30 persen. Hal ini diduga berkaitan dengan triwulan sebelumnya, dimana masyarakat meningkatkan konsumsinya pada sandang dan pangan pada triwulan III dan menurunkannya pada triwulan IV, karena pada triwulan III terjadi momen Ramadhan dan Idul Fitri. Selanjutnya pada triwulan IV 2014, masyarakat mengalihkan konsumsinya ke kendaraan bermotor yang juga sebagai hasil dari metode marketing perusahaan-perusahaan mobil dan sepeda motor untuk mencapai target penjualan pada akhir tahun. Berikutnya disajikan perkembangan nilai pembelian kegiatan perdagangan tahun 2012-2015.



Grafik 3.1.1.2
Indeks Nilai Pembelian Triwulanan
Menurut Jenis Kegiatan di Indonesia, 2012-2015

Perkembangan nilai pembelian searah dengan perkembangan nilai penjualannya. Indeks tertinggi dibandingkan triwulan sebelumnya terjadi pada kegiatan perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor di triwulan II 2014 sebesar 128,99 persen (naik 28,99%), sedangkan terendah juga terjadi pada kegiatan perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor di triwulan I 2014 sebesar 58,98 persen (turun 41,02%).

3.1.2 Kondisi Perdagangan Tahun 2012 – 2015

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) Sektor Perdagangan Tahun 2015 di Indonesia dilaksanakan di seluruh provinsi. Survei ini melibatkan responden sebanyak 3.661 perusahaan/usaha yang dikategorikan dalam jenis kegiatan usaha Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor, Perdagangan Besar (PB) Selain Mobil dan Sepeda Motor, dan Perdagangan Eceran (PE) Selain Mobil dan Sepeda Motor (Swalayan, *Department Store*, dan PE Lainnya). Pada tahun 2015, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi terendah selama enam tahun yakni sebesar 4,79 persen yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal. Kelesuan ekonomi ini berpengaruh terhadap fluktuasi nilai penjualan, nilai pembelian dan produktivitas, serta variatifnya persepsi mengenai prospek perusahaan/usaha perdagangan.

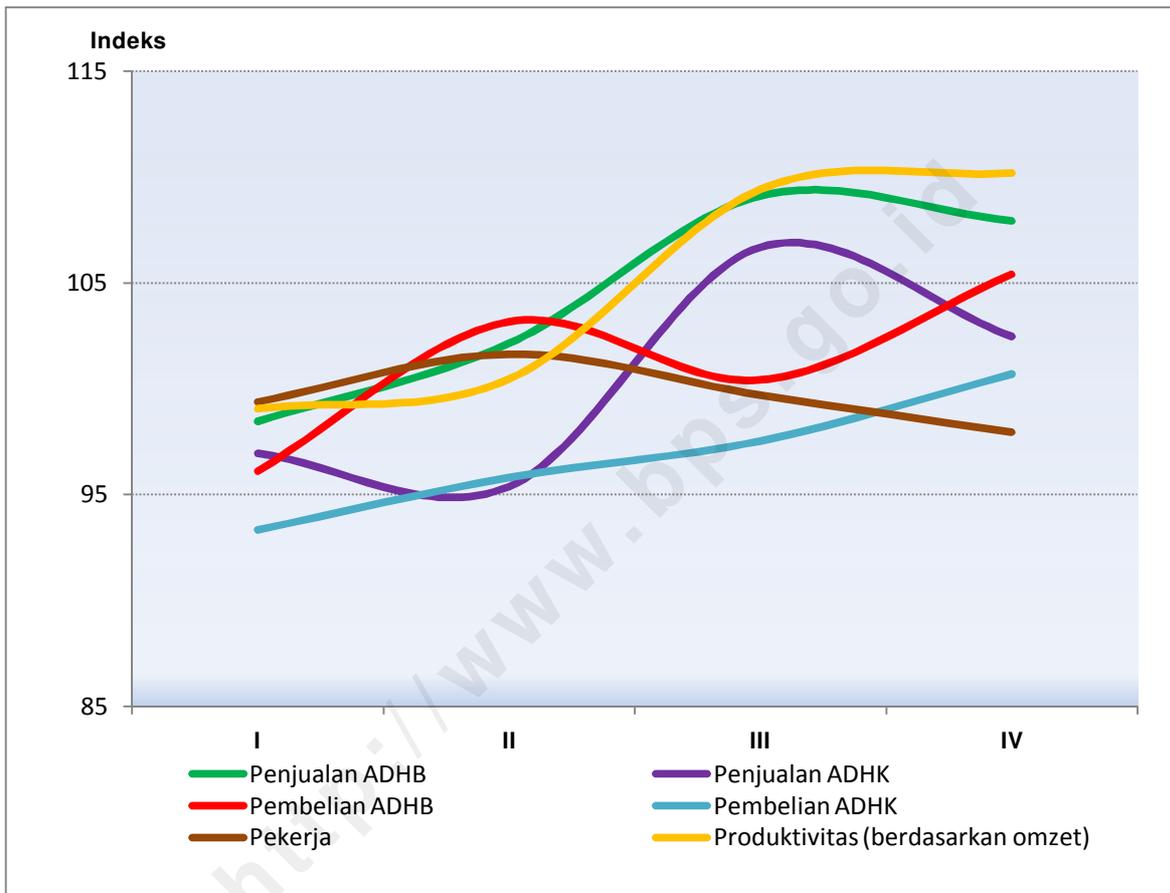
Tabel 3.1.2.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	98,46	102,14	109,10	107,92
- Atas Dasar Harga Konstan	96,95	95,38	106,70	102,48
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	96,11	103,17	100,41	105,40
- Atas Dasar Harga Konstan	93,33	95,81	97,53	100,69
3. Pekerja	99,38	101,65	99,70	97,94
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	99,07	100,47	109,42	110,19

Deflasi yang terjadi secara berturut turut pada bulan Januari dan Februari 2015 berdampak pada penurunan nilai penjualan dan nilai pembelian perusahaan perdagangan pada triwulan I, terlihat pada indeks atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, nilai penjualannya menurun dari triwulan sebelumnya berturut-turut sebesar 1,54 dan 3,05 persen. Sedangkan penurunan nilai pembelian mencapai lebih dari 3 persen. Nilai penjualan dan nilai pembelian meningkat pada tiga triwulan berikutnya tercermin dari nilai indeks yang melebihi 100 persen. Pada triwulan II, tumbuhnya nilai penjualan dan pembelian ditengarai oleh adanya bulan Ramadhan yang meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan pada triwulan III moment Idul Fitri dan pembagian gaji 13 diduga

sebagai penyebab meningkatnya indeks. Perkembangan penjualan dan pembelian kegiatan perdagangan diperlihatkan oleh Grafik 3.1.2.1.

Perlambatan ekonomi juga berdampak pada perkembangan jumlah pekerja. Jumlah pekerja pada sektor perdagangan menunjukkan tren yang relatif menurun. Peningkatan jumlah pekerja terjadi pada triwulan II yakni sebesar sebesar kurang dari 2 persen, kemungkinan untuk persiapan ramadhan dan lebaran. Kemudian pada triwulan-triwulan selanjutnya, jumlah pekerja mengalami penurunan tercermin dari nilai indeks yang kurang dari 100 persen.



Grafik 3.1.2.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Triwulanan di Indonesia, 2015

Selanjutnya, dari Tabel 3.1.2.1 dan Grafik 3.1.2.1 dapat dilihat pula informasi perkembangan produktivitas perdagangan. Produktivitas disini dimaksudkan untuk mengukur keseluruhan nilai penjualan yang mampu dihasilkan oleh setiap pekerja. Oleh karena pola perkembangan produktivitas didasarkan pada nilai omzet, maka pola perkembangan produktivitas perdagangan searah dengan pola perkembangan nilai penjualan. Produktivitas menurun sebesar 0,93 persen pada triwulan I, kemudian meningkat pada tiga triwulan berikutnya. Peningkatan produktivitas tertinggi terjadi pada triwulan IV yakni sebesar 10,19 persen.

3.1.2.1 Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor

Melemahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 berakibat pada turunnya aktivitas perdagangan mobil dan motor. Informasi dari Asosiasi Kendaraan Bermotor di Indonesia yang juga merupakan dan salah satu perusahaan otomotif terbuka, memberikan keterangan bahwa pada tahun 2015 hasil penjualan mobil dan sepeda motor mengalami penurunan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini didukung data STKU yang ditunjukkan dengan turunnya indeks penjualan dan pembelian mobil dan sepeda motor atas dasar harga berlaku pada triwulan I dan II yang mencapai lebih dari 2,5 persen seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.1.2.1.1 berikut.

Tabel 3.1.2.1.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	95,69	97,16	104,97	112,00
- Atas Dasar Harga Konstan	94,10	96,47	98,73	105,04
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	80,31	119,10	95,11	108,46
- Atas Dasar Harga Konstan	78,54	118,23	89,87	102,26
3. Pekerja	98,59	106,19	97,17	98,51
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	97,06	91,50	108,02	113,69

Bertepatan dengan adanya pembagian gaji ke-13 untuk pegawai negeri sipil, penjualan mobil meningkat sebesar 4,97 persen dari triwulan sebelumnya padahal pada periode waktu yg sama indeks pembelian menurun sebesar 4,89 persen. Selanjutnya, pada triwulan IV penjualan kembali meningkat sebesar 12 persen, dimana pada akhir tahun biasanya perusahaan otomotif memberikan diskon harga untuk pembelian mobil dan sepeda motor dalam rangka pencapaian target penjualan perusahaan.

Jumlah pekerja pada sektor perdagangan mobil dan sepeda motor menunjukkan indeks yang selalu menurun. Kecuali pada triwulan II mengalami peningkatan jumlah pekerja sebesar 6,19 persen. Namun pada dua triwulan selanjutnya jumlah pekerja terus mengalami penurunan tercermin dari nilai indeks yang kurang dari 100 persen.

Tabel 3.1.2.1.1 juga menunjukkan informasi mengenai perkembangan produktivitas perdagangan mobil dan sepeda motor tahun 2015. Produktivitas perdagangan mobil dan sepeda motor secara umum menunjukkan fluktuasi yang searah dengan nilai penjualan. Produktivitas mengalami penurunan pada triwulan I dan II, kemudian mengalami peningkatan pada dua triwulan berikutnya. Peningkatan produktivitas tertinggi terjadi pada triwulan IV yakni sebesar 13,69 persen.

Dibawah ini merupakan analisis secara rinci mengenai perdagangan mobil dan sepeda motor yang disajikan secara terpisah berdasarkan jenis komoditinya, yakni perdagangan mobil dan perdagangan sepeda motor.

3.1.2.2 Perdagangan Mobil

Perlambatan ekonomi tahun 2015 menyebabkan turunnya permintaan mobil. GAIKINDO sebagai Asosiasi Kendaraan Bermotor di Indonesia memberikan informasi bahwa pada tahun 2015 hasil penjualan mobil di Indonesia jauh menurun dibandingkan data penjualan 2014. Data STKU mendukung keterangan ini, ditunjukkan dengan penurunan indeks yang sangat signifikan pada awal triwulan 2015 dimana pada triwulan I tersebut nilai penjualan mobil mengalami penurunan lebih dari 24 persen dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Daya beli masyarakat terhadap mobil tumbuh pada triwulan II ditandai dengan meningkatnya nilai penjualan pada periode tersebut yakni sebesar hampir 10 persen. Pada triwulan III penjualan kembali menurun kemungkinan karena masyarakat lebih meningkatkan konsumsi sandang dan pangan karena adanya momen Ramadhan dan Idul Fitri. Penjualan mobil kembali meningkat pada triwulan akhir.

Tabel 3.1.2.2.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Mobil
Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	76,42	109,47	90,40	112,01
- Atas Dasar Harga Konstan	72,69	107,65	89,37	111,48
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	80,98	105,24	91,72	110,12
- Atas Dasar Harga Konstan	76,90	103,49	90,70	109,62
3. Pekerja	101,42	108,91	97,36	98,22
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	75,35	100,51	92,85	114,03

Jika diamati lebih lanjut, indeks penjualan dan pembelian kegiatan perdagangan mobil tahun 2015 secara umum mempunyai pola yang sama pada setiap triwulannya dengan indeks perdagangan secara keseluruhan, yaitu nilai penjualan dan nilai pembelian mengalami penurunan pada triwulan I dan III, serta mengalami peningkatan pada triwulan II dan IV. Hal ini mengindikasikan bahwa perdagangan mobil cukup mendominasi perdagangan dalam negeri dibandingkan dengan kategori kegiatan usaha perdagangan lainnya.

Jumlah pekerja pada kegiatan perdagangan mobil pada tahun 2015 tidak mengikuti pola penjualan maupun pembeliannya. Jumlah pekerja menunjukkan indeks yang meningkat pada triwulan I dan II, serta indeks yang menurun pada triwulan III dan IV. Peningkatan pada triwulan I dan II adalah sebesar 1,42 persen dan 8,91 persen, sedangkan penurunan yang terjadi pada triwulan III dan IV adalah sebesar 2,64 persen dan 1,78 persen.

Adapun produktivitas perdagangan mobil secara umum menunjukkan fluktuasi yang sama dengan nilai penjualan dan pembeliannya. Produktivitas mengalami penurunan pada triwulan I kemudian terus meningkat pada tiga triwulan berikutnya. Peningkatan produktivitas tertinggi, yakni sebesar 14,03 persen, terjadi pada triwulan IV.

3.1.2.3 Perdagangan Sepeda Motor

Salah satu perusahaan otomotif terbesar di Indonesia menyatakan bahwa penjualan sepeda motor di Indonesia pada 2015 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, penurunan ini disinyalir akibat dari melemahnya perekonomian di dalam negeri. Berdasarkan data hasil STKU, penurunan penjualan sepeda motor terjadi pada triwulan II dengan besarnya penurunan sebesar hampir 10 persen.

Tabel 3.1.2.3.1 memperlihatkan fluktuasi naik turunnya indeks pembelian, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, penurunan pembelian sepeda motor terjadi pada triwulan I dan III, sedangkan pada triwulan II dan IV nilai pembelian meningkat. Pengaruh inflasi terjadi pada triwulan IV, diindikasikan dengan perbedaan arah antara indeks atas dasar harga berlaku dan indeks atas dasar harga konstan.

Jumlah pekerja kegiatan perdagangan sepeda motor pada tahun 2015 tidak menunjukkan pola yang sama dengan penjualan maupun pembeliannya. Jumlah pekerja mengalami penurunan sebesar 5,53 persen pada triwulan I. Kemudian pada triwulan II jumlah pekerja meningkat sebesar 0,52 persen. Namun jumlah pekerja kembali menurun pada dua triwulan akhir dengan penurunan masing-masing kurang dari 5 persen.

Tabel 3.1.2.3.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	108,91	90,94	113,99	112,00
- Atas Dasar Harga Konstan	108,79	90,82	104,53	102,11
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	79,83	129,93	97,24	107,53
- Atas Dasar Harga Konstan	79,71	129,75	89,34	98,12
3. Pekerja	94,47	100,52	96,74	99,22
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	115,28	90,48	117,84	112,88

Produktivitas perdagangan sepeda motor pada empat triwulan di tahun 2015 menunjukkan pola yang sama dengan indeks penjualan. Produktivitas meningkat pada triwulan I, III, dan IV, dan menurun pada triwulan II. Kenaikan produktivitas tertinggi terjadi pada triwulan III yakni sebesar 17,84 persen.

3.1.2.4 Perdagangan Besar Selain Mobil dan Sepeda Motor

Dari data hasil pengolahan diperoleh informasi kegiatan perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor mengalami penurunan penjualan pada dua triwulan pertama. Penjualan menurun sebesar 9,19 persen pada triwulan I dan 12,66 persen pada triwulan II. Kemudian peningkatan penjualan yang cukup signifikan pada triwulan III, yakni sebesar 13,16 persen hal ini terjadi kemungkinan karena dipicu adanya moment Idul Fitri, pembagian gaji 13, dan tahun ajaran baru sekolah. Demikian pula indeks penjualan atas dasar harga konstan meningkat sebesar 77,97 persen.

Dari data pembelian terlihat indeks atas dasar harga berlaku maupun harga konstan kegiatan perdagangan ini meningkat pada triwulan I sebesar 16,54 persen dan 20,84 persen, sedangkan pada dua triwulan berikutnya polanya sama dengan penjualan.

Pada triwulan akhir, indeks penjualan atas dasar harga berlaku meningkat sebesar 3,35 persen, demikian pula pada indeks pembelian meningkat sebesar 3,08 persen. Peningkatan tersebut diduga sebagai imbas dari maraknya diskon-diskon akhir tahun, moment Natal, dan juga menghadapi tahun baru 2016. Namun bila diperhatikan pada triwulan IV 2015, terdapat perbedaan arah antara indeks atas dasar harga berlaku dan indeks atas dasar harga konstan baik pada penjualan maupun pembelian. Hal ini mengindikasikan bahwa pada triwulan IV

terjadi kenaikan harga penjualan dan pembelian (inflasi) pada kegiatan perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor, yang juga didukung data inflasi yang tinggi pada bulan Desember 2015 yakni sebesar 0,96 persen.

Fluktuasi penjualan yang meningkat pada triwulan III dan IV tidak dibarengi oleh peningkatan jumlah pekerja. Peningkatan jumlah pekerja hanya terjadi pada triwulan I dengan peningkatan sebesar 7,28 persen. Sedangkan pada tiga triwulan berikutnya jumlah pekerja terus mengalami penurunan.

Tabel 3.1.2.4.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Besar Selain Mobil dan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	90,81	87,34	113,16	103,35
- Atas Dasar Harga Konstan	95,05	89,90	115,29	97,66
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	116,54	87,73	107,59	103,08
- Atas Dasar Harga Konstan	120,84	89,33	107,03	97,78
3. Pekerja	107,28	94,77	98,65	98,60
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	84,64	92,17	114,71	104,81

Dari tabel diatas diperoleh pula informasi mengenai perkembangan produktivitas perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor tahun 2015. Data hasil pengolahan menginformasikan bahwa secara umum produktivitas mengikuti fluktuasi nilai penjualan. Pada triwulan I produktivitas perdagangan mengalami penurunan sebesar 15,36 persen, kemudian kembali menurun sebesar 7,83 persen di triwulan II. Pada triwulan III dan triwulan IV produktivitas meningkat masing-masing sebesar 83,97 persen dan 4,81 persen.

3.1.2.5 Perdagangan Eceran Selain Mobil dan Sepeda Motor

Melemahnya kondisi ekonomi Indonesia tahun 2015 juga menurunkan daya beli masyarakat terhadap perdagangan eceran komoditas selain mobil dan motor. Berdasarkan data indeks penjualan atas dasar harga berlaku, nilai penjualan kegiatan perdagangan ini mengalami penurunan pada triwulan I sebesar 0,93 persen, juga nilai pembeliannya turun 0,87 persen dengan besaran riil 6,17 persen. Pada triwulan II nilai penjualan dan nilai pembelian meningkat,

peningkatan tersebut adalah sebagai pengaruh dari kenaikan harga. Pada triwulan III, perdagangan eceran ini mengalami peningkatan tertinggi baik nilai penjualan maupun nilai pembeliannya. Hal ini terjadi karena pada triwulan III bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, Idul Fitri, serta moment-moment lain yang memicu pertumbuhan penjualan serta pembelian seperti pembagian gaji 13 untuk Pegawai Negeri Sipil dan tahun ajaran baru sekolah. Pada triwulan akhir, indeks penjualan dan pembelian kembali menurun dari triwulan III.

Tabel 3.1.2.5.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Eceran Selain Mobil dan Sepeda Motor
Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	99,07	106,03	113,26	97,06
- Atas Dasar Harga Konstan	97,27	96,01	113,87	96,79
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	97,13	101,84	104,51	98,01
- Atas Dasar Harga Konstan	93,83	91,89	104,28	97,90
3. Pekerja	97,47	101,83	101,33	97,47
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	101,65	104,12	111,77	99,58

Secara triwulanan, jumlah pekerja kegiatan perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor pada tahun 2015 menurun pada triwulan I, meningkat pada triwulan II dan III, kemudian menurun kembali pada triwulan IV. Pertumbuhan jumlah tenaga kerja pada triwulan II dan III diduga untuk menyeimbangi tingginya daya beli masyarakat dalam rangka persiapan moment Ramadhan dan Idul Fitri. Pada triwulan IV jumlah pekerja kembali menurun dengan besarnya penurunan sebesar 2,53 persen.

Produktivitas kegiatan perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor tahun 2015 secara umum menunjukkan pola yang terus meningkat pada triwulan I, II, dan III, dan menurun pada triwulan IV. Peningkatan produktivitas tertinggi terjadi pada triwulan III yakni sebesar 11,77 persen. Sedangkan pada triwulan IV produktivitas perdagangan menurun sebesar 0,42 persen.

Dibawah ini Analisis secara rinci perdagangan eceran selain mobil dan motor berdasarkan jenis atau sistem perdagangan, yakni swalayan, department store, dan perdagangan eceran lainnya.

3.1.2.6 Swalayan

Aktivitas perdagangan swalayan yang menjual kebutuhan pokok masyarakat tidak terpengaruh oleh lesunya ekonomi Indonesia di tahun 2015. Kegiatan perdagangan Swalayan mengalami penjualan yang terus meningkat pada triwulan I, II, dan III. Peningkatan tertinggi terjadi pada triwulan III dengan peningkatan indeks melebihi 10 persen. Hal ini ditengarai karena triwulan III bertepatan dengan Idul Fitri dan dibayarkannya Gaji ke 13 bagi Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Pada triwulan IV, penjualan Swalayan kembali menurun dengan besarnya penurunan kurang dari 5 persen untuk indeks penjualan atas dasar harga berlaku dan kurang dari 10 persen untuk indeks penjualan atas dasar harga konstan. Searah dengan penjualannya, Swalayan mengalami peningkatan pembelian pada triwulan I, II, dan III dan mengalami penurunan pada triwulan IV. Besarnya nilai penurunan pembelian pada triwulan IV adalah kurang dari 5 persen.

Tabel 3.1.2.6.1
Indeks Kegiatan Swalayan
Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	101,69	109,45	111,50	95,67
- Atas Dasar Harga Konstan	101,33	108,07	111,39	93,93
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	100,38	109,36	113,88	98,22
- Atas Dasar Harga Konstan	100,10	108,15	113,87	96,49
3. Pekerja	96,52	100,46	100,47	95,97
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	105,35	108,94	110,98	99,69

Meskipun lemahnya pertumbuhan ekonomi tidak berdampak langsung pada nilai penjualan dan nilai pembelian swalayan, tetapi dampaknya Nampak terjadi pada tenaga kerja. Jumlah pekerja kegiatan perdagangan swalayan pada tahun 2015 menurun pada triwulan I dengan penurunan kurang dari 5 persen dibandingkan dengan triwulan IV 2014. Jumlah pekerja kemudian meningkat pada triwulan II dan III, kemudian menurun kembali pada triwulan IV.

Produktivitas perdagangan swalayan tahun 2015 searah dengan pola pertumbuhan penjualan dan pembelianya. Produktivitas terus meningkat pada triwulan I, II, dan III, kemudian menurun pada triwulan IV dengan besarnya penurunan kurang dari satu persen.

3.1.2.7 *Department Store*

Sama halnya dengan swalayan, lemahnya ekonomi Indonesia yang terjadi selama tahun 2015 tidak berpengaruh pada aktivitas perdagangan *Department Store*. Kegiatan perdagangan ini mengalami penjualan yang terus meningkat pada triwulan I, II, dan III. Peningkatan tertinggi terjadi pada triwulan III dengan peningkatan indeks melebihi 15 persen dipicu oleh adanya moment Idul Fitri dan pembayaran gaji ke13. Selain itu moment tahun ajaran baru sekolah juga diduga berpengaruh kuat terhadap peningkatan nilai penjualan. Pada triwulan IV, penjualan *Department Store* mengalami penurunan kembali dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan besarnya penurunan kurang dari 5 persen.

Selaras dengan penjualannya, *Department Store* mengalami peningkatan pembelian pada triwulan I, II, dan III dan mengalami penurunan pada triwulan IV. Besarnya nilai penurunan pembelian pada triwulan IV adalah kurang dari 2 persen.

Lesunya ekonomi 2015 diduga berpengaruh pada jumlah karyawan aktivitas perdagangan ini. Jumlah pekerja *Department Store* menunjukkan tren yang relatif menurun. Peningkatan jumlah pekerja hanya terjadi pada triwulan II yakni sebesar 5,71 persen, kemungkinan peningkatan pekerja tersebut untuk persiapan aktivitas penjualan pada Triwulan III. Pada triwulan berikutnya, jumlah pekerja mengalami penurunan kembali tercermin dari nilai indeks yang kurang dari 100 persen.

Produktivitas kegiatan *Department Store* tahun 2015 secara umum menunjukan pola yg berfluktuasi. Pada triwulan I, II, dan III produktivitas terus meningkat dengan peningkatan tertinggi terjadi pada triwulan III yakni sebesar 20,94 persen. Selanjutnya produktivitas perdagangan menurun 1,83 persen pada triwulan IV seperti yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.2.7.1
Indeks Kegiatan *Department Store*
Triwulanan di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	102,66	108,22	119,83	96,33
- Atas Dasar Harga Konstan	102,67	106,34	118,11	95,80
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	104,58	107,68	111,90	98,84
- Atas Dasar Harga Konstan	104,61	105,96	110,29	98,49
3. Pekerja	95,53	105,71	99,08	98,12
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	107,47	102,37	120,94	98,17

3.1.2.8 Perdagangan Eceran Lainnya

Pada triwulan awal 2015, daya beli masyarakat terhadap perdagangan eceran lainnya (perdagangan eceran selain swalayan dan department store) mengalami penurunan, Hal ini terlihat pada table 3.1.4.3 nilai indeks penjualan atas dasar harga berlaku kegiatan perdagangan ini mengalami penurunan pada triwulan I sebesar kurang dari 10 persen dengan penurunan riil sekitar 17 persen. Pada triwulan ini perusahaan menurunkan nilai pembeliannya sekitar 11 persen dengan besaran riil sekitar 17 persen. Pada triwulan II nilai penjualan dan nilai pembelian meningkat tetapi tidak secara riil. Besar peningkatan nilai penjualan dan nilai pembelian berturut-turut adalah sebesar 5,87 persen dan 1,49 persen. Peningkatan penjualan dan pembelian tersebut adalah sebagai pengaruh kenaikan harga, diindikasikan dengan adanya perbedaan arah kenaikan indeks atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Pada triwulan III, perdagangan eceran selain swalayan dan department store mengalami peningkatan penjualan tertinggi yakni sebesar 12,33 persen dengan besaran riil 13,98 persen, meskipun nilai pembelian perusahaan menurun, hal ini sebagai imbas dari meningkatnya daya beli masyarakat karena bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, Idul Fitri, serta *moment-moment* lain yang memicu pertumbuhan penjualan seperti pembagian gaji 13 untuk Pegawai Negeri Sipil dan tahun ajaran baru. Kemudian pada triwulan akhir 2015, indeks penjualan dan pembelian kembali menurun dari triwulan III.

Jumlah pekerja pada sektor perdagangan ini menunjukkan tren meningkat pada triwulan I sampai dengan triwulan III, dengan peningkatan jumlah pekerja tertinggi sebesar 3,86 persen yang terjadi pada triwulan III . Adapun pada triwulan IV, jumlah pekerja menurun sebesar 1,85 persen.

Tabel 3.1.2.8.1
Indeks Kegiatan Perdagangan Eceran Lainnya
Triwulanan di Indonesia, 2015

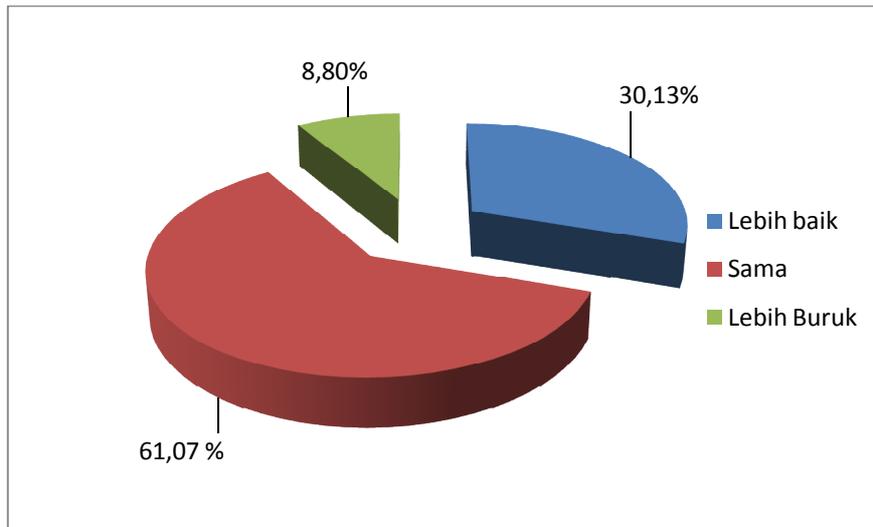
Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penjualan				
- Atas Dasar Harga Berlaku	90,10	105,87	112,33	97,67
- Atas Dasar Harga Konstan	83,77	95,41	113,98	97,89
2. Pembelian				
- Atas Dasar Harga Berlaku	89,79	101,49	97,83	97,70
- Atas Dasar Harga Konstan	83,19	91,10	97,86	98,06
3. Pekerja	100,11	100,26	103,86	98,15
4. Produktivitas (berdasarkan omzet)	89,99	105,60	108,16	99,51

Selanjutnya, dari Tabel 3.1.2.8.1 dapat dilihat pula informasi mengenai perkembangan produktivitas perdagangan eceran lainnya. Oleh karena didasarkan pada omzet, pola perkembangan produktivitas perdagangan mirip dengan pola perkembangan nilai penjualan. Produktivitas perdagangan tahun 2015 secara umum menunjukkan nilai yang fluktuatif. Pada triwulan I produktivitas perdagangan mengalami penurunan sebesar 10,01 persen, kemudian mengalami peningkatan sebesar 5,60 persen di triwulan II dan 8,16 persen di triwulan III. Pada akhir triwulan 2015 produktivitas mengalami penurunan sebesar 0,49 persen.

3.1.2.9 Prospek Usaha

Berdasarkan hasil survei pada triwulan terakhir pengamatan, yakni triwulan IV 2015, diperoleh informasi bahwa mayoritas pelaku usaha, yakni sebanyak 61,07 persen, menyatakan bahwa prospek usaha mereka pada awal tahun 2016 akan tetap sama, tidak mengalami perubahan. Hanya 30,13 persen pelaku usaha yang menganggap bahwa prospek perdagangan akan menjadi lebih baik. Bahkan sebanyak 8,80 persen responden merasa pesimis dan menyatakan bahwa prospek usaha di triwulan pertama tahun 2016 akan menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan keadaan pada triwulan terakhir tahun 2015.

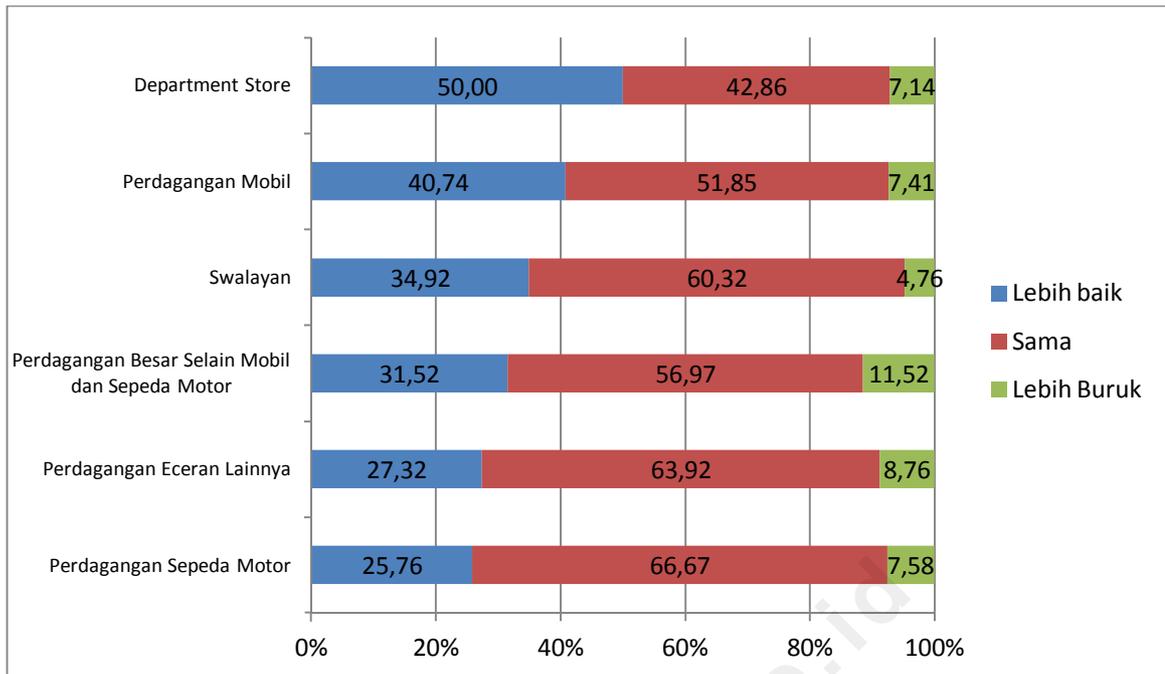
Tingkat optimisme terhadap prospek kegiatan usaha perdagangan pada triwulan berikutnya yakni triwulan I 2016, disajikan pada Grafik 3.1.2.9.1.



Grafik 3.1.2.9.1
Persentase Prospek Usaha Perdagangan pada Triwulan I
Tahun 2016 di Indonesia

Prospek usaha perdagangan pada triwulan I tahun 2015 dilihat dari jenis kegiatan perdagangan ditunjukkan pada grafik 3.1.2.9.1. Responden pelaku kegiatan *Department Store* merupakan responden dengan persentase tertinggi yang optimis bahwa usaha perdagangan pada triwulan mendatang akan menjadi lebih baik, yakni sebesar 50,00 persen. Tingkat keoptimisan tertinggi kedua terjadi pada usaha perdagangan mobil yaitu sebesar 40,74 persen disusul usaha swalayan 34,92 persen, perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor 31,52 persen, perdagangan eceran lainnya 27,32 persen, dan yang terakhir perdagangan sepeda motor sebesar 25,76 persen.

Persentase responden tertinggi yang berkeyakinan bahwa prospek usaha perdagangan pada triwulan mendatang akan sama saja dengan triwulan sebelumnya terjadi pada kegiatan perdagangan sepeda motor dengan persentase sebesar 66,67 persen, sedangkan persentase terendah terjadi pada pengusaha *Department Store* dengan persentase sebesar 42,86 persen.

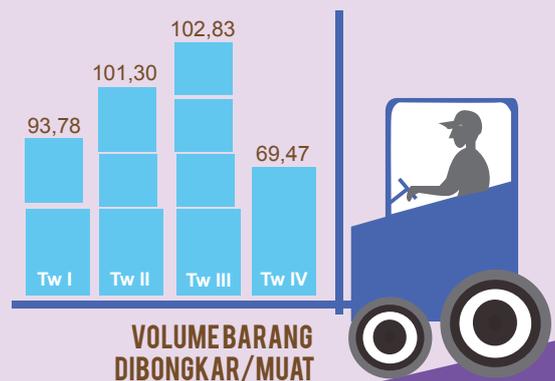
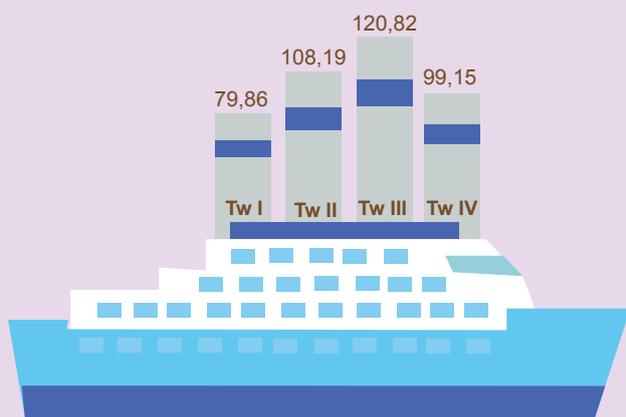
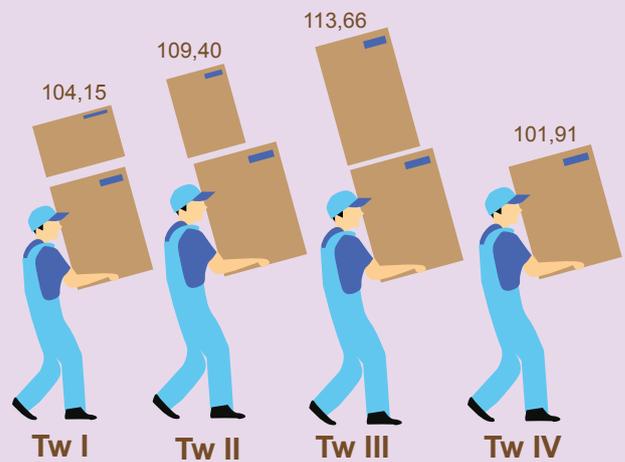
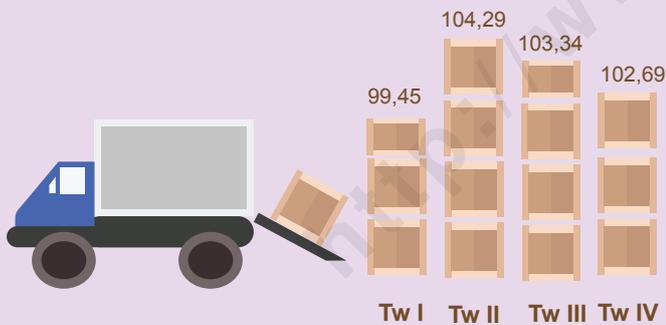
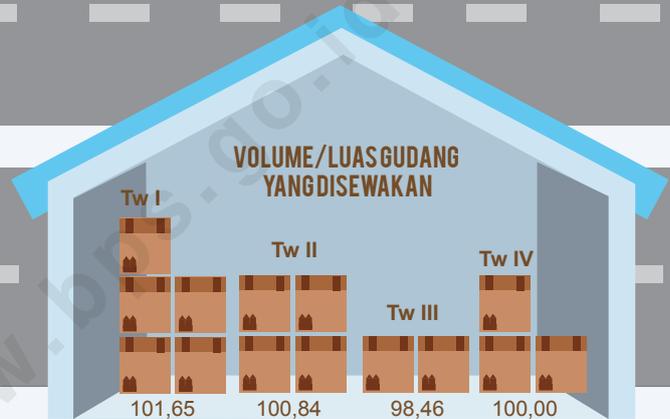
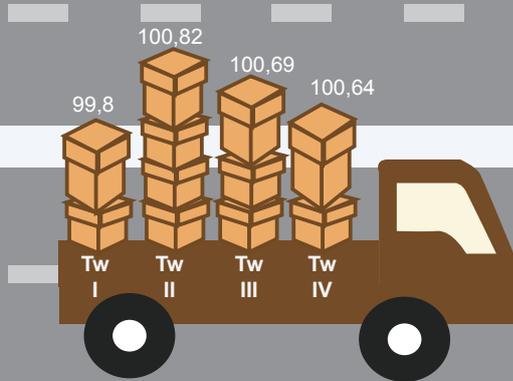


Grafik 3.1.2.9.2
Persentase Prospek Usaha Perdagangan pada Triwulan I 2016
Menurut Jenis Kegiatan di Indonesia

Persentase responden tertinggi yang berkeyakinan bahwa prospek usaha perdagangan mereka pada triwulan mendatang akan lebih buruk dari triwulan sebelumnya terjadi pada perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor yaitu sebesar 11,52 persen, sedangkan persentase terendah terjadi pada usaha swalayan yakni sebesar 4,76 persen.

TRANSPORTASI

INDEKS PRODUKSI TRIWULAN I-IV TAHUN 2015



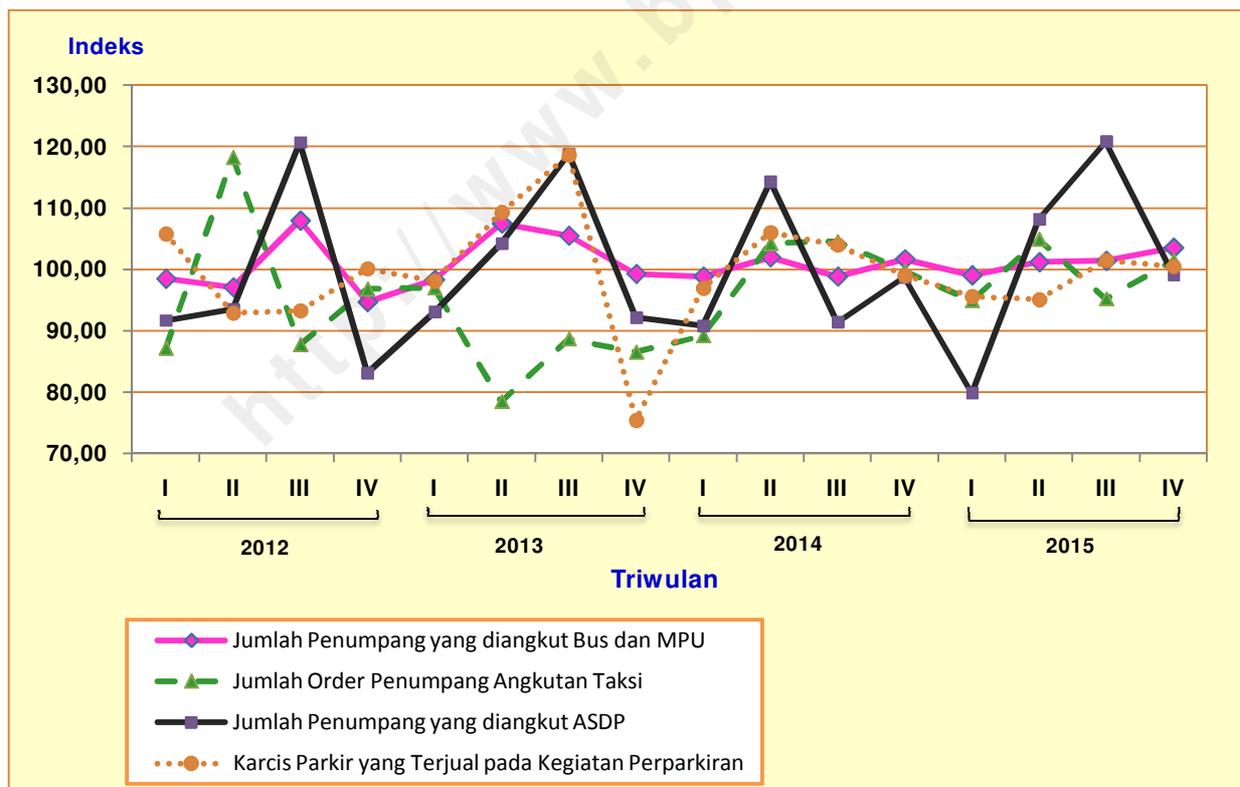
<http://www.bps.go.id>

3.2 TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) sektor transportasi dan pergudangan merupakan salah satu survei yang dirancang untuk memantau perkembangan perusahaan/usaha transportasi dan pergudangan setiap tiga bulan. Jenis kegiatan usaha yang disurvei pada STKU Transportasi dan Pergudangan tahun 2015 (STKU-H 2015) meliputi delapan kegiatan utama, yaitu: angkutan penumpang jalan raya, angkutan barang jalan raya, angkutan sungai, danau, dan penyeberangan [non PT. ASDP (Persero)], pergudangan/*cold storage*, perpustakaan, bongkar muat, ekspedisi, dan kurir.

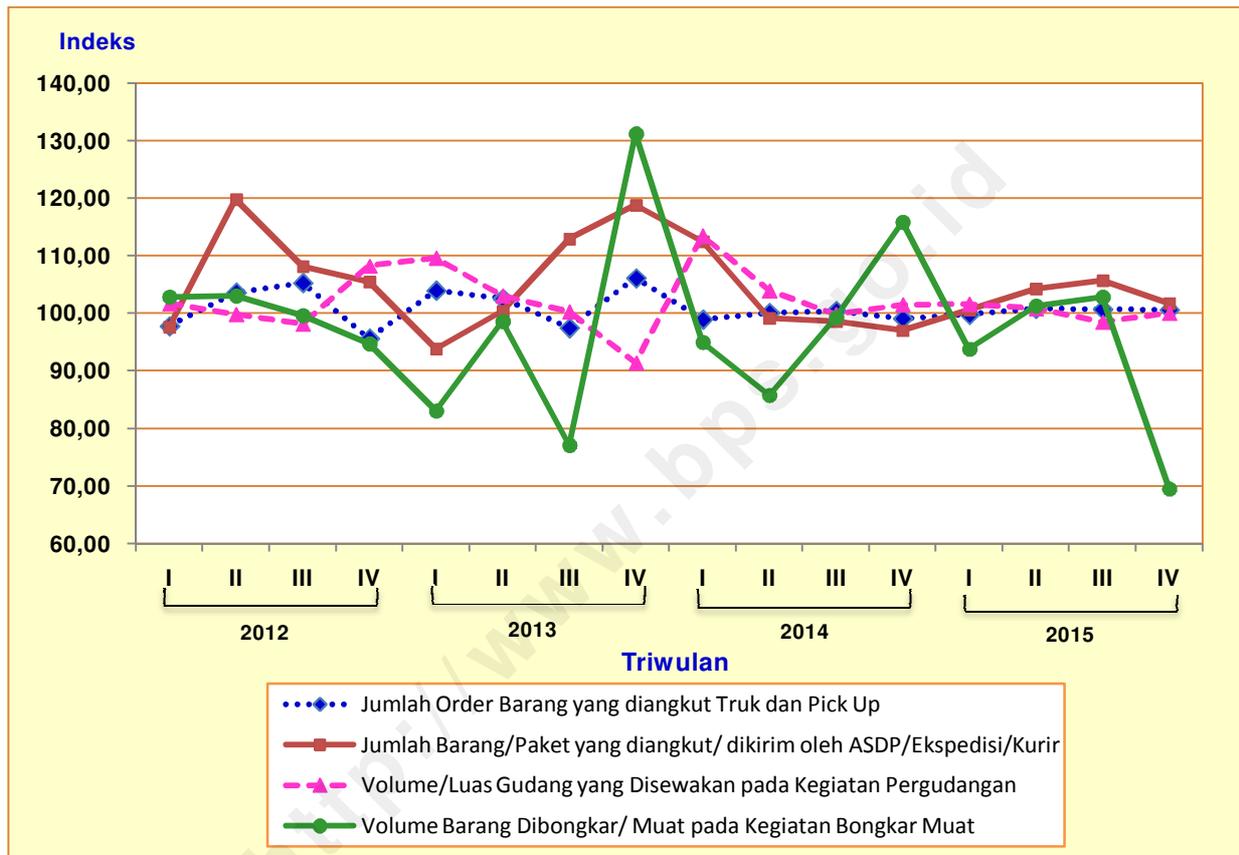
3.2.1 Perkembangan Kegiatan Usaha Transportasi Tahun 2012-2015

Selama tahun 2012-2015 perkembangan jumlah penumpang yang diangkut bus & mobil penumpang umum (MPU) mengalami peningkatan tertinggi pada triwulan III 2012 dengan indeks 107,94 (naik 7,94 persen). Pada angkutan taksi kenaikan tertingginya pada triwulan II 2012 dengan indeks 118,25 (naik 18,25 persen). Pada angkutan ASDP indeks tertingginya triwulan III 2015 dengan indeks 120,82. Sementara pada kegiatan perpustakaan, karcis parkir yang terjual mengalami peningkatan tertinggi pada triwulan III 2013 dengan indeks 118,91.



Grafik3.2.1.1. Perkembangan Jumlah Penumpang yang Diangkut dan Karcis Parkir yang Terjual, Tahun 2012 – 2015

Selama tahun 2012-2015 perkembangan jumlah barang yang diangkut truk dan pick up mengalami peningkatan tertinggi pada triwulan III 2012 dengan indeks 105,29 (naik 5,29 persen). Pada kegiatan ASDP/Ekspedisi/Kurir jumlah barang yang diangkut/dikirim tertinggi pada triwulan II 2012 dengan indeks 119,83 (naik 19,83 persen). Sementara itu pada kegiatan pergudangan, volume/luas gudang yang disewakan mengalami peningkatan tertinggi pada triwulan I 2014 dengan indeks 113,49. Pada kegiatan bongkar muat, volume barang yang dibongkar/muat tertinggi pada triwulan IV 2013 dengan indeks 131,23 (naik 31,23 persen).



Grafik. Perkembangan Jumlah Barang yang Diangkut/ Dikirim/ Dibongkar/ Dimuat, dan Volume/ Luas Gudang yang Disewakan, Tahun 2012 - 2015

3.2.2 Kondisi Kegiatan Usaha Transportasi Tahun 2015

Secara umum pendapatan delapan kegiatan usaha sektor transportasi dan pergudangan pada tahun 2015 menunjukkan tren yang bervariasi setiap triwulannya. Pada triwulan I kegiatan usaha angkutan penumpang jalan raya, ASDP-Non PT, ASDP (Persero), perparkiran, dan kurir masing-masing mengalami penurunan pendapatan sebesar 10,22 persen; 20,32 persen; 2,10 persen dan 1,62 persen terhadap triwulan sebelumnya.

Tabel 3.2.2.a
Indeks Pendapatan Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia 2015

Kegiatan Utama	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkutan Penumpang Jalan Raya	89,78	96,29	103,12	92,10
Angkutan Barang Jalan Raya	101,69	98,74	100,64	97,26
ASDP [Non PT ASDP (Persero)]	79,68	104,69	107,36	93,73
Pergudangan/ <i>Cold Storage</i>	101,18	103,12	102,14	102,23
Perparkiran	97,90	105,51	109,03	100,35
Bongkar Muat	118,52	110,94	99,24	95,52
Ekspedisi	104,15	85,36	95,11	102,41
Kurir	98,38	107,25	105,74	85,20
Transportasi dan Pergudangan	100,93	100,73	101,46	95,46

Pada Triwulan II-2015 sebagian besar kegiatan usaha sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan peningkatan pendapatan, yakni ASDP-Non PT. ASDP (Persero), pergudangan, perparkiran, bongkar muat, dan kurir masing-masing sebesar 4,69 persen; 3,12 persen; 5,51 persen; 10,94 persen dan 7,25 persen. Pada Triwulan III-2015, hampir semua kegiatan usaha mengalami peningkatan pendapatan terhadap triwulan sebelumnya kecuali pada bongkar muat dan ekspedisi dengan penurunan masing-masing sebesar 0,76 persen dan 4,89 persen. Kebalikan dengan triwulan III, pada Triwulan IV-2015 hampir semua kegiatan usaha sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan tren yang menurun, kecuali kegiatan usaha pergudangan, perparkiran, dan ekspedisi yang mengalami peningkatan pendapatan terhadap triwulan sebelumnya.

Demikian halnya dengan produktivitas pekerja atau pendapatan per pekerja. Dari keseluruhan kegiatan usaha transportasi dan pergudangan menunjukkan tren yang meningkat dari triwulan I, II, dan III masing-masing sebesar 0,14 persen, 0,24 persen, dan 2,69 persen. Kemudian terjadi penurunan pada triwulan IV sebesar 4,40 persen terhadap triwulan sebelumnya.

Dilihat dari masing-masing kegiatan usahanya, pola peningkatan dan penurunan dari produktivitas pekerja di masing-masing triwulan hampir sama dengan peningkatan dan penurunan dari pendapatannya. Contohnya pada Triwulan IV-2015, hampir semua kegiatan usaha sektor transportasi dan pergudangan menunjukkan tren yang menurun, kecuali kegiatan usaha

pergudangan, perparkiran, dan ekspedisi yang mengalami peningkatan pendapatan terhadap triwulan sebelumnya.

Tabel 3.2.2.b
Indeks Produktivitas Pekerja Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2015

Kegiatan Utama	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkutan Penumpang Jalan Raya	89,25	96,11	105,74	92,79
Angkutan Barang Jalan Raya	103,00	98,89	101,69	97,23
ASDP [Non PT ASDP (Persero)]	83,33	104,91	105,06	94,54
Pergudangan/ <i>Cold Storage</i>	97,99	106,83	100,17	100,97
Perparkiran	95,46	105,91	109,92	102,48
Bongkar Muat	114,57	113,24	99,71	91,19
Ekspedisi	106,28	84,74	95,93	103,36
Kurir	96,33	104,31	104,26	83,56
Transportasi dan Pergudangan	100,14	100,24	102,69	95,60

3.2.1 Angkutan Penumpang

Berdasarkan hasil STKU-H 2015, jumlah pekerja pada angkutan penumpang jalan raya menunjukkan indeks yang cukup stabil. Peningkatan jumlah pekerja terjadi pada triwulan I dan II dengan angka indeks sebesar 100,60 dan 100,18. Sebaliknya penurunan jumlah pekerja terjadi pada triwulan III dan IV dengan angka indeks sebesar 97,53 dan 99,25. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan I sebesar 0,60 persen, sebaliknya pada triwulan III terjadi penurunan tertinggi sebesar 2,47 persen.

Balas jasa pekerja kegiatan angkutan penumpang jalan raya mengalami peningkatan setiap triwulan, kecuali pada triwulan IV. Besarnya angka indeks masing-masing triwulan yaitu 107,92 ; 101,29 ; 104,08 dan 98,33. Kenaikan balas jasa tertinggi terjadi pada triwulan I sebesar 7,92 persen. Sementara itu, penurunan hanya terjadi pada triwulan IV yaitu sebesar 1,67 persen.

Berbeda dengan balas jasa pekerja, pendapatan usaha pada kegiatan angkutan penumpang jalan raya mengalami penurunan setiap triwulannya, kecuali pada triwulan III yang naik dengan indeks sebesar 103,12. Penurunan paling besar terjadi pada triwulan I sebesar 10,22 persen.

Produktivitas pekerja merupakan perbandingan antara nilai pendapatan dengan jumlah tenaga kerja, atau besarnya pendapatan yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja. Produktivitas pekerja pada kegiatan angkutan penumpang

jalan raya selama tahun 2015 menunjukkan pola yang sama dengan pendapatan. Kenaikan produktivitas pekerja hanya terjadi pada triwulan III dengan indeks sebesar 105,74. Sementara itu, penurunan pada triwulan I, II, dan IV masing-masing sebesar 10,75 persen; 3,89 persen; dan 7,21 persen.

Tabel 3.2.2.1
Indeks Kegiatan Angkutan Penumpang Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2015

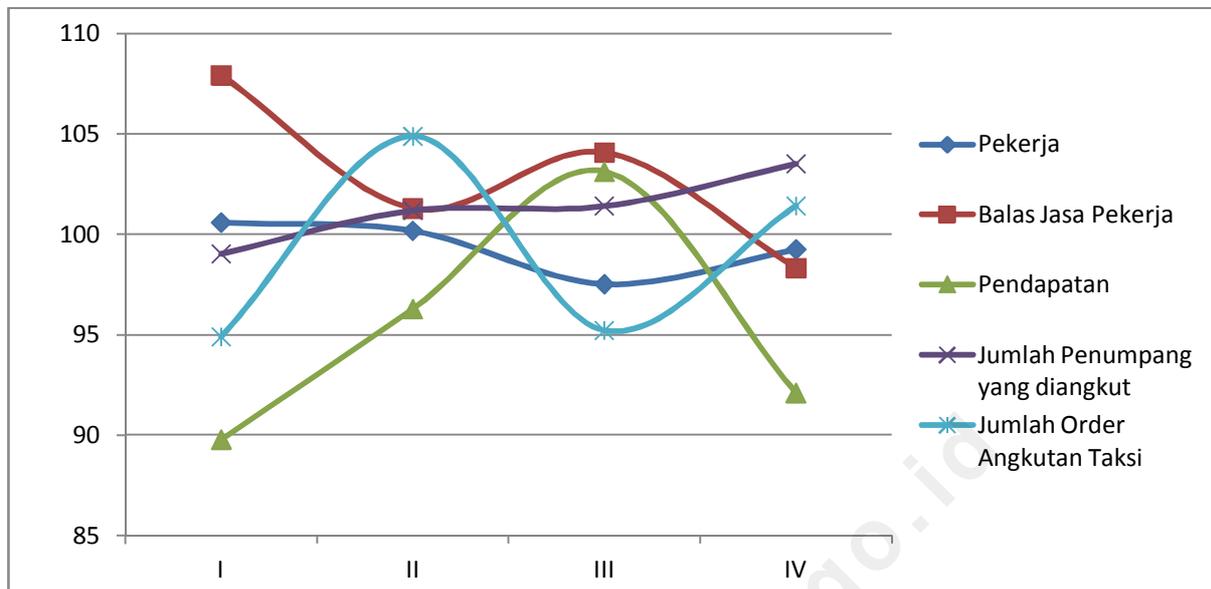
Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	100,60	100,18	97,53	99,25
2. Balas Jasa Pekerja	107,92	101,29	104,08	98,33
3. Pendapatan	89,78	96,29	103,12	92,10
4. Produktivitas Pekerja	89,25	96,11	105,74	92,79
5. Jumlah Penumpang yang diangkut:	99,04	101,19	101,41	103,52
a. Bus	99,68	101,18	101,34	103,67
b. Mobil Penumpang Umum	94,66	101,33	102,11	100,98
6. Jumlah Order Angkutan Taksi	94,90	104,89	95,21	101,42

Jumlah penumpang yang diangkut bus dan mobil penumpang umum secara keseluruhan mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah penumpang terjadi pada triwulan II hingga triwulan IV masing-masing sebesar 1,19 persen, 1,41 persen, dan 3,52 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Sebaliknya, penurunan jumlah penumpang terjadi pada triwulan I sebesar 0,96 persen.

Dirinci menurut jenis moda, jumlah penumpang angkutan bus dan mobil penumpang umum memperlihatkan tren yang sama. Peningkatan jumlah penumpang terjadi pada triwulan II hingga triwulan IV. Penurunan jumlah penumpang hanya terjadi pada triwulan I.

Pada tabel 3.2.2.1 menunjukkan pertumbuhan balas jasa pekerja tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja pada setiap triwulannya. Demikian juga antara pertumbuhan pendapatan yang tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah penumpang.

Grafik 3.2.2.1
Indeks Kegiatan Angkutan Penumpang Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2015



3.2.2 Angkutan Barang Jalan Raya

Pada tabel 3.2.2.2 menunjukkan bahwa jumlah pekerja kegiatan angkutan barang jalan raya cenderung menurun setiap triwulannya, kecuali pada triwulan IV naik dengan angka indeks sebesar 100,03. Angka indeks kegiatan angkutan barang jalan raya pada triwulan I sampai dengan triwulan III masing-masing sebesar 98,73; 99,84; dan 98,96.

Balas jasa pekerja pada kegiatan angkutan barang jalan raya juga memiliki tren yang cenderung menurun setiap triwulannya, kecuali triwulan II. Peningkatan balas jasa pekerja hanya terjadi pada triwulan II dengan angka indeks sebesar 100,01. Sementara itu, penurunan terjadi pada triwulan I, III, dan IV dengan indeks masing-masing sebesar 99,63; 99,33; dan 97,43.

Pendapatan usaha pada kegiatan angkutan barang jalan raya mengalami fluktuasi setiap triwulannya. Pada triwulan I dan III pendapatan usaha mengalami peningkatan dengan angka indeks sebesar 101,69 dan 100,64. Sebaliknya, pendapatan usaha pada kegiatan angkutan barang jalan raya pada triwulan II dan IV mengalami penurunan dengan angka indeks masing-masing 98,74 dan 97,26.

Angka indeks produktivitas pekerja pada kegiatan angkutan barang jalan raya menunjukkan pola yang sama dengan pendapatan usaha. Kenaikan produktivitas pekerja terjadi pada triwulan I dan III dengan angka indeks masing-masing 103,00 dan 101,69. Sementara itu, penurunan terjadi pada triwulan II dan IV dengan angka indeks sebesar 98,89 dan 97,23.

Indikator produksi kegiatan angkutan barang jalan raya adalah jumlah order barang yang diangkut. Jika dilihat secara keseluruhan, order barang yang diangkut mengalami peningkatan setiap triwulan, kecuali pada triwulan I. Pada triwulan I jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan 0,20 persen. Peningkatan terjadi pada triwulan II hingga triwulan IV dengan angka indeks masing-masing 100,82; 100,69; dan 100,64.

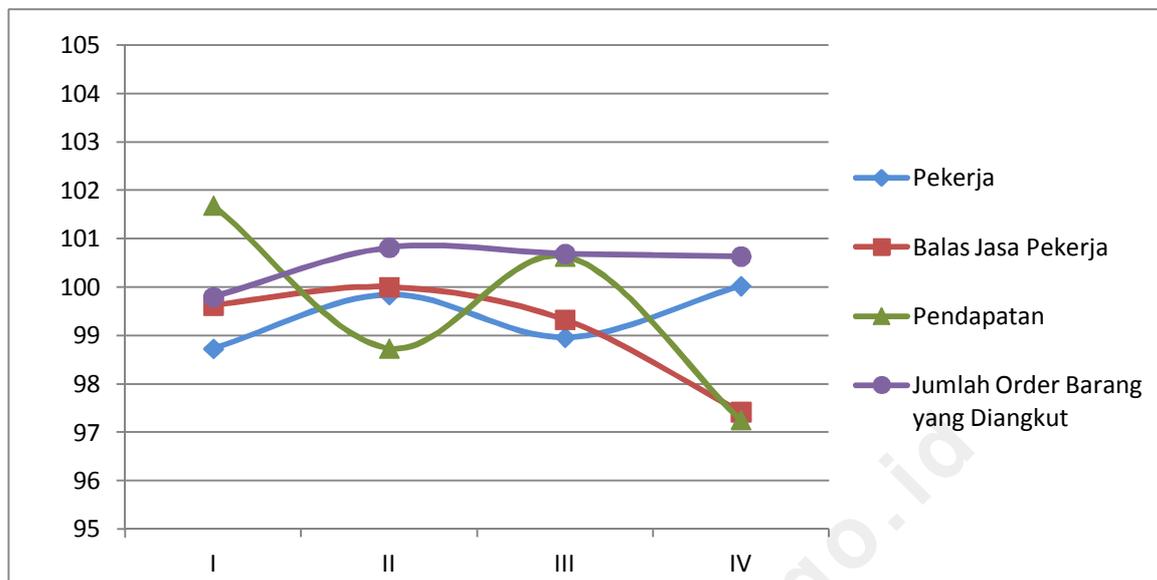
Tabel 3.2.2.2
Indeks Kegiatan Angkutan Barang Jalan Raya Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia 2015

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	98,73	99,84	98,96	100,03
2. Balas Jasa Pekerja	99,63	100,01	99,33	97,43
3. Pendapatan	101,69	98,74	100,64	97,26
4. Produktivitas Pekerja	103,00	98,89	101,69	97,23
5. Jumlah Order Barang yang Diangkut:	99,80	100,82	100,69	100,64
a. Truk	99,52	100,55	100,44	100,65
b. Pick Up	111,04	110,02	108,86	100,43

Dirinci menurut jenis moda, peningkatan jumlah order barang yang diangkut terjadi pada moda truk pada setiap triwulan kecuali triwulan I yang turun sebesar 0,48 persen. Peningkatan terjadi pada triwulan II, III, dan IV masing-masing 0,55 persen, 0,44 persen, dan 0,65 persen. Hampir sama dengan moda truk, pada moda pick up menunjukkan pola meningkat setiap triwulannya. Angka indeks untuk masing-masing triwulan sebesar 111,04; 110,02; 108,86; dan 100,43. Peningkatan terbesar terjadi pada triwulan I sebesar 11,04 persen.

Pada tabel 3.2.2.2 dan grafik 3.2.2.2 diperlihatkan pertumbuhan balas jasa pekerja tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja. Demikian juga antara pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan jumlah order barang yang diangkut tidak menunjukkan pola yang sama.

Grafik 3.2.2.2
Indeks Kegiatan Angkutan Barang Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia 2015



3.2.3 Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan [ASDP Non PT. ASDP (Persero)]

Pada kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero), jumlah pekerja memperlihatkan tren yang menurun pada triwulan I, II, dan IV, sedangkan pada triwulan III meningkat 2,19 persen. Jumlah pekerja pada triwulan I, II, dan IV terjadi penurunan dengan angka indeks masing-masing sebesar 95,62; 99,79 dan 99,14.

Balas jasa pekerja pada kegiatan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan non PT. ASDP (Persero) memperlihatkan pola yang berbeda dengan jumlah pekerja. Balas jasa pekerja pada triwulan I mengalami penurunan dengan angka indeks 77,12. Pada triwulan II hingga triwulan IV, balas jasa pekerja mengalami peningkatan dengan angka indeks masing-masing 128,49; 105,23; dan 117,67. Peningkatan terbesar terjadi pada triwulan II sebesar 28,49 persen.

Pendapatan usaha pada kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero) mengalami peningkatan pada triwulan II dan III. Indeks pendapatan usaha pada triwulan II dan triwulan III masing-masing sebesar 104,69 dan 107,36. Penurunan pendapatan usaha terjadi pada triwulan I dan IV sebesar 20,32 persen dan 6,27 persen.

Produktivitas pekerja pada kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero) menunjukkan pola yang sama dengan

pendapatan usaha. Pada triwulan I dan IV, produktivitas pekerja turun sebesar 16,67 persen dan 5,46 persen. Sementara itu, peningkatan produktivitas pekerja terjadi pada triwulan II dan III masing-masing sebesar 4,91 persen dan 5,06 persen.

Tabel 3.2.2.3.
Indeks Kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
[Non PT. ASDP (Persero)] Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia, 2015

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	95,62	99,79	102,19	99,14
2. Balas Jasa Pekerja	77,12	128,49	105,23	117,67
3. Pendapatan	79,68	104,69	107,36	93,73
4. Produktivitas Pekerja	83,33	104,91	105,06	94,54
5. Jumlah Penumpang Diangkut	79,86	108,19	120,82	99,15
6. Jumlah Barang Diangkut	98,31	99,15	100,05	100,65
7. Jumlah Kendaraan Diangkut	87,93	106,81	118,77	125,37

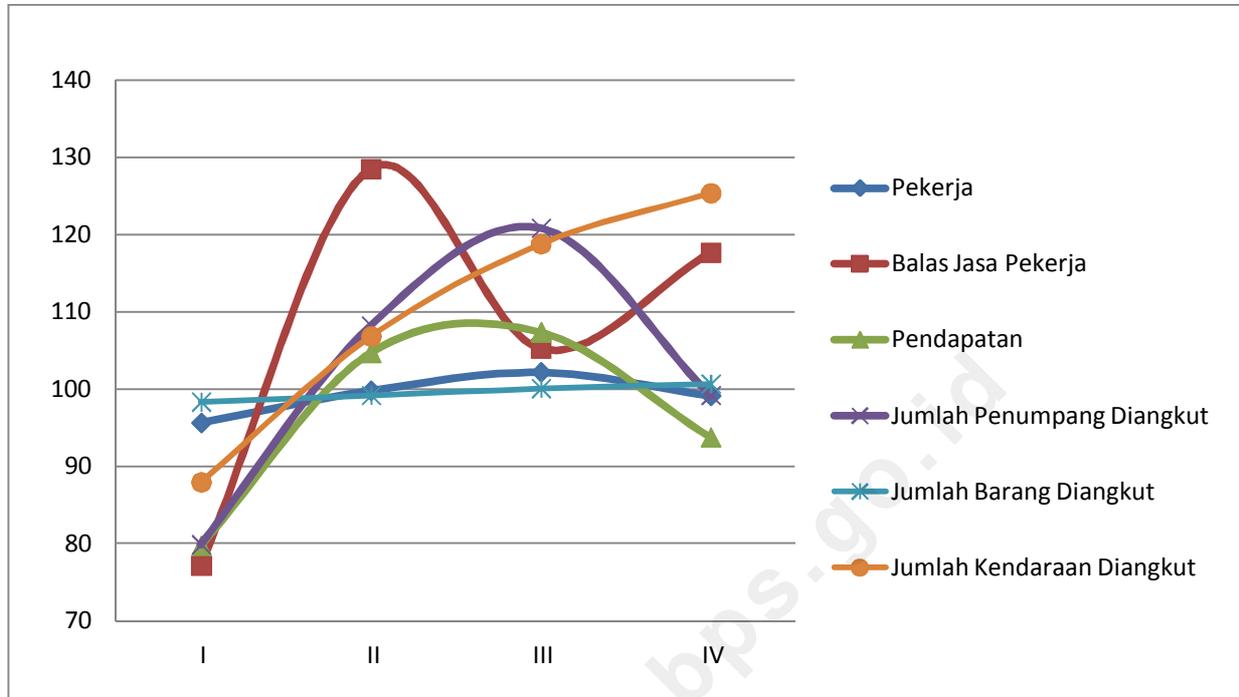
Indeks kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan non PT. ASDP (Persero) juga dirinci menurut jenis indikator produksi perusahaan/usaha yaitu banyaknya penumpang, barang, dan kendaraan diangkut. Jumlah penumpang yang diangkut mengalami peningkatan pada triwulan II dan III dengan angka indeks sebesar 108,19 dan 120,82. Sebaliknya, pada triwulan I dan IV mengalami penurunan dengan angka indeks sebesar 79,86 dan 99,15.

Berbeda dengan jumlah penumpang yang diangkut, untuk jumlah barang yang diangkut mengalami kenaikan pada triwulan III dan IV, dengan indeks sebesar 100,05 dan 100,65. Pada triwulan I dan II, jumlah barang yang diangkut mengalami penurunan, dengan indeks sebesar 98,31 dan 99,15.

Untuk jumlah kendaraan yang diangkut, kenaikan terjadi pada triwulan II hingga triwulan IV, dengan indeks masing-masing sebesar 106,81; 118,77 dan 125,37. Sebaliknya, penurunan jumlah kendaraan diangkut terjadi pada triwulan I dengan indeks sebesar 87,93.

Pada grafik 3.2.2.3 diperlihatkan pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, kecuali pada triwulan IV.

Grafik 3.2.2.3
Indeks Kegiatan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan
[Non PT. ASDP (Persero)] Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia, 2015



3.2.4 Pergudangan

Jumlah pekerja pada kegiatan pergudangan/*cold storage* selalu meningkat setiap triwulannya. Peningkatan jumlah pekerja yang terjadi pada triwulan I, II, III, dan IV masing-masing sebesar 4,68 persen, 6,89 persen, 1,16 persen, dan 2,05 persen.

Balas jasa pekerja pada kegiatan pergudangan/*cold storage* juga cenderung meningkat kecuali pada triwulan II turun dengan indeks sebesar 93,33. Peningkatan jumlah balas jasa pekerja terjadi pada triwulan I, III, dan IV dengan angka indeks masing-masing sebesar 115,7; 112,91; dan 112,68.

Berbeda dengan balas jasa pekerja, untuk pendapatan usaha pada kegiatan pergudangan/*cold storage* mengalami peningkatan pada triwulan I hingga triwulan IV, dengan indeks masing-masing sebesar 101,18; 103,12; 102,14 dan 100,97. Peningkatan terbesar terjadi pada triwulan II sebesar 3,12 persen.

Produktivitas pekerja pada kegiatan pergudangan/*cold storage* memiliki pola yang sama dengan pendapatan usaha kecuali pada triwulan I. Angka indeks produktivitas tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar 106,83 dan terendah terjadi pada triwulan I sebesar 97,99.

Peningkatan volume gudang tertutup/*cold storage* yang disewakan terjadi pada triwulan I dan II sebesar 2,10 persen dan 0,10 persen. Sedangkan pada triwulan III dan IV mengalami penurunan sebesar 2,87 persen dan 0,41 persen. Luas gudang terbuka yang disewakan mengalami peningkatan pada triwulan I, II, dan IV masing-masing naik sebesar 1,19 persen, 1,58 persen, dan 0,41 persen. Sebaliknya, pada triwulan III mengalami penurunan sebesar 0,21 persen.

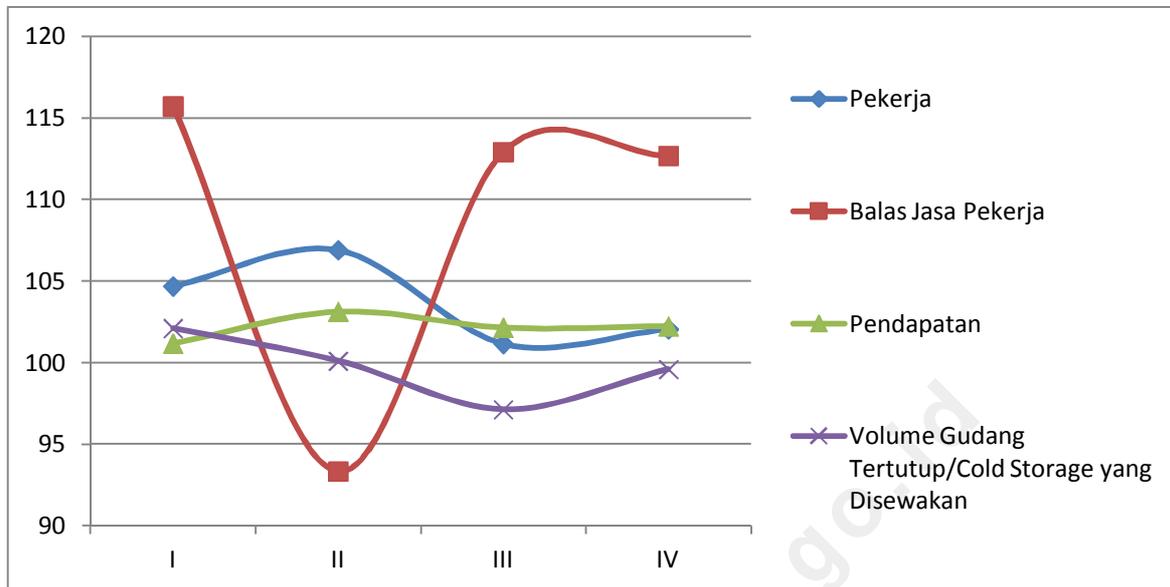
Tabel 3.2.2.4.
Indeks Kegiatan Pergudangan/ *Cold Storage* Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	104,68	106,89	101,16	102,05
2. Balas Jasa Pekerja	115,70	93,33	112,91	112,68
3. Pendapatan	101,18	103,12	102,14	102,23
4. Produktivitas Pekerja	97,99	106,83	100,17	100,97
5. Volume Gudang Tertutup/ <i>Cold Storage</i> yang Disewakan	102,10	100,10	97,13	99,59
6. Luas Gudang Terbuka yang Disewakan	101,19	101,58	99,79	100,41

Dari tabel 3.2.2.4 menunjukkan bahwa pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja pada triwulan I, III, dan IV, akan tetapi pada triwulan II tidak sejalan. Jumlah pekerja pada triwulan II naik 6,89 persen namun balas jasa pekerja turun 6,67 persen.

Bila dilihat dari keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan dengan pertumbuhan volume/luas gudang disewakan, secara umum pertumbuhannya tidak sejalan.

Grafik 3.2.2.4
Indeks Kegiatan Pergudangan/ Cold Storage Triwulanan
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



3.2.5. Perparkiran

Jumlah pekerja kegiatan usaha perparkiran dari hasil STKU-H tahun 2015 mengalami tren yang cenderung menurun kecuali pada triwulan I naik sebesar 2,56 persen dari triwulan sebelumnya. Pada triwulan II, III, dan IV jumlah pekerja kegiatan perparkiran turun masing-masing sebesar 0,38 persen, 0,81 persen, dan 2,08 persen dibandingkan triwulan sebelumnya.

Berbeda dengan jumlah pekerja kegiatan perparkiran, balas jasa pekerja pada kegiatan perparkiran cenderung meningkat kecuali pada triwulan II turun 1.08 persen. Pada triwulan I, III; dan IV indeks balas jasa pekerja masing-masing sebesar 104,93; 100,23 dan 104,30.

Sedikit berbeda dengan balas jasa pekerja, pendapatan usaha pada kegiatan perparkiran mengalami penurunan pada triwulan I sebesar 2,10 persen. Kemudian pada triwulan II, III, dan IV mengalami kenaikan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai indeks triwulanan untuk triwulan II, III, dan IV masing-masing sebesar 105,51; 109,03 dan 100,35.

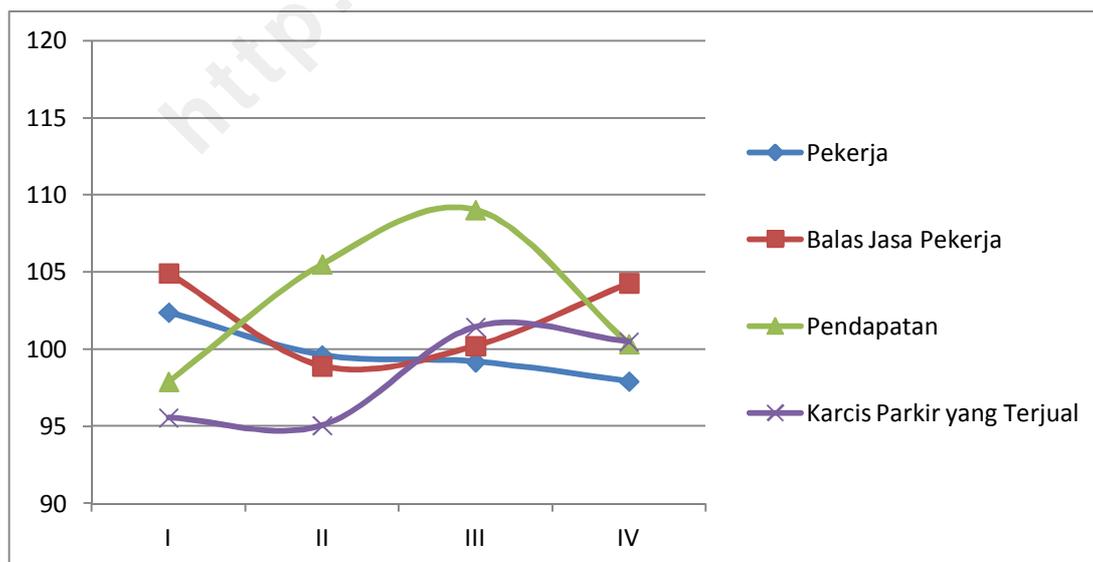
Produktivitas pekerja memiliki pola yang sama dengan pendapatan pekerja. Produktivitas pekerja pada triwulan I turun sebesar 4.54 persen dari triwulan sebelumnya. Kemudian pada triwulan II, III, dan IV naik masing-masing sebesar 5,91 persen, 9,92 persen, dan 2,48 persen.

**Tabel 3.2.2.5.
Indeks Kegiatan Perparkiran Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia, 2015**

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	102,56	99,62	99,19	97,92
2. Balas Jasa Pekerja	104,93	98,92	100,23	104,30
3. Pendapatan	97,90	105,51	109,03	100,35
4. Produktivitas Pekerja	95,46	105,91	109,92	102,48
5. Karcis Parkir yang Terjual	95,57	95,08	101,45	100,49

Indikator produksi perusahaan pada kegiatan perparkiran yaitu jumlah karcis parkir yang terjual menurun pada triwulan I dan II, sedangkan pada triwulan III dan IV terjadi peningkatan. Jumlah karcis yang terjual pada triwulan I dan II mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,43 persen dan 4,92 persen. Kemudian pada triwulan III dan IV masing-masing naik 1,45 persen dan 0,49 persen dibanding triwulan sebelumnya.

**Grafik 3.2.2.5
Indeks Kegiatan Perparkiran Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia, 2015**



Pada tabel 3.2.2.5 dan grafik 3.2.2.5 menunjukkan secara umum pertumbuhan pendapatan sejalan dengan produktivitas pekerja. Sebaliknya, keterkaitan antara balas jasa pekerja secara umum tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan karcis parkir yang terjual.

3.2.6 Bongkar Muat

Secara keseluruhan jumlah pekerja kegiatan bongkar muat cenderung berfluktuasi. Pada triwulan I peningkatan sebesar 3,46 persen dari triwulan sebelumnya. Kemudian pada triwulan II dan III mengalami penurunan masing-masing sebesar 2,03 persen dan 0,47 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Akan tetapi pada triwulan IV naik kembali sebesar 4,75 persen.

Berbeda dengan jumlah pekerja, balas jasa pekerja pada kegiatan bongkar muat mengalami tren yang cenderung meningkat kecuali pada triwulan IV yang mengalami penurunan sebesar 27,86 persen dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan balas jasa pekerja ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I, II, dan III masing-masing sebesar 100,69; 131,09 dan 106,97.

Pendapatan usaha pada kegiatan bongkar muat mengalami tren yang meningkat pada triwulan I dan II masing-masing sebesar 18,52 persen dan 10,94 persen. Sedangkan pada triwulan III dan IV mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,76 persen dan 4,48 persen dibanding triwulan sebelumnya.

Sejalan dengan pendapatan usaha, produktivitas pekerja pada kegiatan bongkar muat juga meningkat pada triwulan I dan II. Sedangkan pada triwulan III dan IV mengalami penurunan. Indeks produktivitas pekerja pada triwulan I sampai triwulan IV masing-masing sebesar 114,57; 113,24; 99,71 dan 91,19.

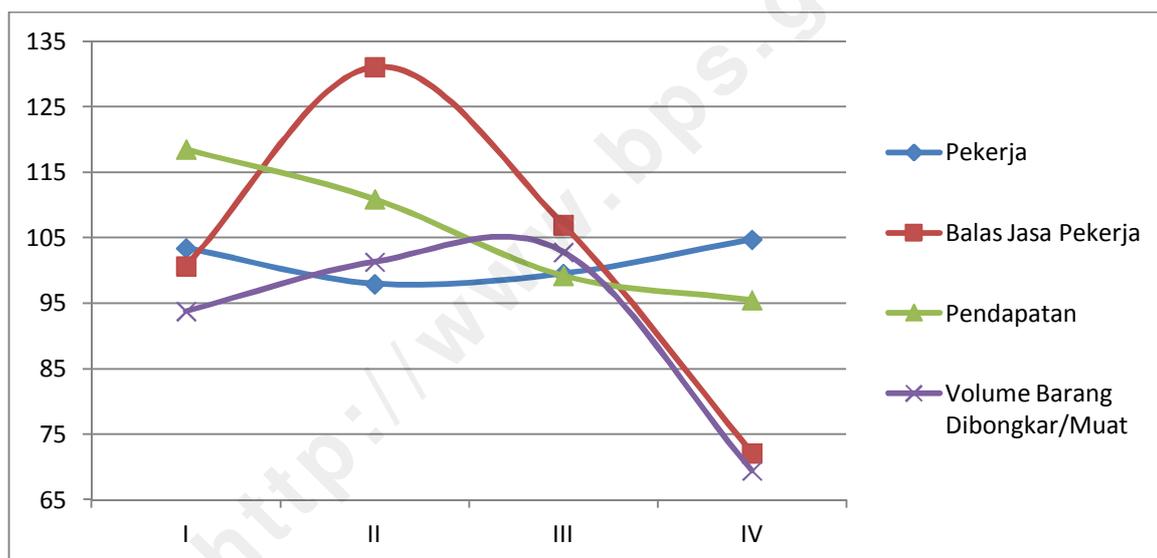
Tabel 3.2.2.6.
Indeks Kegiatan Bongkar Muat Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	103,46	97,97	99,53	104,75
2. Balas Jasa Pekerja	100,69	131,09	106,97	72,14
3. Pendapatan	118,52	110,94	99,24	95,52
4. Produktivitas Pekerja	114,57	113,24	99,71	91,19
5. Volume Barang Dibongkar/Muat	93,78	101,30	102,83	69,47

Indikator produksi perusahaan pada kegiatan bongkar muat yaitu jumlah barang yang dibongkar maupun dimuat, untuk triwulan I mengalami penurunan sebesar 6,22 persen. Kemudian pada triwulan II dan III mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yaitu masing-masing sebesar 1,30 persen, dan 2,83 persen. Akan tetapi pada triwulan IV barang yang dibongkar maupun dimuat mengalami penurunan kembali sebesar 30,53 persen dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan yang cukup besar pada triwulan ini disebabkan karena ada beberapa pelabuhan yang memang sedang tidak ada kegiatan bongkar muat pada triwulan IV ini.

Pada grafik 3.2.2.6 menunjukkan pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan produktivitas pekerja. Sebaliknya, pertumbuhan pendapatan tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan volume barang yang dibongkar muat, yaitu pada triwulan I.

Grafik 3.2.2.6
Indeks Kegiatan Bongkar Muat Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



3.2.7 Ekspedisi

Jumlah pekerja pada kegiatan ekspedisi cenderung menurun kecuali pada triwulan II mengalami kenaikan sebesar 0,10 persen dibanding triwulan sebelumnya. Penurunan jumlah pekerja kegiatan ekspedisi terjadi pada triwulan I, triwulan III, dan triwulan IV dengan angka indeks masing masing sebesar 98,29; 99,28; dan 99,83.

Balas jasa pekerja pada kegiatan ekspedisi mengalami peningkatan pada tiap triwulannya, kecuali pada triwulan IV mengalami penurunan sebesar 4,88 persen dibanding triwulan sebelumnya. Peningkatan balas jasa pekerja pada

kegiatan ekspedisi ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I sampai triwulan III masing masing sebesar 102,95; 100,68; dan 105,98.

Berbeda dengan balas jasa pekerja, pendapatan usaha pada kegiatan ekspedisi cenderung berfluktuasi pada tiap triwulannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I sampai triwulan IV masing masing sebesar 104,15; 85,36; 95,11; dan 102,41.

Sama seperti pendapatan usaha, produktivitas pekerja pada kegiatan ekspedisi memiliki indeks yang berfluktuasi pada tiap triwulannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I sampai triwulan IV masing masing sebesar 105,96; 85,27; 95,80; dan 102,58.

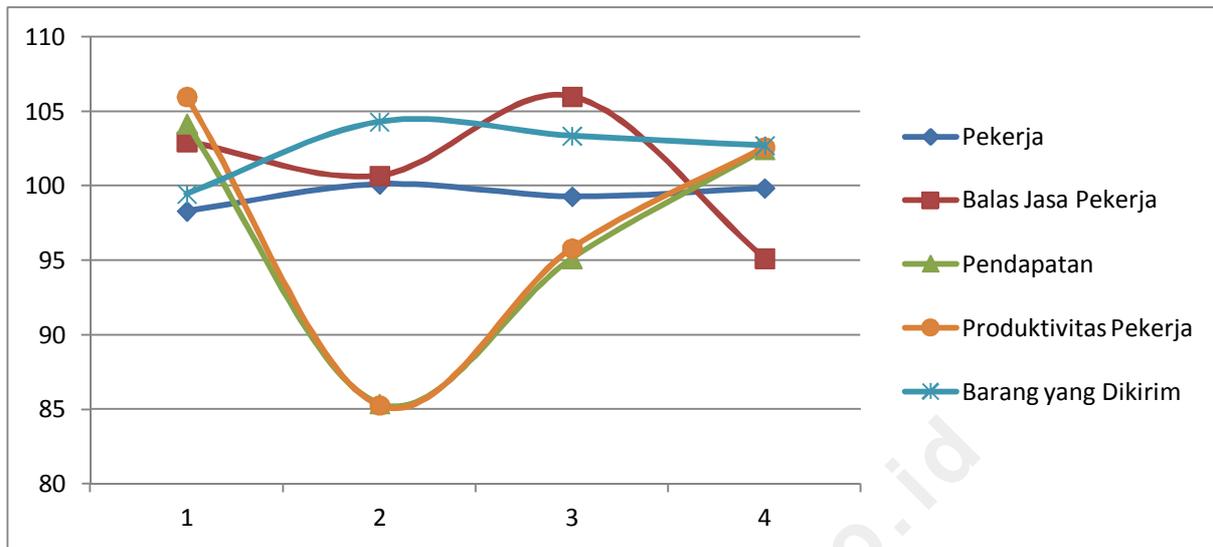
Tabel 3.2.2.7.
Indeks Kegiatan Ekspedisi Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	98.29	100.10	99.28	99.83
2. Balas Jasa Pekerja	102.95	100.68	105.98	95.12
3. Pendapatan	104.15	85.36	95.11	102.41
4. Produktivitas Pekerja	106,28	84,74	95,93	103,36
5. Jumlah Barang yang Dikirim	99.45	104.29	103.34	102.69

Jumlah barang yang dikirim selama tahun 2015 jumlahnya cenderung mengalami kenaikan, kecuali pada triwulan I terjadi penurunan sebesar 0,55 persen dibanding triwulan sebelumnya. Jumlah barang yang dikirim pada triwulan II, III, dan IV mengalami kenaikan dibanding triwulan sebelumnya, dengan angka indeks masing masing sebesar 104,29; 103,34; dan 102,69.

Pada grafik 3.2.2.7 menunjukkan pertumbuhan pendapatan sejalan dengan produktivitas pekerja kegiatan ekspedisi. Akan tetapi, Produktivitas pekerja tidak sejalan dengan jumlah barang yang dikirim pada setiap triwulannya, kecuali pada triwulan IV.

Grafik 3.2.2.7
Indeks Kegiatan Ekspedisi Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku
di Indonesia, 2015



3.2.8. Kurir

Jumlah pekerja pada kegiatan kurir selalu meningkat pada tiap triwulan, ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I sampai triwulan IV, masing-masing 102,14; 102,82; 101,06; dan 101,97. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan II dan kenaikan terendah pada triwulan III.

Sama seperti jumlah pekerja, balas jasa pekerja pada kegiatan kurir selalu meningkat pada tiap triwulan. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I sampai triwulan IV, masing-masing 103,65; 101,36; 104,56; dan 102,89.

Berbeda dengan jumlah pekerja, pendapatan usaha pada kegiatan kurir menunjukkan tren yang cenderung berfluktuatif antar triwulannya. Pada triwulan I pendapatan usaha kegiatan kurir mengalami penurunan dengan angka indeks sebesar 98,38. Sebaliknya, pada triwulan II dan triwulan III mengalami kenaikan dengan angka indeks sebesar 107,25 dan 105,74. Pendapatan usaha kegiatan kurir kembali mengalami penurunan pada triwulan IV, dengan angka indeks sebesar 85,20.

Hal yang sama dengan pendapatan pekerja, selama tahun 2015 produktivitas pekerja pada kegiatan kurir menunjukkan tren yang cenderung berfluktuatif antar triwulannya. Pada triwulan I produktivitas pekerja kegiatan kurir mengalami penurunan dengan angka indeks sebesar 96,33. Sebaliknya, pada triwulan II dan triwulan III mengalami kenaikan dengan angka indeks sebesar 104,31 dan 104,26. Produktivitas pekerja kegiatan kurir kembali mengalami penurunan pada triwulan IV, dengan angka indeks sebesar 83,56.

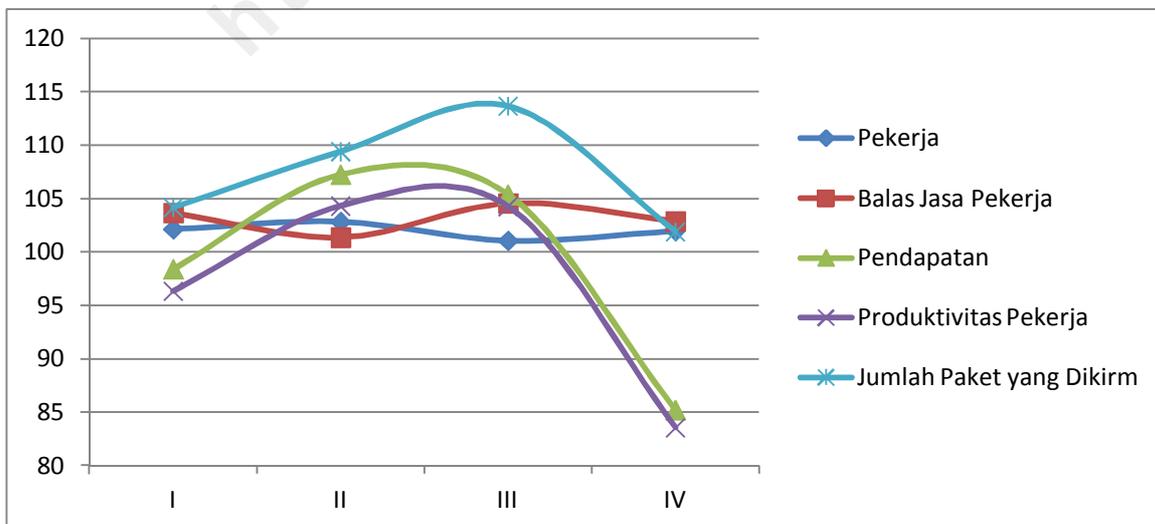
Jumlah paket yang dikirim oleh perusahaan kurir mengalami tren yang meningkat antar triwulannya. Hal tersebut ditunjukkan dengan angka indeks pada triwulan I sampai trwulan IV, masing-masing 104,15; 109,40; 113,66; dan 101,91. Kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan III.

Tabel 3.2.2.8.
Indeks Kegiatan Kurir Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

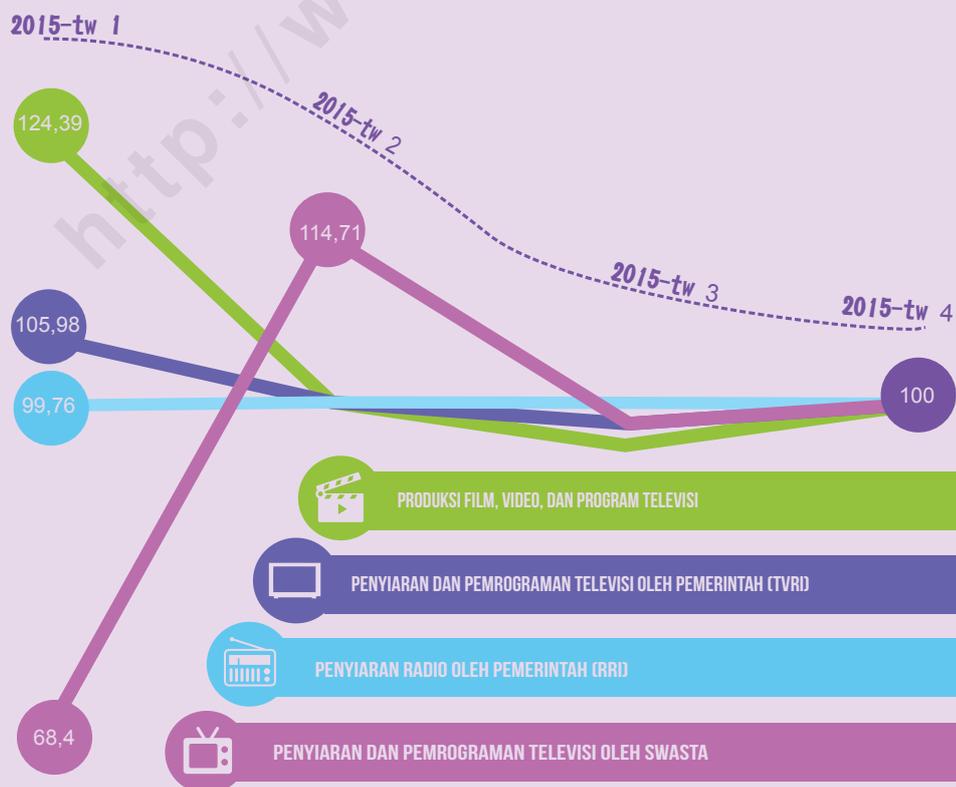
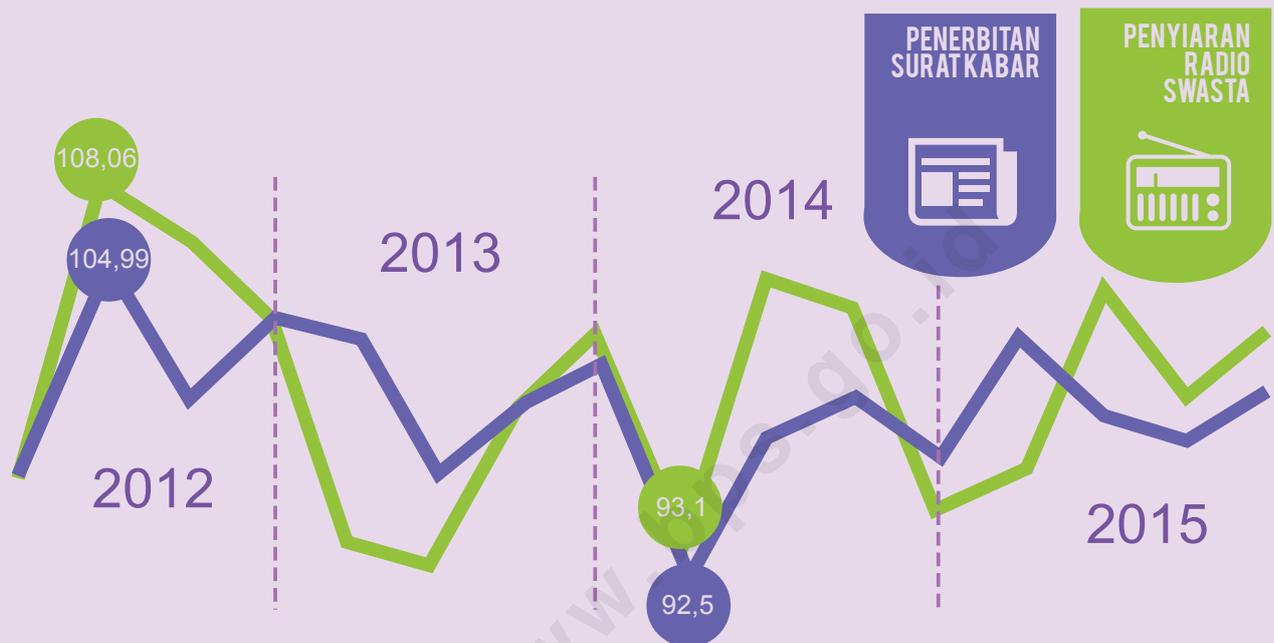
Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	102.14	102.82	101.06	101.97
2. Balas Jasa Pekerja	103.65	101.36	104.56	102.89
3. Pendapatan	98.38	107.25	105.74	85.20
4. Produktivitas Pekerja	96.33	104.31	104.26	83.56
5. Jumlah Paket yang Dikirm	104.15	109.40	113.66	101.91

Pada grafik 3.2.2.8 menunjukkan pertumbuhan balas jasa pekerja sejalan dengan pertumbuhan jumlah pekerja pada setiap triwulannya. Demikian pula keterkaitan antara pertumbuhan pendapatan sejalan dengan produktivitas pekerja kegiatan kurir.

Grafik 3.2.2.8
Indeks Triwulanan Kegiatan Kurir Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN INFORMASI DI INDONESIA

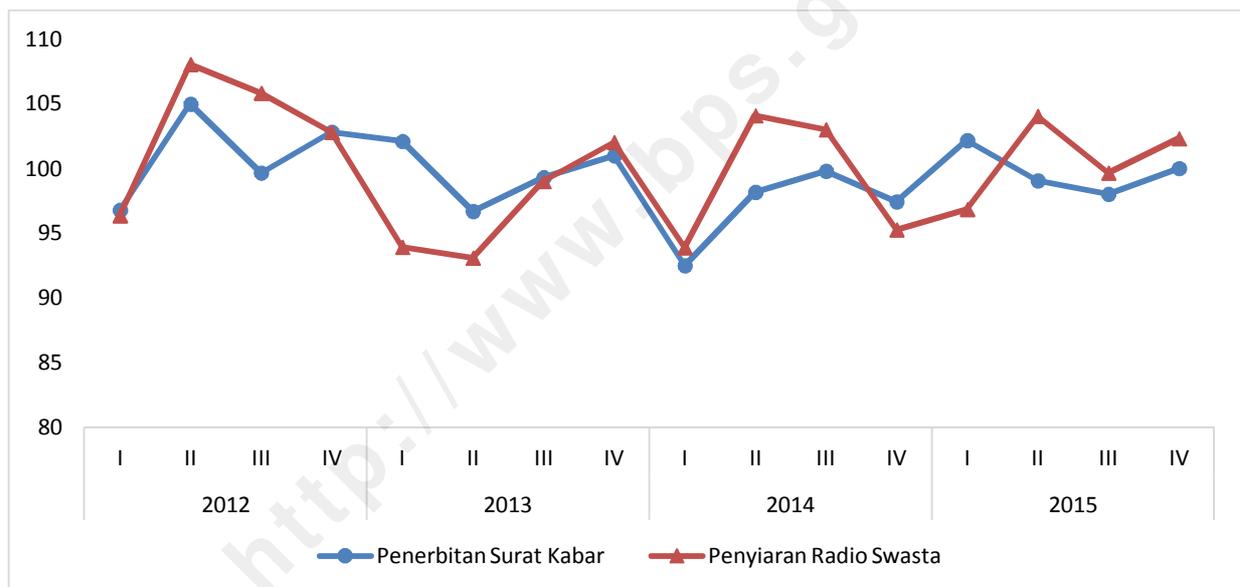


<http://www.bps.go.id>

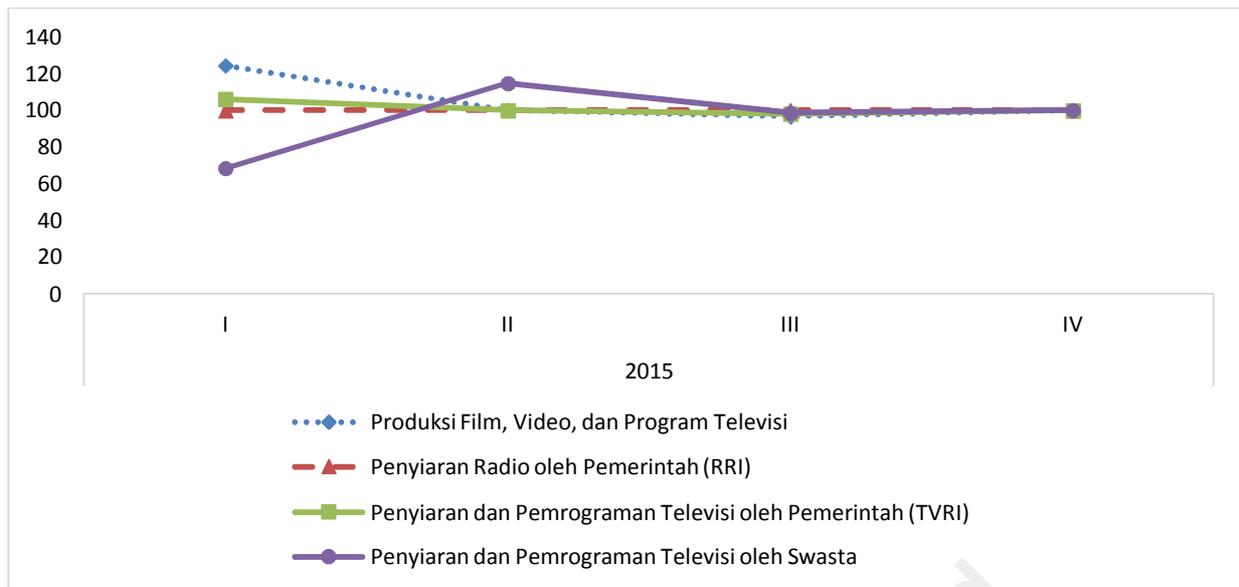
3.3 INFORMASI

3.3.1 Indeks Produktivitas Perusahaan/ Usaha Informasi Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Jenis Kegiatan di Indonesia

Tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan/usaha informasi dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja bervariasi apabila dilihat menurut jenis kegiatannya. Pergerakan fluktuatif dari tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja terutama terjadi pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar dan perusahaan/usaha penyiaran radio swasta. Pergerakan dari produktivitas perusahaan/usaha penerbitan surat kabar dan penyiaran radio swasta terlihat searah selama Triwulan I 2012 hingga Triwulan IV 2015. Fenomena positif dari kenaikan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan/usaha penerbitan surat kabar terjadi pada Triwulan II dan IV 2012, Triwulan I dan IV 2013, serta Triwulan I dan IV 2015. Sementara itu, fenomena positif pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta terjadi pada Triwulan II–IV 2012, Triwulan IV 2013, Triwulan II dan III 2014, serta Triwulan II dan IV 2015.



Grafik 3.3.1.1. Indeks Produktivitas Perusahaan/ Usaha Produksi Film, Video, dan Program Televisi, Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah, Penyiaran Radio Pemerintah, dan Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta Triwulanan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Kegiatan Utama di Indonesia, Triwulan I 2012 - Triwulan IV 2015



Grafik 3.3.1.2. Indeks Produktivitas Perusahaan/ Usaha Produksi Film, Video, dan Program Televisi, Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah, Penyiaran Radio

Berbeda dengan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar dan radio swasta, hanya terdapat data Triwulan I–IV 2015 untuk perusahaan/usaha produksi film, video, dan program televisi, penyiaran radio oleh pemerintah, penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, dan penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta. Variasi dari tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan/usaha terjadi pada Triwulan I–III 2015 untuk perusahaan/usaha produksi film, video, dan program televisi, penyiaran radio oleh pemerintah, penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, dan penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta. Pada Triwulan IV 2015, tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan/usaha dalam memanfaatkan tenaga kerja tidak mengalami perubahan untuk keempat perusahaan/usaha tersebut.

Berikut ini dipaparkan kondisi kegiatan usaha/perusahaan informasi pada tahun 2015 menurut jenisnya.

3.3.2 Penerbitan Surat Kabar

Berdasarkan hasil STKU-J 2015, jumlah pekerja perusahaan/usaha penerbitan surat kabar cenderung konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan. Pada Triwulan I dan II, jumlah pekerja mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, masing-masing dengan angka indeks 99,13 dan 98,99. Sebaliknya, jumlah pekerja pada Triwulan III dan IV mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, masing-masing dengan angka indeks 100,43 dan 100,66. Angka

indeks pekerja pada Triwulan III dan IV mengindikasikan peningkatan jumlah pekerja, masing-masing meningkat 0,43 persen dan 0,66 persen.

Balas jasa yang diterima oleh pekerja perusahaan/usaha penerbitan surat kabar cenderung konstan pada setiap triwulan, masing-masing dengan angka indeks 101,77; 100,03; 101,59; dan 99,86.

Indeks balas jasa mengindikasikan adanya kecenderungan sedikit kenaikan balas jasa yang diterima oleh pekerja pada Triwulan I sampai dengan III, masing-masing meningkat 1,77 persen pada Triwulan I, 0,03 persen pada Triwulan II, dan 1,59 persen pada Triwulan III. Sebaliknya, balas jasa yang diterima oleh pekerja pada Triwulan IV cenderung sedikit menurun sebesar 0,14 persen. Jika dikaitkan dengan indeks pekerja maka perubahan pada balas jasa yang diterima pekerja relatif tidak terdapat fenomena yang berarti pada setiap triwulan. Hal ini dikarenakan angka indeks yang cenderung konstan, baik indeks balas jasa maupun indeks pekerja, sehingga kenaikan maupun penurunan yang terjadi relatif tidak signifikan.

Tabel 3.3.2
Indeks Penerbitan Surat Kabar
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	99,13	98,99	100,43	100,66
2. Balas Jasa Pekerja	101,77	100,03	101,59	99,86
3. Pendapatan	98,13	99,62	101,78	99,89
4. Output (Oplah)	101,29	98,06	98,44	100,68
5. Produktivitas	102,18	99,06	98,02	100,02

Pendapatan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan. Pada Triwulan I, II, dan IV terjadi sedikit penurunan pada perolehan pendapatan perusahaan/usaha penerbitan surat kabar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pada triwulan sebelumnya, masing-masing dengan angka indeks 98,13; 99,62; dan 99,89. Sebaliknya, perolehan pendapatan pada Triwulan III mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan perolehan pendapatan pada triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 101,78. Indeks pendapatan mengindikasikan tingkat kinerja perusahaan. Indikasi peningkatan kinerja pada

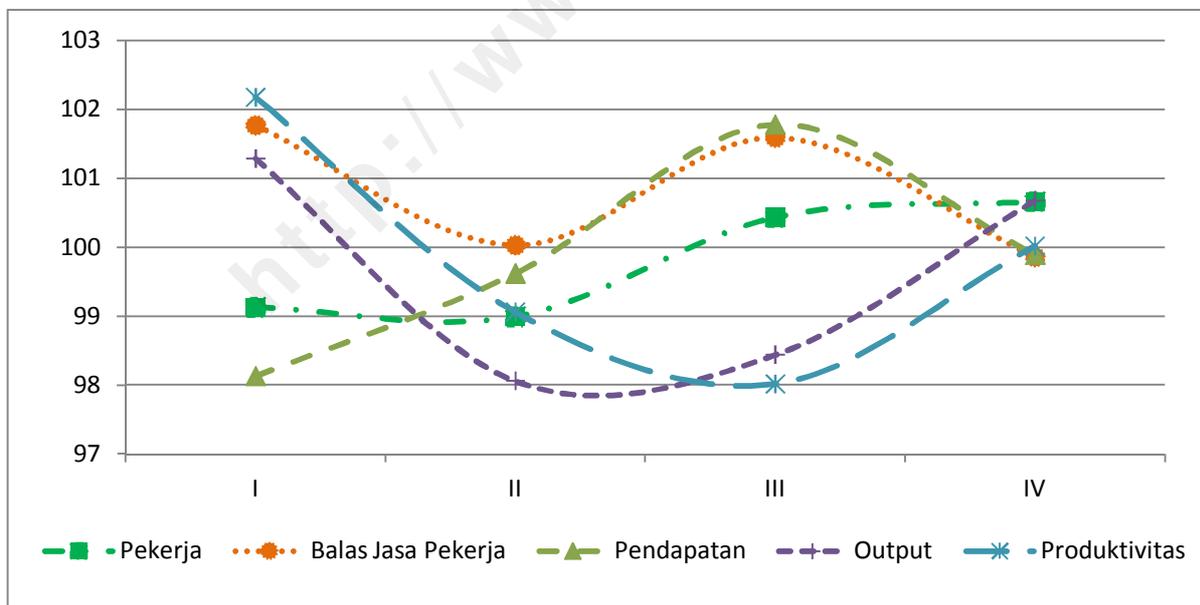
perusahaan/usaha penerbitan surat kabar terjadi pada Triwulan III, yaitu meningkat 1,78 persen.

Indeks output mengindikasikan adanya kecenderungan sedikit kenaikan produksi perusahaan pada Triwulan I dan IV, masing-masing meningkat 1,29 persen dan 0,68 persen. Pada Triwulan II dan III, produksi perusahaan cenderung menurun sebesar 1,94 persen dan 1,56 persen.

Produktivitas perusahaan/usaha penerbitan surat kabar tidak mengalami perubahan yang berarti pada setiap triwulan. Produktivitas pada Triwulan I dan IV relatif meningkat dengan angka indeks 102,18 dan 100,02 sedangkan pada Triwulan II dan III relatif menurun dengan angka indeks 99,06 dan 98,02.

Indeks produktivitas memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. Tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar mengalami kenaikan pada Triwulan I dan IV. Tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja menunjukkan kecenderungan yang meningkat sebesar 2,18 persen pada Triwulan I dan 0,02 persen pada Triwulan IV.

Grafik 3.3.2
Indeks Kegiatan Penerbitan Surat Kabar
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



3.3.3 Produksi Film, Video dan Program Televisi

Berdasarkan hasil STKU-J 2015, jumlah pekerja dan balas jasa pekerja perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi cenderung konstan, tidak mengalami perubahan dengan angka indeks 100,00 pada setiap triwulan.

Tabel 3.3.3
Indeks Kegiatan Produksi Film, Video dan Program Televisi
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

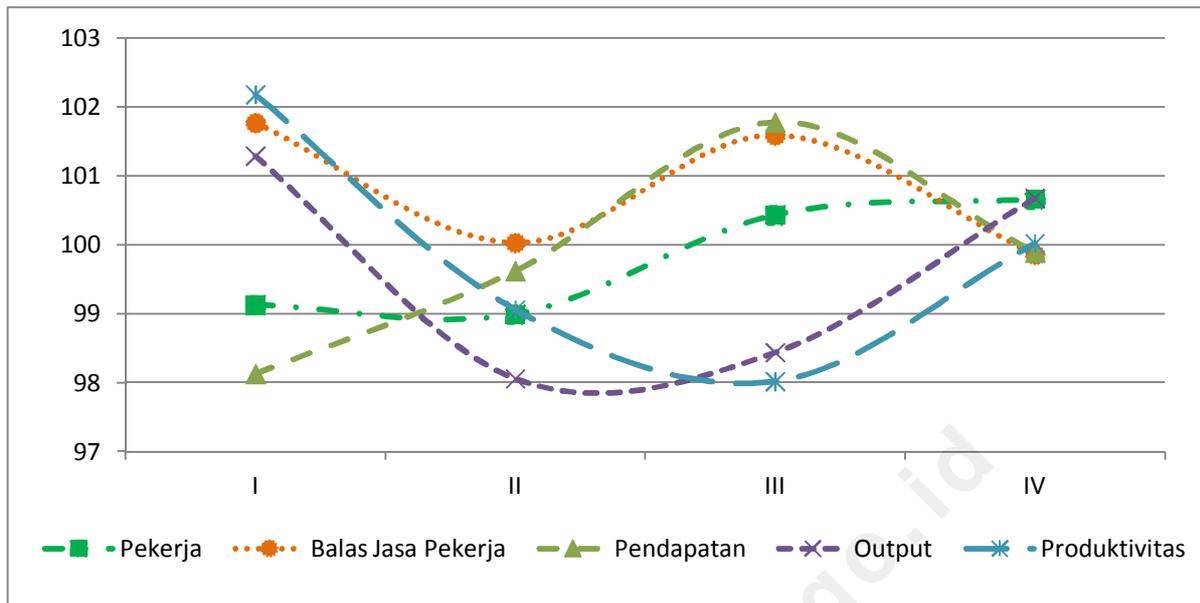
Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Balas Jasa Pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Pendapatan	100,00	96,11	104,05	103,89
4. Output (Judul/Episode)	124,39	100,00	96,49	100,00
5. Produktivitas	124,39	100,00	96,49	100,00

Pendapatan perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi konstan pada Triwulan I dengan angka indeks 100,00. Pada Triwulan II terjadi penurunan pendapatan yang cukup signifikan dengan angka indeks 96,11 sedangkan pada Triwulan III dan IV terjadi kenaikan pendapatan yang signifikan dengan angka indeks 104,05 dan 103,89.

Indeks pendapatan mengindikasikan tingkat kinerja perusahaan. Indikasi peningkatan kinerja pada perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi terjadi pada Triwulan III dan IV, masing-masing meningkat 4,05 persen dan 3,89 persen.

Output perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi yaitu judul/episode. Output ini menggambarkan indikator produksi perusahaan. Output perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada Triwulan II dan IV, masing-masing dengan angka indeks 100,00. Pada Triwulan I, output perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 124,39. Sebaliknya, output pada Triwulan IV relatif menurun cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 96,49.

Grafik 3.3.3
Indeks Produksi Film, Video dan Program Televisi
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



Produktivitas perusahaan/usaha perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi perusahaan relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada Triwulan II dan IV, masing-masing dengan angka indeks 100,00. Pada Triwulan I, produktivitas perusahaan/usaha perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 124,39. Sebaliknya, produktivitas pada Triwulan IV relatif menurun cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 96,49.

Indeks produktivitas memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. Tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar tampak mengalami kenaikan sebesar 24,39 persen pada Triwulan I.

3.3.4 Penyiaran Radio oleh Pemerintah

Berdasarkan hasil STKU-J 2015, jumlah pekerja perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah cenderung konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti dengan angka indeks 100,00 pada setiap triwulan.

Balas jasa yang diterima oleh pekerja perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah cenderung konstan pada Triwulan II sampai dengan IV, masing-masing dengan angka indeks 100,00. Adapun pada Triwulan I, balas jasa yang diterima oleh pekerja cenderung meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 101,44.

Tabel 3.3.4
Indeks Penyiaran Radio oleh Pemerintah
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Balas Jasa Pekerja	101,44	100,00	100,00	100,00
3. Pendapatan	94,83	103,64	100,00	100,00
4. Output (Spot)	99,76	100,10	100,00	100,00
5. Produktivitas	99,76	100,10	100,00	100,00

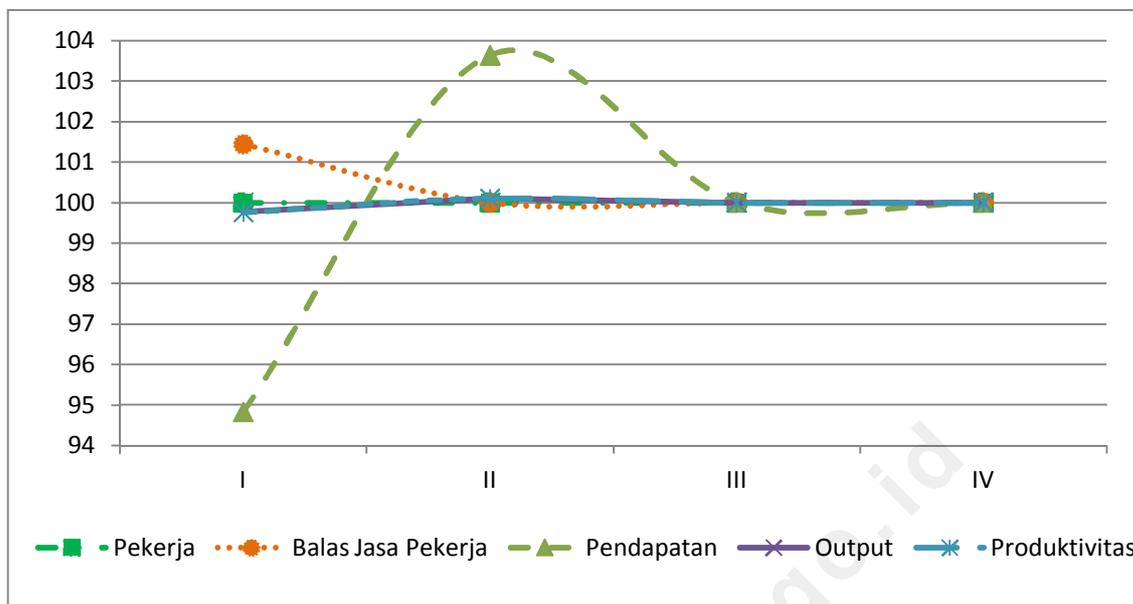
Pendapatan perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada Triwulan III dan IV dengan angka indeks 100,00. Pada Triwulan I, terjadi penurunan pada perolehan pendapatan perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pada triwulan sebelumnya dengan angka indeks 94,83. Sebaliknya, pada Triwulan II perolehan pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan dengan perolehan pendapatan pada triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 103,64.

Indeks pendapatan mengindikasikan tingkat kinerja perusahaan. Indikasi peningkatan kinerja pada perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah terjadi pada Triwulan II dengan peningkatan sebesar 3,64 persen.

Output perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah yaitu durasi iklan (dalam satuan spot). Output ini menggambarkan indikator produksi perusahaan. Output perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan, masing-masing dengan angka indeks 99,76 pada Triwulan I, 100,10 pada Triwulan II, serta 100,00 pada Triwulan III dan IV.

Indeks output mengindikasikan adanya kecenderungan sedikit kenaikan produksi perusahaan pada Triwulan II yaitu meningkat 0,10 persen. Pada Triwulan I, produksi perusahaan cenderung menurun sebesar 0,24 persen.

Grafik 3.3.4
Indeks Penyiaran Radio oleh Pemerintah
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



Produktivitas perusahaan/usaha relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan, masing-masing dengan angka indeks 99,76 pada Triwulan I, 100,10 pada Triwulan II, serta 100,00 pada Triwulan III dan IV.

Indeks produktivitas memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. Tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja pada perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah tampak mengalami kenaikan pada Triwulan II, yaitu sebesar 0,10 persen. Sebaliknya, pada Triwulan I tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja menunjukkan kecenderungan menurun sebesar 0,24 persen.

3.3.5 Penyiaran Radio oleh Swasta

Jumlah pekerja perusahaan/usaha penyiaran radio swasta tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada setiap triwulan. Jumlah pekerja pada setiap triwulan mengindikasikan adanya sedikit penurunan, masing-masing dengan angka indeks 97,14 pada Triwulan I, 99,69 pada Triwulan II, 99,03 pada Triwulan III, dan 99,78 pada Triwulan IV.

Balas jasa yang diterima oleh pekerja perusahaan penyiaran radio swasta relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang berarti pada setiap triwulan, masing-masing dengan angka indeks 100,95 pada Triwulan I, 102,31 pada Triwulan II, 102,82 pada Triwulan III, dan 100,42 pada Triwulan IV.

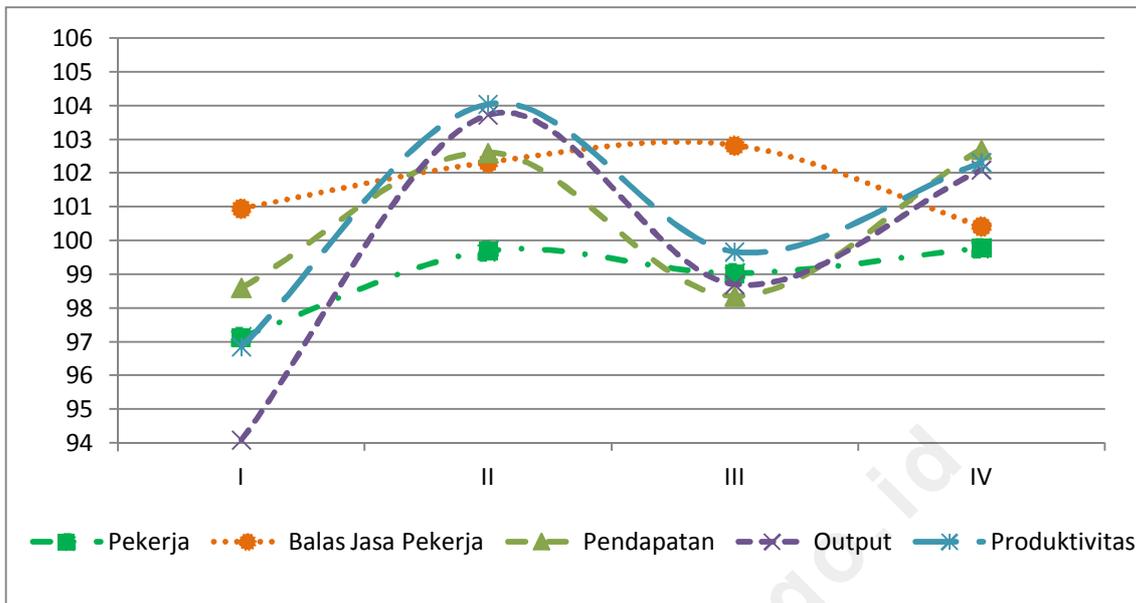
Tabel 3.3.5
Indeks Penyiaran Radio oleh Swasta
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

Indikator	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	97,14	99,69	99,03	99,78
2. Balas Jasa Pekerja	100,95	102,31	102,82	100,42
3. Pendapatan	98,60	102,60	98,35	102,70
4. Output (Spot)	94,09	103,72	98,70	102,09
5. Produktivitas	96,86	104,04	99,67	102,32

Indeks balas jasa perusahaan penyiaran radio swasta mengindikasikan adanya sedikit kenaikan balas jasa yang diterima oleh pekerja, dengan kenaikan 0,95 persen pada Triwulan I, 2,31 persen pada Triwulan II, 2,82 persen pada Triwulan III, dan 0,42 persen pada Triwulan IV. Jika dikaitkan dengan indeks pekerja maka perubahan pada balas jasa yang diterima pekerja relatif tidak terdapat fenomena yang berarti pada Triwulan I sampai dengan IV. Hal ini dikarenakan angka indeks yang cenderung konstan, baik indeks balas jasa maupun indeks tenaga kerja, sehingga kenaikan/penurunan yang terjadi relatif tidak signifikan.

Pendapatan perusahaan/usaha penyiaran radio swasta menunjukkan kecenderungan yang relatif konstan pada setiap triwulannya. Pendapatan perusahaan sedikit menurun pada Triwulan I dan III, masing-masing dengan angka indeks 98,60 dan 98,35. Sebaliknya, pendapatan perusahaan sedikit meningkat pada Triwulan II dan IV, masing-masing dengan angka indeks 102,60 dan 102,70. Indeks pendapatan per triwulan yang mengindikasikan peningkatan kinerja perusahaan terjadi pada Triwulan II dan IV, masing-masing meningkat 2,60 persen dan 2,70 persen.

Grafik 3.3.5
Indeks Penyiaran Radio oleh Swasta
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



Output perusahaan/usaha penyiaran radio swasta yaitu durasi iklan (dalam satuan spot). Output ini menggambarkan indikator produksi perusahaan. Output perusahaan/usaha penyiaran radio swasta tidak mengalami perubahan yang berarti pada Triwulan III dan IV, masing-masing dengan angka indeks 98,70 dan 102,09. Sementara itu, output perusahaan pada Triwulan I cenderung menurun cukup signifikan dengan angka indeks 94,09 dan meningkat cukup signifikan pada Triwulan II dengan angka indeks 103,72 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Indeks output perusahaan/usaha penyiaran radio swasta pada Triwulan I mengindikasikan adanya penurunan produksi perusahaan sebesar 5,91 persen sedangkan pada Triwulan II mengindikasikan adanya kenaikan produksi sebesar 3,72 persen.

Pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, produktivitas perusahaan relatif konstan pada Triwulan III dan IV dengan angka indeks 99,67 dan 102,32. Kecenderungan kenaikan produktivitas perusahaan yang relatif tinggi terjadi pada Triwulan II dengan angka indeks 104,04 sedangkan pada Triwulan I angka indeks menunjukkan kecenderungan penurunan yang cukup signifikan dengan angka indeks 96,86.

Pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, fenomena positif untuk kenaikan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja tampak terjadi pada Triwulan II dan IV, masing-masing meningkat sebesar 4,04 persen dan 2,32 persen.

3.3.6 Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah

Berdasarkan hasil STKU-J 2015, jumlah pekerja dan balas jasa pekerja perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah cenderung konstan, tidak mengalami perubahan dengan angka indeks 100,00 pada setiap triwulan.

Tabel 3.3.6
Indeks Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

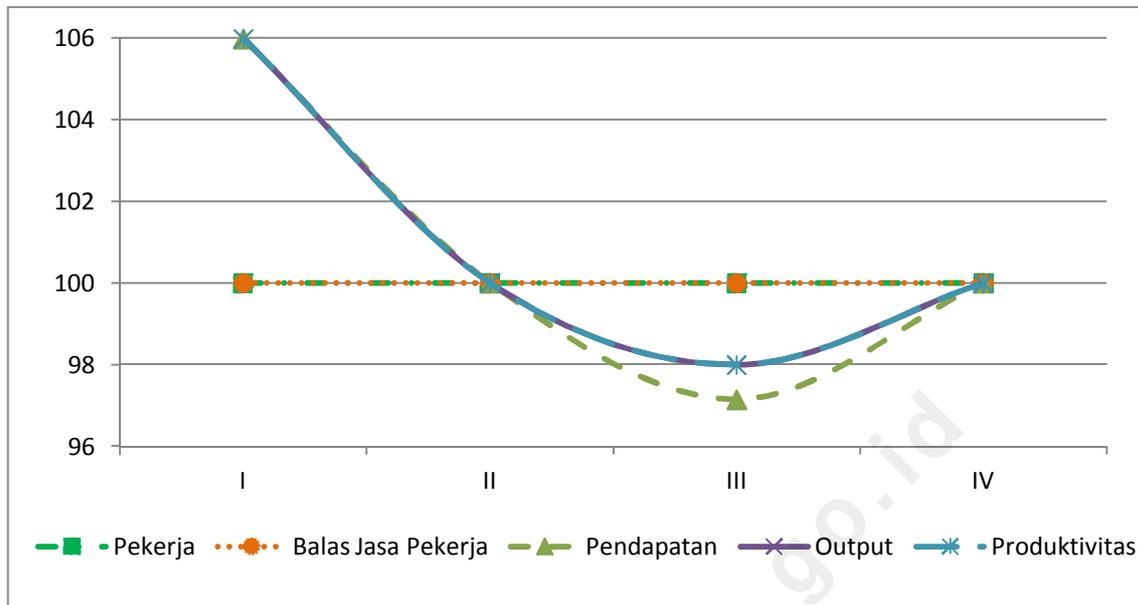
Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00
2. Balas Jasa Pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00
3. Pendapatan	105,98	100,00	97,15	100,00
4. Output (Spot)	105,98	100,00	98,00	100,00
5. Produktivitas	105,98	100,00	98,00	100,00

Pendapatan perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah konstan pada Triwulan II dan IV dengan angka indeks 100,00. Pada Triwulan I terjadi kenaikan pendapatan yang cukup signifikan dengan angka indeks 105,98 sedangkan pada Triwulan III terjadi penurunan pendapatan dengan angka indeks 97,15.

Indeks pendapatan mengindikasikan tingkat kinerja perusahaan. Indikasi peningkatan kinerja pada perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah terjadi pada Triwulan I, yaitu meningkat sebesar 5,98 persen.

Output perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah yaitu durasi iklan (dalam satuan spot). Output ini menggambarkan indikator produksi perusahaan. Output perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah konstan pada Triwulan II dan IV dengan angka indeks 100. Pada Triwulan I, output perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 105,98. Sebaliknya, output pada Triwulan III relatif menurun dengan angka indeks 98,00.

Grafik 3.3.6
Indeks Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015



Produktivitas perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah relatif konstan, tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada Triwulan II dan IV, masing-masing dengan angka indeks 100,00. Pada Triwulan I, produktivitas perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah meningkat sangat signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 105,98. Sebaliknya, produktivitas pada Triwulan III relatif menurun dengan angka indeks 98,00.

Indeks produktivitas memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. Tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja pada perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah tampak mengalami kenaikan sebesar 5,98 persen pada Triwulan I.

3.3.7 Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta

Jumlah pekerja perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta tidak mengalami perubahan yang cukup berarti pada Triwulan III dan IV, masing-masing dengan angka indeks 100,00. Jumlah pekerja pada Triwulan I dan II mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan angka indeks 104,17 dan 104,00.

Balas jasa yang diterima oleh pekerja perusahaan penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta relatif meningkat cukup signifikan pada Triwulan I dan III, masing-masing dengan angka indeks 108,89 dan 123,53.

Sebaliknya, balas jasa yang diterima oleh pekerja pada Triwulan II relatif menurun signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dengan angka indeks 89,49. Sementara itu, balas jasa yang diterima pekerja pada Triwulan IV cenderung konstan, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 100,00.

Indeks balas jasa perusahaan penyiaran radio swasta mengindikasikan adanya sedikit kenaikan balas jasa yang diterima oleh pekerja, dengan kenaikan 8,89 persen pada Triwulan I dan 23,53 persen pada Triwulan III.

Tabel 3.3.7
Indeks Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta
Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia, 2015

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pekerja	104,17	104,00	100,00	100,00
2. Balas Jasa Pekerja	108,89	89,49	123,53	100,00
3. Pendapatan	100,02	99,92	100,06	100,00
4. Output (Spot)	71,25	119,30	98,53	100,00
5. Produktivitas	68,40	114,71	98,53	100,00

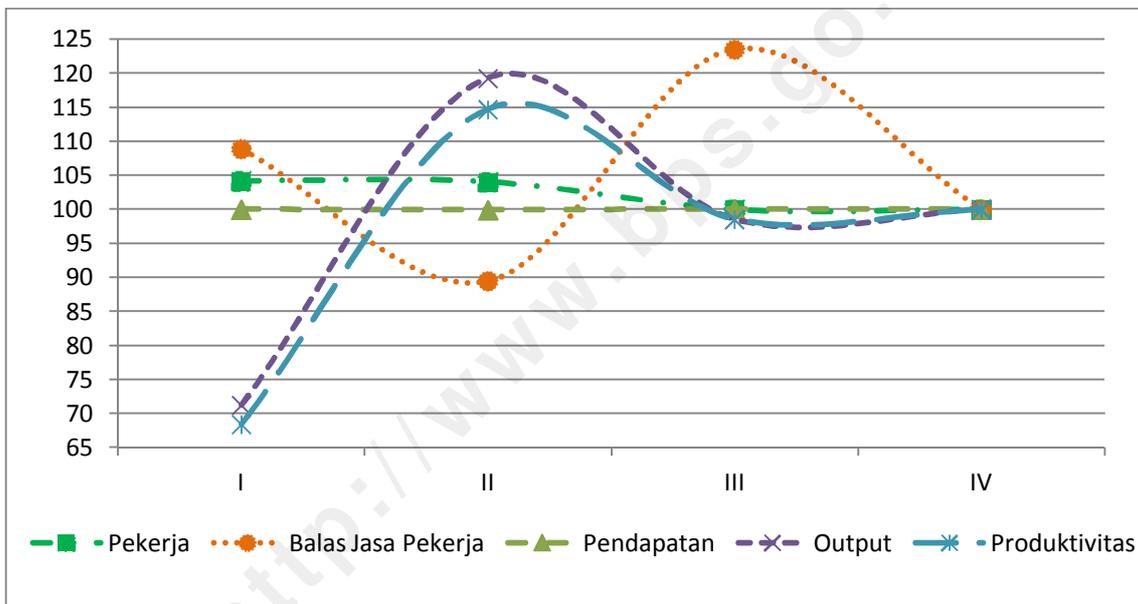
Pendapatan perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta menunjukkan kecenderungan konstan pada setiap triwulannya. Pendapatan perusahaan menunjukkan kecenderungan meningkat pada Triwulan I dan III dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, masing-masing dengan angka indeks 100,02 dan 100,06. Sebaliknya, pendapatan perusahaan menunjukkan kecenderungan yang relatif menurun pada Triwulan II dengan angka indeks 99,92 dan konstan pada Triwulan IV dengan angka indeks 100,00.

Output perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta yaitu durasi iklan (dalam satuan spot). Output ini menggambarkan indikator produksi perusahaan. Output perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta tidak mengalami perubahan yang berarti pada Triwulan III dan IV, masing-masing dengan angka indeks 98,53 dan 100,00. Sementara itu, output perusahaan pada Triwulan I cenderung menurun cukup signifikan dengan angka indeks 71,25 sedangkan pada Triwulan II cenderung meningkat cukup signifikan dengan angka indeks 119,30 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Pada perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta, produktivitas perusahaan relatif konstan pada Triwulan III dan IV dengan angka indeks 98,53 dan 100,00. Kecenderungan kenaikan produktivitas perusahaan yang relatif tinggi terjadi pada Triwulan II dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 114,71. Sebaliknya, produktivitas perusahaan pada Triwulan I cenderung mengalami penurunan yang relatif signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, dengan angka indeks 68,40.

Pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, fenomena positif untuk kenaikan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya tenaga kerja tampak terjadi pada Triwulan II, yaitu meningkat sebesar 14,71 persen.

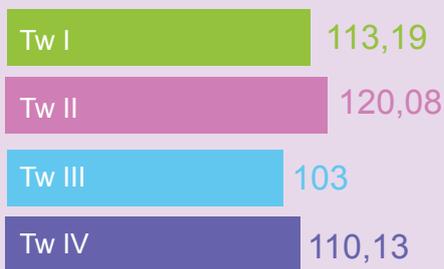
Grafik 3.3.7
Indeks Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Swasta
Atas Dasar Harga Berlaku di 2015



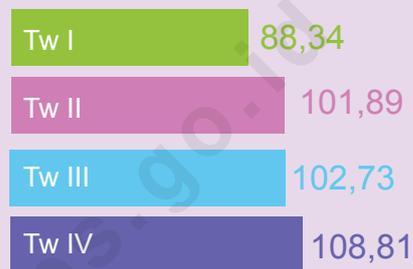
INDIKATOR PRODUKSI LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK TRIWULANAN (PERSEN), 2015



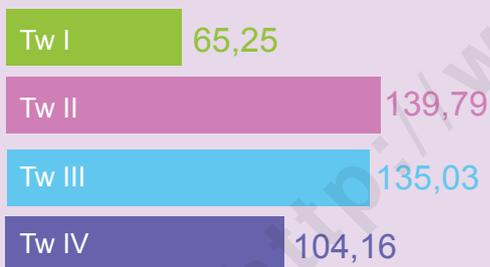
Asuransi



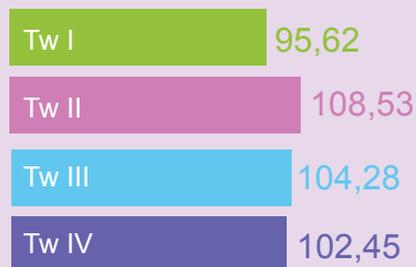
Pegadaian



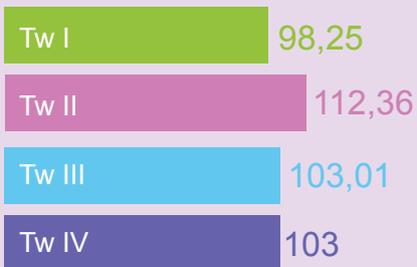
Dana Pensiun



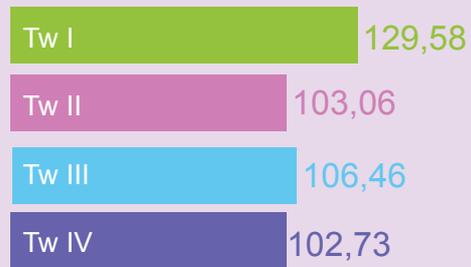
Pembiayaan dan Modal Ventura



Koperasi Simpan Pinjam



Pedagang Valuta Asing

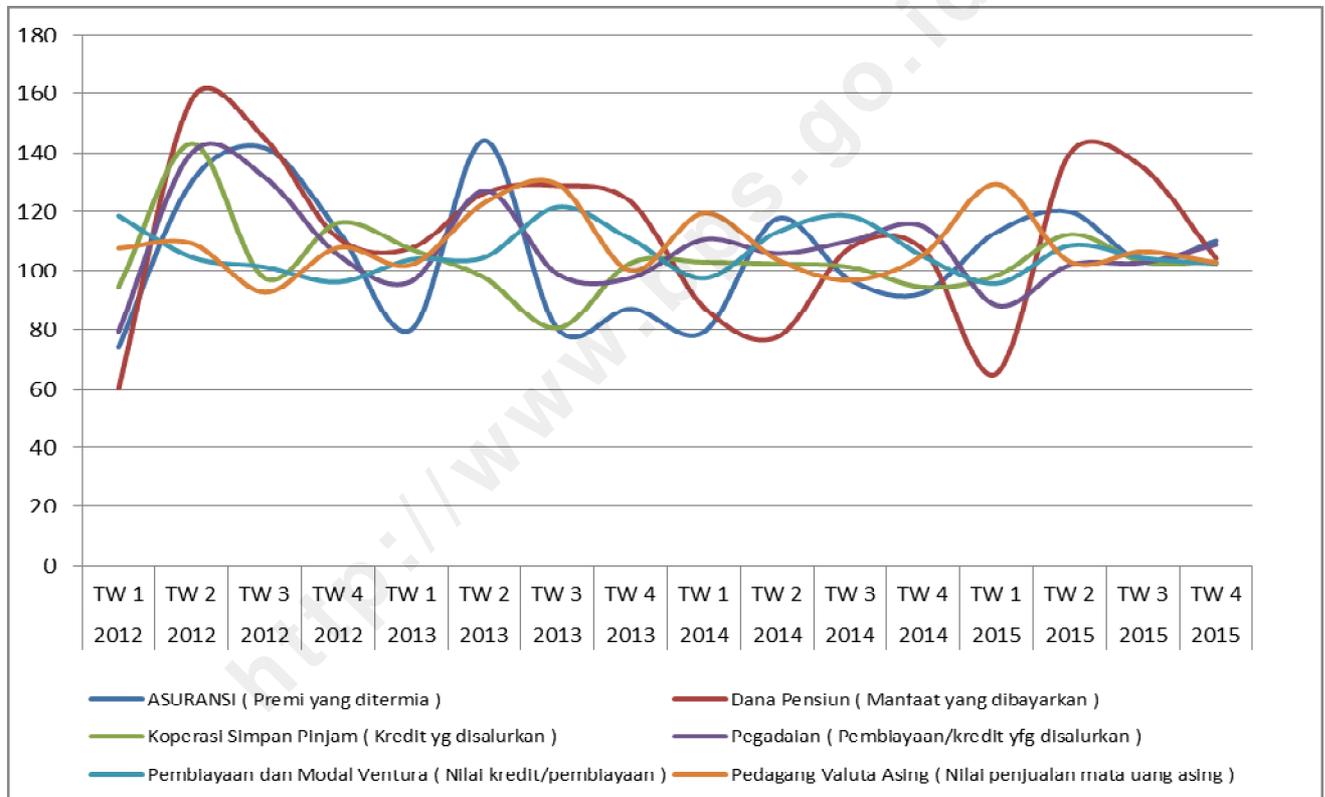


<http://www.bps.go.id>

3.4 LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK

3.4.1 Indikator Produksi Lembaga Keuangan Bukan Bank Tahun 2012 – 2015

Berikut ini diuraikan mengenai kegiatan STKU-K dari tahun 2012-2015 mengenai beberapa indikator usaha dari kegiatan yang dicakup dalam Lembaga Keuangan Bukan Bank, antara lain indikator usaha asuransi yaitu premi yang diterima, terlihat kinerja perusahaan mengalami peningkatan di setiap triwulan II. Peningkatan yang tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 44,18 persen. Sedangkan di setiap triwulan I terjadi penurunan jumlah premi yang diterima kecuali pada tahun 2015 terjadi peningkatan kinerja.



Grafik 3.4.1. Indikator Produksi Lembaga Keuangan Bukan Bank Triwulanan (persen), 2012 – 2015

Kegiatan dana pensiun dengan indikator usaha yaitu besarnya manfaat yang dibayarkan memperlihatkan kinerja yang sangat baik dengan mengalami peningkatan di semua triwulan sepanjang tahun 2012-2015 kecuali di setiap

triwulan I yang mengalami penurunan. Penurunan yang terbesar dialami di tahun 2012 sebesar 39,76 persen.

Indikator usaha yang digunakan pada kegiatan koperasi simpan pinjam adalah kredit yang disalurkan. Kinerja koperasi dari tahun 2012-2015 menunjukkan di setiap triwulan IV mengalami peningkatan kinerja kecuali pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar 5,66 persen.

Kredit yang disalurkan adalah indikator usaha pada kegiatan pegadaian. Kinerja pada usaha ini sangat baik dimana mengalami penurunan hanya di triwulan I tahun 2012 dan 2015 saja sedangkan pada tahun 2014 sepanjang tahun mengalami peningkatan kinerja. Kebalikannya pada tahun 2013 sepanjang tahun mengalami penurunan kinerja hanya di triwulan II saja yang mengalami peningkatan kinerja usaha.

Indikator usaha yang digunakan pada usaha pembiayaan dan modal ventura adalah nilai kredit/pembiayaan. Dari tahun 2012-2015 menunjukkan kinerja perusahaan yang sangat baik ditunjukkan dengan selalu mengalami peningkatan kinerja kecuali di 3 triwulan mengalami penurunan yaitu terjadi di triwulan IV tahun 2012, triwulan I tahun 2014 dan 2015. Peningkatan tertinggi sebesar 21,74 persen terjadi di triwulan III tahun 2013.

Nilai penjualan mata uang asing adalah indikator usaha pada kegiatan pedagang valuta asing. Sama halnya dengan usaha pembiayaan dan modal ventura, dari tahun 2012-2015 menunjukkan kinerja perusahaan yang sangat baik ditunjukkan dengan selalu mengalami peningkatan kinerja kecuali di 3 triwulan mengalami penurunan yaitu terjadi di triwulan IV tahun 2012 dan 2013 dan triwulan III tahun 2014. Penurunan terbesar dialami pada triwulan IV 2012 sebesar 7,30 persen.

3.4.2 Indikator Produksi Lembaga Keuangan Bukan Bank Tahun 2015

Kegiatan STKU-K pada tahun 2015 mencakup tujuh jenis lembaga keuangan bukan bank di seluruh provinsi di Indonesia dengan target sampel sebanyak 427 usaha/perusahaan per triwulan. Alokasi sampel terbanyak adalah usaha koperasi simpan pinjam (32 persen), diikuti dengan pegadaian (16 persen), dana pensiun dan pedagang valuta asing (13 persen), asuransi dan pembiayaan & modal ventura (12 persen), serta penunjang asuransi (2 persen). Sementara itu, rata-rata tingkat respon STKU-K 2015 (74,71 persen) menurun dari tahun 2014 (78,69 persen).

3.4.2.1. Asuransi

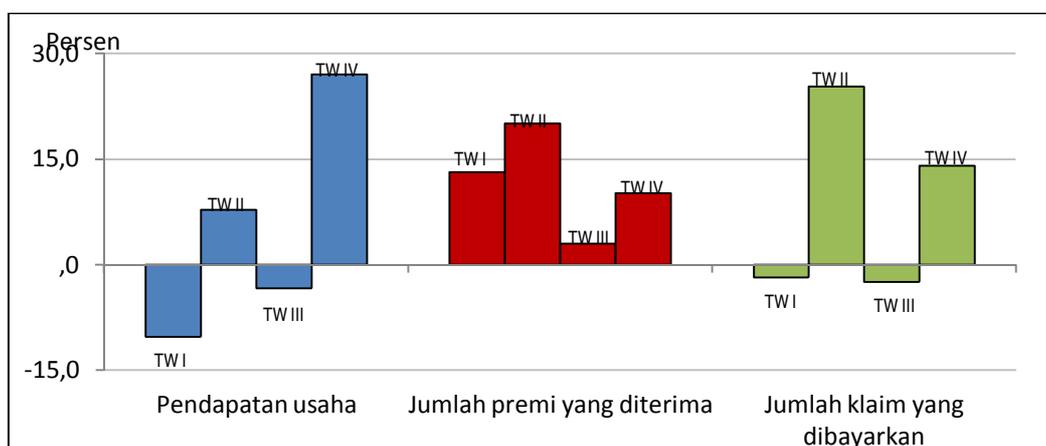
Jumlah pekerja perusahaan asuransi pada tahun 2015 cenderung mengalami penurunan. Meskipun meningkat pada triwulan II sebesar 10,38 persen dibandingkan triwulan I tetapi mengalami penurunan pada dua triwulan berikutnya. Demikian juga balas jasa pekerja cenderung mengalami penurunan, walaupun pada triwulan II mengalami kenaikan cukup tinggi sebesar 48,69 persen, namun pada triwulan IV turun sebesar sebesar 5,61 persen.

Tabel 3.4.2.1.
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Asuransi di Indonesia, 2015

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja	101,38	110,38	93,32	96,45
2.	Balas jasa pekerja	111,31	148,69	103,04	94,39
3.	Pendapatan usaha	89,77	107,83	96,62	127,00
4.	Jumlah peserta asuransi	93,41	99,88	101,24	100,27
5.	Jumlah premi yang diterima	113,19	120,08	103,00	110,13
6.	Jumlah klaim yang dibayarkan	98,19	125,32	97,60	114,07

Dari sisi pendapatan usaha, terlihat bahwa kinerja perusahaan asuransi pada 2015 cukup berfluktuasi, dimana pada triwulan I dan III mengalami penurunan, sedangkan triwulan II dan IV menunjukkan peningkatan pendapatan. Sedangkan jumlah peserta asuransi cenderung mengalami kenaikan meskipun pada triwulan I dan II mengalami penurunan. Hal tersebut sejalan dengan kenaikan jumlah premi yang diterima pada setiap triwulan dengan kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan II sebesar 20,08 persen. Sedangkan jumlah klaim yang dibayarkan cukup berfluktuasi, kenaikan terbesar terjadi pada triwulan II, yaitu sebesar 25,32 persen (Tabel 3.4.2.1).

Grafik 3.4.2.1.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Asuransi di Indonesia, 2015



3.4.2.2. Dana Pensiun

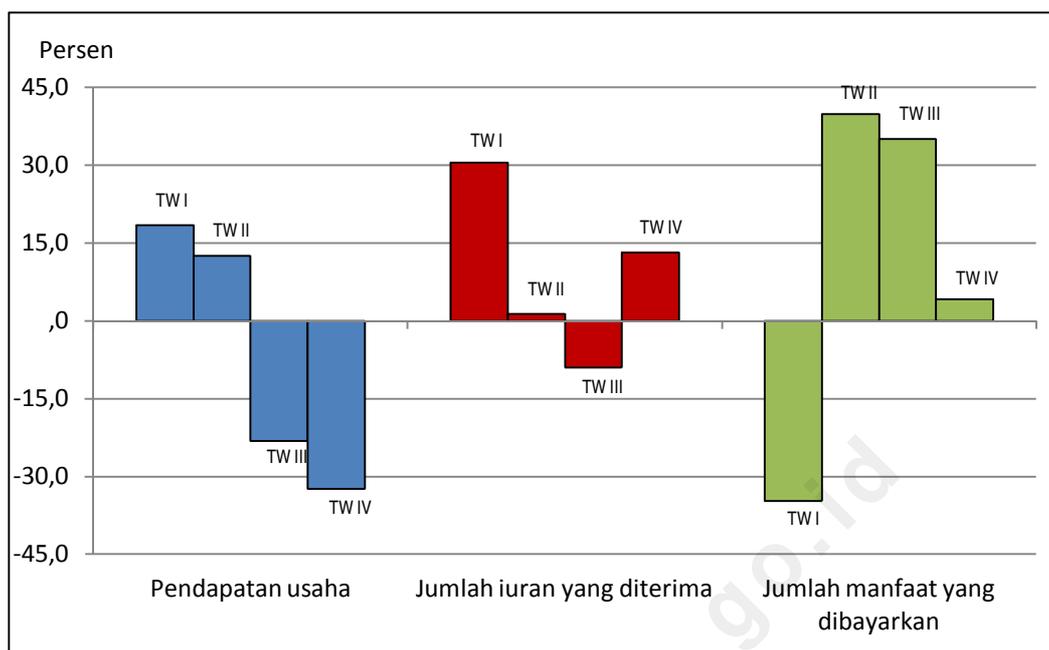
Kinerja perusahaan dana pensiun pada tahun 2015 juga cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat dari pendapatan usaha yang mengalami penurunan cukup tinggi pada triwulan IV yaitu mencapai 32,43 persen. Sementara itu jumlah peserta dan jumlah iuran yang diterima dana pensiun cukup berfluktuasi. Meskipun jumlah peserta pada triwulan I mengalami kenaikan sebesar 24,39 persen tetapi pada triwulan II mengalami penurunan hingga 14,99 persen. Iuran yang diterima, pada triwulan I mengalami kenaikan sebesar 30,47 persen tetapi pada triwulan III mengalami penurunan. Sementara itu jumlah manfaat yang dibayarkan meskipun mengalami penurunan pada triwulan I tetapi pada tiga triwulan berikutnya mengalami kenaikan.

Tabel 3.4.2.2
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Dana Pensiun, 2015

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja	99,74	99,73	95,15	97,65
2.	Balas jasa pekerja	114,05	107,82	104,03	145,80
3.	Pendapatan usaha	118,37	112,47	76,83	67,57
4.	Jumlah peserta dana pension	124,39	85,01	96,68	104,51
5.	Jumlah iuran yang diterima	130,47	101,30	90,98	113,07
6.	Jumlah manfaat yang dibayarkan	65,25	139,79	135,03	104,16

Jumlah pekerja perusahaan dana pensiun menurun secara moderat setiap triwulan dengan penurunan terbesar terjadi pada triwulan III sebesar 4,85 persen. Sementara dari sisi balas jasa pekerja, upah yang dibayarkan ke pegawai justru meningkat dengan peningkatan tertinggi pada triwulan IV, yaitu sebesar 45,80 persen.

Grafik 3.4.2.2
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Dana Pensiun
di Indonesia, 2015



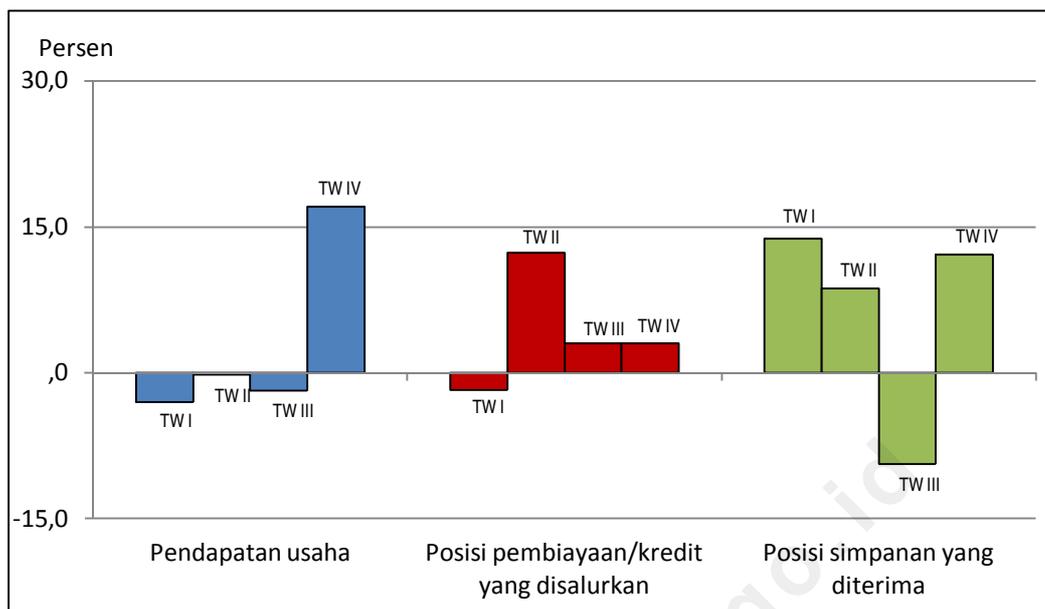
3.4.2.3. Koperasi Simpan Pinjam

Jumlah pekerja koperasi simpan pinjam pada 2015 mengalami kenaikan di triwulan II dan III, masing-masing sebesar 0,18 persen dan 4,51 persen, dibanding triwulan sebelumnya. Kondisi yang hampir sama terjadi pada balas jasa pekerja dimana mengalami kenaikan di triwulan II dan triwulan selanjutnya.

Tabel 3.4.2.3.
Indeks Indikator Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, 2015

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	99,03	100,18	104,51	92,56
2.	Balas jasa pekerja	95,64	109,41	101,26	102,79
3.	Pendapatan usaha	97,02	99,84	98,14	117,10
4.	Jumlah anggota (orang)	98,43	100,61	97,02	104,42
5.	Posisi pembiayaan/kredit yang disalurkan	98,25	112,36	103,01	103,00
6.	Posisi simpanan yang diterima	113,78	108,67	90,60	112,17

Grafik 3.4.2.3.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia, 2015



Kinerja koperasi simpan pinjam pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang baik jika dilihat dari sisi pembiayaan/kredit yang disalurkan. Pada triwulan II pembiayaan/kredit naik 12,36 persen, namun di dua triwulan berikutnya mengalami kenaikan yang stagnan masing-masing 3,01 persen dan 3,00 persen. Sedangkan pada simpanan yang diterima, kenaikan terus terjadi di sepanjang tahun, dengan kenaikan tertinggi terjadi pada triwulan I, yakni sebesar 13,78 persen. Sementara itu pendapatan usaha mengalami penurunan di tiga triwulan pertama masing-masing 2,98 persen, 0,16 persen dan 1,86 persen di triwulan III, kemudian mengalami kenaikan 17,10 persen di triwulan IV.

3.4.2.4. Pegadaian

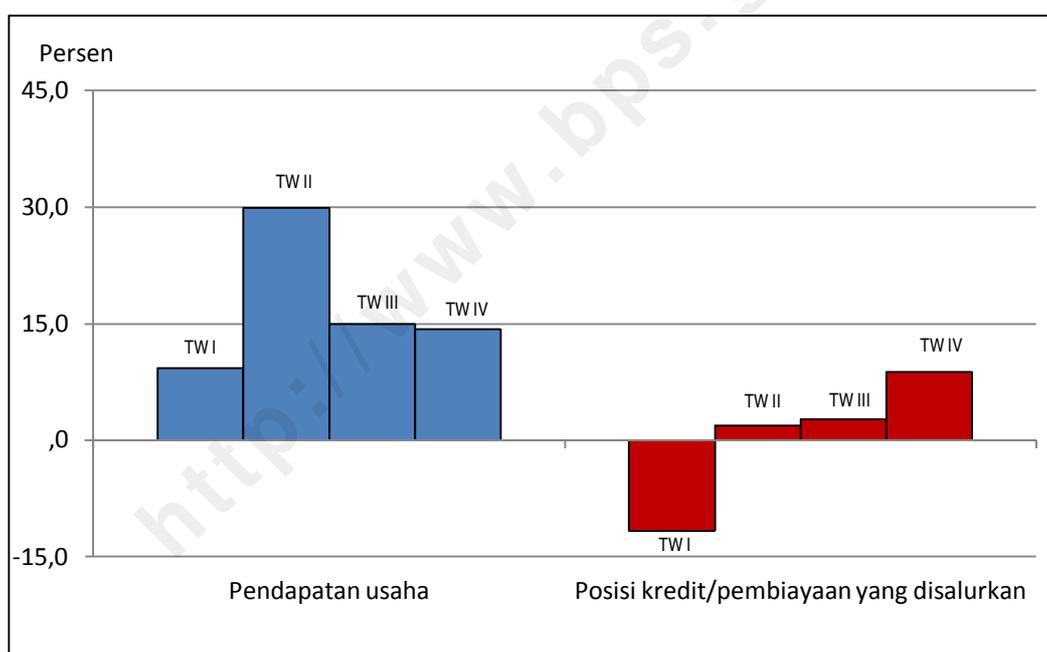
Kinerja perusahaan pegadaian, dilihat dari pendapatan usaha, selama 2015 menunjukkan *performance* yang baik dimana setiap triwulannya mengalami peningkatan. Pada triwulan I pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar 9,28 persen, triwulan II sebesar 29,92 persen, yang merupakan kenaikan tertinggi. Selanjutnya, pada triwulan III pendapatan pegadaian mencatatkan kenaikan sebesar 14,94 persen dan pada triwulan IV sebesar 14,29 persen (Tabel 3.4.2.4).

Indikator jumlah nasabah dan posisi kredit yang disalurkan selama 2015 juga cenderung mengalami kenaikan di tiap triwulannya. Kenaikan tertinggi pada indikator jumlah nasabah terjadi pada triwulan I, yaitu naik sebesar 12,89 persen. Sementara itu, kenaikan tertinggi pada indikator posisi kredit yang disalurkan terjadi pada triwulan IV, yakni naik sebesar 8,81 persen.

**Tabel 3.4.2.4.
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Pegadaian di Indonesia, 2015**

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah Pekerja (orang)	96,25	94,20	97,14	99,11
2.	Balas Jasa Pekerja	100,52	103,07	122,61	103,30
3.	Pendapatan Usaha	109,28	129,92	114,94	114,29
4.	Jumlah nasabah Pegadaian (orang)	112,89	100,60	102,84	112,03
5.	Posisi kredit/pembiayaan yang disalurkan	88,34	101,89	102,73	108,81

**Grafik 3.4.2.4.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Pegadaian di Indonesia, 2015**



3.4.2.5. Pedagang Valuta Asing

Pada tabel 3.4.2.5 terlihat bahwa jumlah pekerja pedagang valuta asing pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang berbeda-beda tiap triwulannya. Kenaikan jumlah pekerja tertinggi terjadi pada triwulan III, yakni sebesar 17,11 persen, sedangkan kenaikan terkecil terjadi pada triwulan I, yakni sebesar 0,56 persen. Sama halnya dengan jumlah pekerja, balas jasa pekerja juga menunjukkan kenaikan tiap triwulannya, kecuali pada triwulan IV yang mengalami penurunan tipis sebesar 0,91 persen.

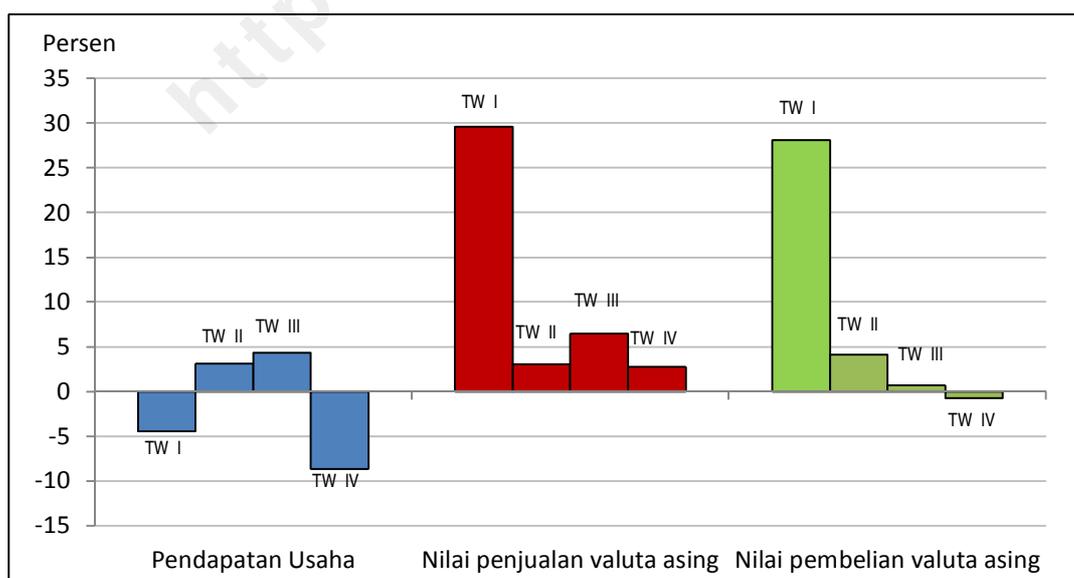
Tabel 3.4.2.5
Indeks Indikator Usaha Pedagang Valuta Asing di Indonesia 2015

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	100,56	101,19	117,11	101,15
2.	Balas jasa pekerja	100,29	104,51	109,38	99,09
3.	Pendapatan usaha	95,55	103,09	104,36	91,32
4.	Nilai penjualan valuta asing	129,58	103,06	106,46	102,73
5.	Nilai pembelian valuta asing	128,09	104,14	100,69	99,26

Kinerja perusahaan pedagang valuta asing dilihat dari sisi pendapatan usaha, menunjukkan terjadinya penurunan pada triwulan awal, kemudian naik di dua dan tiga, selanjutnya kembali turun di triwulan akhir. Penurunan terbesar terjadi pada IV sebesar 8,68 persen. Sementara itu, kenaikan terbesar terjadi pada triwulan III sebesar 4,36 persen.

Nilai penjualan dan pembelian valuta asing pada tahun 2015 menunjukkan pola yang hampir sama, yakni mengalami kenaikan pada semua triwulannya. Hanya saja untuk nilai pembelian pada triwulan IV mengalami penurunan tipis, sebesar 0,74 persen. Nilai penjualan dan pembelian valuta asing sama-sama mengalami kenaikan teringginya di triwulan I, masing-masing sebesar 29,58 persen dan 28,09 persen.

Grafik 3.4.2.5
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Pedagang Valuta Asing di Indonesia, 2015



3.4.2.6. Pembiayaan dan Modal Ventura

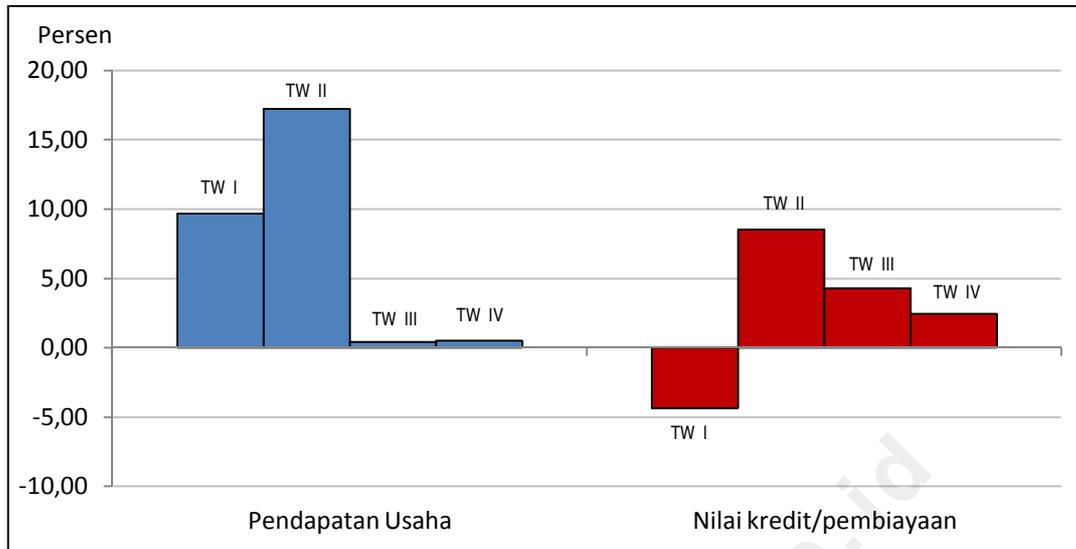
Indeks indikator usaha perusahaan pembiayaan dan modal ventura ditunjukkan tabel 3.4.2.6. Dari sisi jumlah pekerja, perusahaan pembiayaan dan modal ventura menunjukkan penurunan tipis tiap triwulannya. Jumlah pekerja perusahaan pembiayaan dan modal ventura pada triwulan I turun 0,09 persen, triwulan II turun 0,47 persen, triwulan III turun 0,25 persen, dan triwulan IV turun 0,08 persen. Berbeda dengan jumlah pekerja, balas jasa pekerja menunjukkan adanya kenaikan pada triwulan I, namun turun pada triwulan II dan kembali mengalami kenaikan pada dua triwulan berikutnya.

Tabel 3.4.2.6
Indeks Indikator Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura
di Indonesia, 2015

No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	99,91	99,53	99,75	99,92
2.	Balas jasa pekerja	102,08	96,25	106,02	100,84
3.	Pendapatan usaha	109,69	117,22	100,41	100,50
4.	Nilai kredit/pembiayaan	95,62	108,53	104,28	102,45

Pendapatan usaha perusahaan pembiayaan dan modal ventura pada tahun 2015 menunjukkan kenaikan pada tiap triwulannya. Pada triwulan I pendapatan usaha perusahaan pembiayaan naik sebesar 9,69 persen, triwulan II naik 17,22 persen, triwulan III naik tipis 0,41 persen, begitu juga triwulan IV naik tipis sebesar 0,50 persen.

Grafik 3.4.2.6
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Modal Ventura di Indonesia, 2015



Nilai kredit/pembiayaan yang disalurkan perusahaan pembiayaan dan modal ventura pada tahun 2015 cenderung fluktuatif dibandingkan dengan pendapatan usahanya. Pada triwulan I nilai kredit/pembiayaan menunjukkan adanya penurunan sebesar 4,38 persen. Namun pada tiga triwulan berikutnya mengalami kenaikan yang beragam. Pada triwulan II nilai kredit/pembiayaan naik sebesar 8,53 persen, triwulan III naik 4,28 persen, dan triwulan IV naik sebesar 2,45 persen.

3.4.2.7. Jasa Penunjang Asuransi (Aktuaris dan Adjuster)

Dilihat dari jumlah klaim yang dinilai, kinerja perusahaan Adjuster selama tahun 2015 berfluktuasi di setiap triwulan. Pada triwulan II, jumlah klaim yang dinilai meningkat cukup tinggi sebesar 62,50 persen (dari 48 menjadi 78 klaim) dan triwulan III meningkat hanya 10,26 persen (dari 78 menjadi 86 klaim). Sedangkan pada triwulan I mengalami penurunan yang cukup tajam yaitu 46,07 persen (dari 89 menjadi 48 klaim) dan triwulan IV turun sebesar 6,98 persen (dari 86 menjadi 80 klaim).

Tabel 3.4.2.7.
Indeks Indikator Usaha Jasa Penunjang Asuransi di Indonesia, 2015

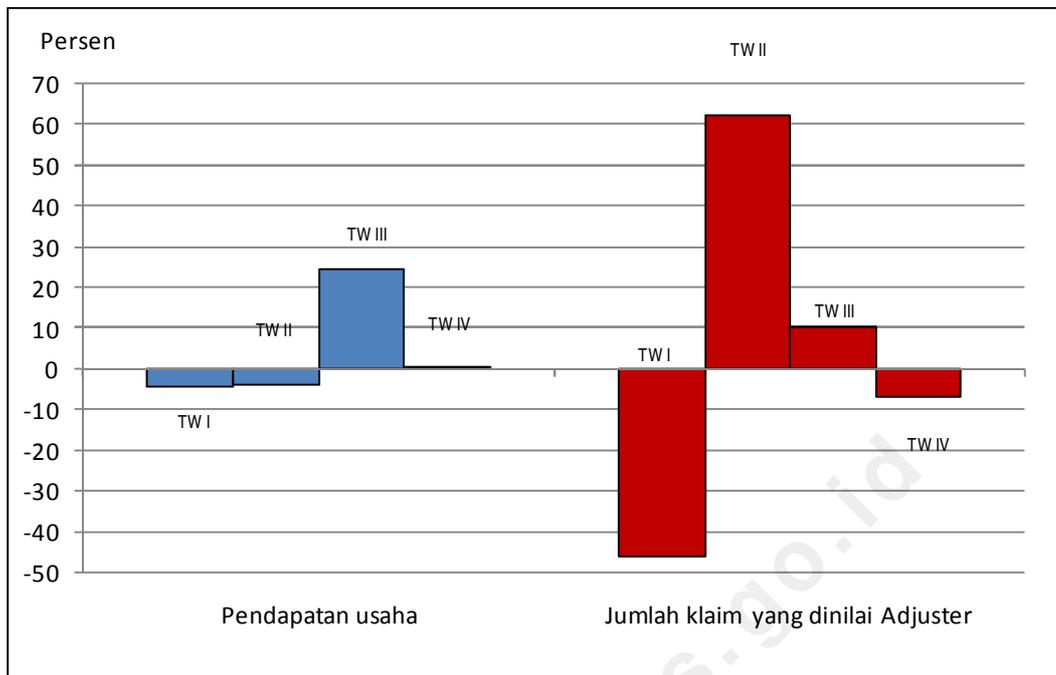
No	Indikator	Triwulan			
		I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Jumlah pekerja (orang)	100,00	104,17	96,00	95,83
2.	Balas jasa pekerja	95,80	101,70	101,91	90,38
3.	Pendapatan usaha	95,70	96,16	124,36	100,49
4.	Jumlah klaim yang dinilai Adjuster	53,93	162,50	110,26	93,02
5.	Jumlah perusahaan yang dilayani Aktuaris	100,00	100,00	100,00	100,00

Kedua perusahaan penunjang asuransi tersebut memulai tahun 2015 dengan penurunan jumlah pendapatan secara moderat pada triwulan I dan II sebesar 4,30 dan 3,84 persen. Pada triwulan berikutnya mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi terjadi pada triwulan III sebesar 24,36 persen dan triwulan IV yang naik tipis sebesar 0,49 persen pada triwulan IV.

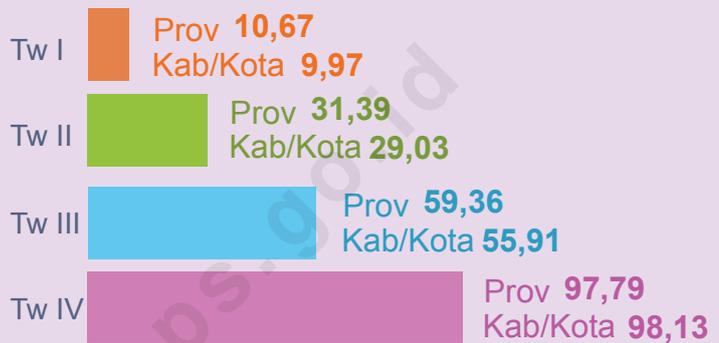
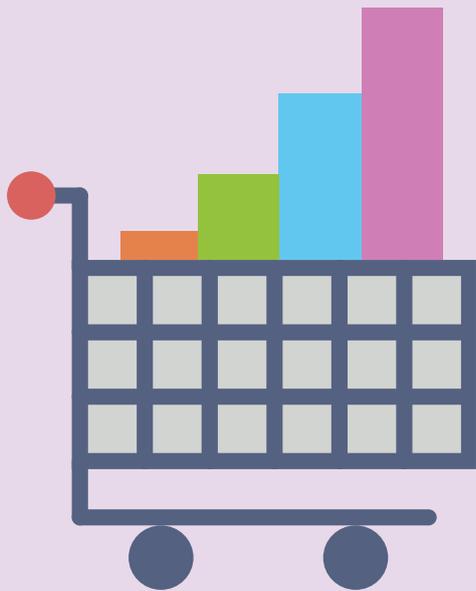
Dari sisi jumlah pekerja pada awal tahun 2015 tidak mengalami perubahan dibanding dengan triwulan IV tahun 2014, dan hanya mengalami peningkatan yang tipis pada triwulan II sebesar 4,17 persen. Sedangkan pada dua triwulan sisanya mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,00 persen untuk triwulan III dan 4,17 persen pada triwulan IV.

Demikian pula dengan balas jasa pekerja yang sejalan dengan pendapatan usaha, mengalami penurunan pada triwulan I sebesar 4,20 persen, dan mengalami kenaikan tipis pada triwulan II dan III sebesar 1,70 dan 1,91 persen. Pada triwulan IV balas jasa pekerja mengalami penurunan kembali yang besarnya mencapai 9,62 persen.

Grafik 3.4.2.7.
Perkembangan Triwulanan Indikator Usaha Jasa Penunjang Asuransi
di Indonesia, 2015

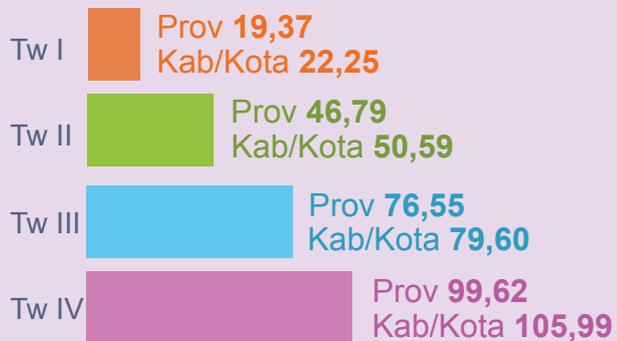


TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN TRIWULANAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (PERSEN), 2015



BELANJA

PENDAPATAN



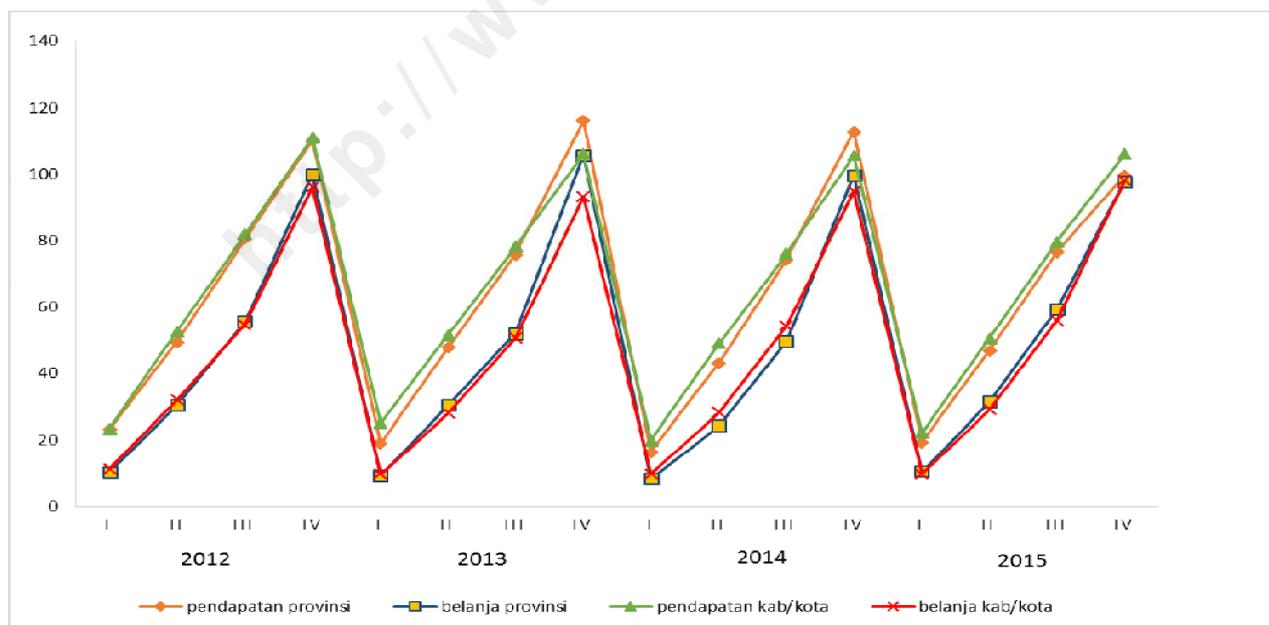
<http://www.bps.go.id>

3.5 KEUANGAN PEMERINTAH

Survei Triwulanan Kegiatan Usaha untuk Kategori O (STKU-O), merupakan survei yang mencatat kinerja keuangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada tahun 2015, survei ini mencakup 194 kantor pemerintahan yang terdiri dari 33 pemerintah provinsi dan 161 pemerintah kabupaten/kota dan diharapkan dapat menggambarkan kinerja pemerintah daerah dari sisi pendapatan dan belanjanya.

3.5.1 Perkembangan Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2012-2015

Tingkat penyerapan pendapatan dan belanja kumulatif triwulanan 2012-2015 cenderung mempunyai pola yang sama dimana mempunyai trend yang positif pada tiap tahunnya. Triwulan I mempunyai penyerapan kumulatif yang terkecil dan triwulan IV mempunyai penyerapan kumulatif yang terbesar. Apabila dilihat dari grafik, tiap tahunnya realisasi penyerapan pendapatan selalu mempunyai nilai yang lebih besar bila di dibandingkan dengan tingkat penyerapan belanja daerah. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia cenderung mempunyai rancangan anggaran surplus.



Grafik 3.5.1. Tingkat Penyerapan Pendapatan dan Belanja Kumulatif Triwulanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (persen), 2012-2015

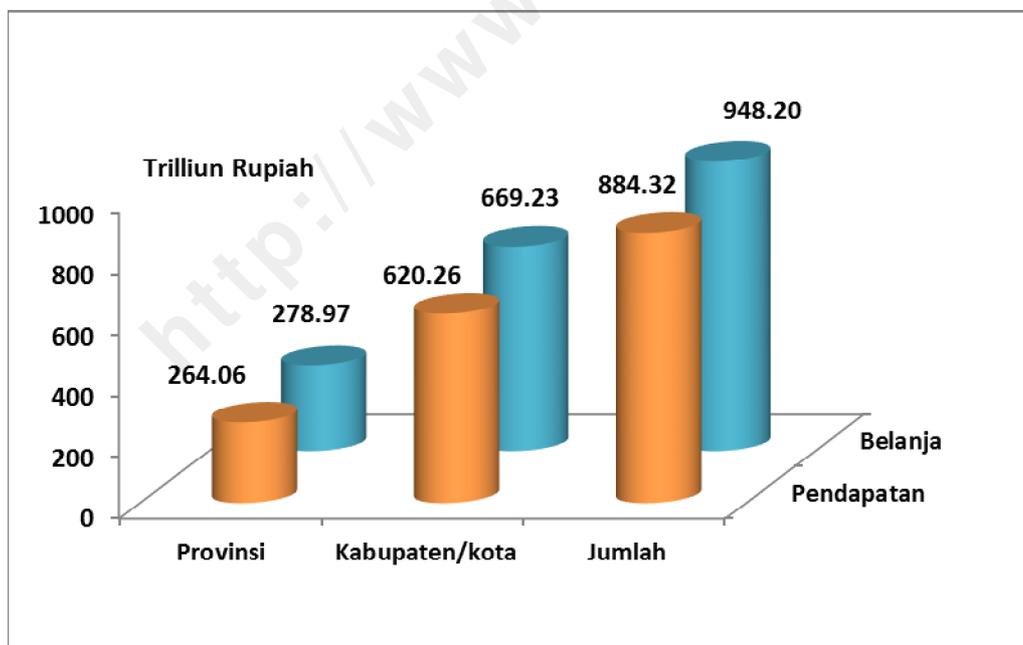
3.5.2 Kondisi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Tahun 2015

Tingkat respon STKU-O secara tahunan tercatat kurang menggembirakan terutama di triwulan akhir. Hal ini terlihat dari tingkat respon survei setiap triwulanan dimana masing-masing sebesar 81,96 persen pada triwulan I; 76,80 persen pada triwulan II; 66,49 persen pada triwulan III dan sebesar 43,81 persen pada triwulan IV. Di tahun 2014, tingkat respon STKU-O masih mencapai 87,63 persen pada triwulan III dan sebesar 62,88 persen pada triwulan IV.

3.5.2.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Struktur APBD secara baku terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pada laporan ini, struktur APBD dikelompokkan dalam rincian-rincian tersebut, dengan alasan kebutuhan terhadap analisis datanya.

Grafik 3.5.2.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia, 2015



Grafik 3.5.1 menunjukkan besaran APBD provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2015 dalam triliun rupiah. Besaran APBD kabupaten/kota masih mendominasi dalam anggaran daerah secara nasional yaitu sebesar 620,26 triliun rupiah atau 70,14 persen dalam sisi pendapatan daerah, sedangkan dalam sisi

belanja daerah, APBD kabupaten/kota mempunyai nilai sebesar 669,23 triliun rupiah atau 70,58 persen dari total anggaran. Namun bila dibandingkan dengan jumlah pemerintahannya dimana provinsi terdiri dari 33 pemerintahan dan kabupaten/kota terdiri dari 491 pemerintahan, kontribusi anggaran provinsi mempunyai nilai yang cukup signifikan yaitu sebesar 264,06 triliun rupiah atau 29,86 persen dalam sisi pendapatan dan sebesar 278,97 triliun rupiah atau 29,42 persen dalam sisi belanja daerah terhadap total anggaran daerah secara nasional.

Pada tahun 2015, anggaran pendapatan pemerintahan provinsi mencapai 264,06 triliun rupiah dengan anggaran belanja sebesar 278,97 triliun rupiah. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi defisit anggaran dalam periode tahun 2015. Hal yang sama juga terjadi pada pemerintah kabupaten/kota, yang mempunyai anggaran belanja lebih besar dari anggaran pendapatan daerahnya. Kondisi defisit anggaran pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota bukan berarti seluruh provinsi dan kabupaten/kota merencanakan defisit pada anggarannya, banyak pemerintah daerah merencanakan anggaran yang berimbang bahkan anggaran surplus.

Pada pemerintah provinsi, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan anggaran pendapatan daerah yaitu sebesar 136,36 triliun rupiah atau sebesar 51,64 persen terhadap total anggaran pendapatan provinsi. Sedangkan pada pemerintahan kabupaten/kota pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dengan kontribusi sebesar 67,53 persen terhadap total anggaran pendapatan kabupaten/kota.

Tabel 3.5.2.1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/ Kota di Indonesia (triliun rupiah), 2015

Uraian	Anggaran		
	Provinsi	Kab/ Kota	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pendapatan Daerah	264,06	620,26	884,32
a. Pendapatan Asli Daerah	136,36	78,67	215,03
1) Pajak Daerah	120,33	37,30	157,63
2) Retribusi Daerah	1,73	9,64	11,37
3) BUMD	3,49	3,54	7,02
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	10,81	28,19	39,01
b. Dana Perimbangan	73,29	418,86	492,16
c. Lain-lain pendapatan	54,41	122,73	177,13
2. Belanja Daerah	278,97	669,23	948,20
a. Belanja Pegawai	51,79	321,35	373,14
b. Belanja Barang Jasa	62,57	136,04	198,61
c. Belanja Modal	57,94	155,47	213,42
d. Belanja Bantuan Sosial	3,40	4,08	7,48
e. Belanja lainnya	103,26	52,29	155,56

Dalam anggaran belanja daerah, pengeluaran pemerintah provinsi didominasi oleh belanja lainnya yaitu sebesar 103,26 triliun rupiah atau sebesar 37,02 persen dari total anggaran. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota, belanja pegawai mempunyai kontribusi yang sangat besar yaitu sebesar 321,35 triliun rupiah atau sebesar 48,02 persen. Belanja bantuan sosial adalah belanja yang memiliki kontribusi paling kecil dalam tahun anggaran 2015, baik untuk pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

3.5.2.2 Pendapatan Triwulanan Daerah

Realisasi tingkat penyerapan menunjukkan nilai yang berhasil diserap oleh pemerintah daerah dari anggaran tahun berjalan. Pada tahun 2015, secara umum pemerintah kabupaten/kota memiliki tingkat penyerapan pendapatan kumulatif yang lebih tinggi daripada pemerintah provinsi. Pada triwulan IV, pemerintah

provinsi menyerap sebesar 99,62 persen dan pemerintah Kabupaten/Kota mampu mencapai 105,99 persen.

Dana perimbangan adalah jenis pendapatan yang mempunyai kontribusi besar dalam tingkat penyerapan pendapatan pemerintah provinsi, yaitu sebesar 28,18 persen di triwulan I; 58,68 persen pada triwulan II; 83,09 persen di triwulan III dan 99,58 persen di triwulan IV. Seperti halnya dengan pemerintah provinsi, tingkat penyerapan pendapatan pemerintah kabupaten/kota juga masih didominasi dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan pada setiap triwulannya.

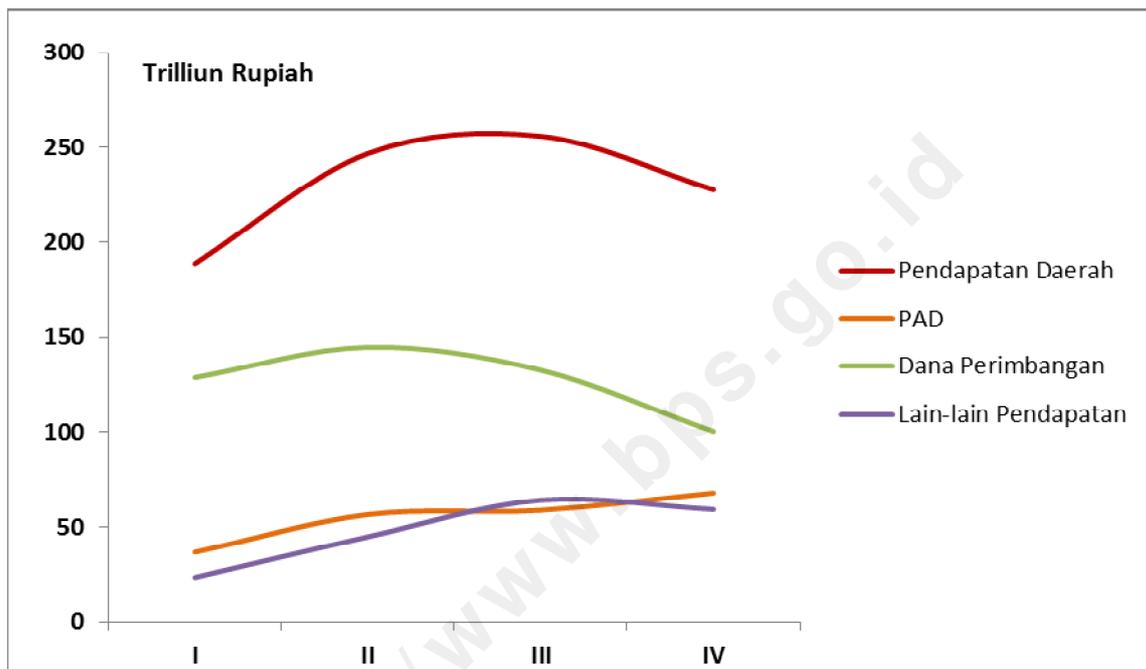
Tabel 3.5.2.2.1
Tingkat Penyerapan Pendapatan Kumulatif Triwulanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2015

Jenis Pendapatan (1)	Triwulan			
	I (2)	II (3)	III (4)	IV (5)
Provinsi				
1. Pendapatan Daerah	19,37	46,79	76,55	99,62
a. Pendapatan Asli Daerah	17,41	43,37	69,81	100,22
b. Dana Perimbangan	28,18	58,68	83,09	99,58
c. Lain-lain Pendapatan	10,75	35,93	75,50	99,08
Kabupaten/ Kota				
2. Pendapatan Daerah	22,25	50,59	79,60	105,99
a. Pendapatan Asli Daerah	16,98	44,72	74,14	108,99
b. Dana Perimbangan	25,77	55,00	82,36	103,40
c. Lain-lain Pendapatan	14,30	39,87	74,71	112,68

Tingkat penyerapan pendapatan terkecil tiap triwulannya pada pemerintah provinsi adalah lain-lain pendapatan kecuali pada triwulan III dimana pendapatan asli daerah berada pada posisi terbawah dalam tingkat penyerapan. Lain-lain pendapatan memiliki tingkat penyerapan sebesar 10,75 persen pada triwulan I; 35,93 persen pada triwulan II; 75,50 persen pada triwulan III; dan sebesar 99,08 persen pada triwulan IV. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota lain-lain

pendapatan mempunyai tingkat penyerapan terkecil sebesar 14,30 persen pada triwulan I; 39,87 persen pada triwulan II; dan 74,71 persen pada triwulan III, sedangkan pada triwulan IV meningkat tajam menjadi 112,68 persen.

Grafik 3.5.2.2
Perkiraan Penyerapan Pendapatan Triwulanan Pemerintah Daerah di
Indonesia, 2015



Selanjutnya Grafik 3.5.2.2 menunjukkan besarnya perkiraan pendapatan triwulanan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota pada periode tahun 2015. Secara total/nasional, perkiraan pendapatan pemerintah daerah pada triwulan I sebesar 188,94 triliun rupiah, naik menjadi 246,64 triliun rupiah pada triwulan II, pada triwulan III mengalami kenaikan menjadi 255,80 triliun rupiah, dan menjadi 227,71 triliun rupiah pada triwulan IV.

Dana perimbangan merupakan jenis pendapatan yang mempunyai nilai perkiraan pendapatan paling tinggi dan pola pendapatan yang cukup berfluktuatif dibandingkan dengan komponen penyusun pendapatan lainnya, yaitu sebesar 128,61 triliun rupiah pada triwulan I; 144,79 triliun rupiah pada triwulan II; 132,49 triliun rupiah pada triwulan III dan sebesar 100,20 triliun rupiah pada triwulan IV. Sedangkan perkiraan pendapatan untuk dua jenis lainnya cenderung meningkat setiap triwulannya.

Tabel 3.5.2.2.2**Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Triwulanan Pemerintah Daerah Menurut Jenis Pendapatan (persen), 2015**

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Quarter to Quarter (Q to Q)				
Pendapatan Daerah	-18,20	30,54	3,71	-10,98
a. Pendapatan Asli Daerah	-47,34	53,64	3,96	15,37
b. Dana Perimbangan	14,68	12,59	-8,49	-24,37
c. Lain-lain Pendapatan	-51,93	92,76	42,59	-7,57

Tingkat pertumbuhan pendapatan menunjukkan perubahan pendapatan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan pendapatan triwulanan (Q to Q) mempunyai nilai yang sangat fluktuatif, baik pada PAD, dana perimbangan ataupun lain-lain pendapatan. Pada triwulan I, pendapatan daerah mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar -18,20 persen yang artinya pendapatan daerah triwulan I tahun 2015 mempunyai nilai lebih kecil 18,20 persen bila dibandingkan dengan pendapatan pada triwulan IV tahun 2014. Pada triwulan II, pendapatan daerah mempunyai tingkat pertumbuhan sebesar 30,54 persen dan sebesar 3,71 persen pada triwulan III. Sedangkan triwulan IV, pendapatan daerah tumbuh sebesar -10,98 persen yang artinya pendapatan daerah pada triwulan IV 10,98 persen lebih kecil dari pendapatan daerah pada triwulan III. Tingkat pertumbuhan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5.2.2.2.

3.5.2.3 Belanja Triwulanan Daerah

Belanja daerah adalah jenis pengeluaran pemerintah yang secara rutin dikeluarkan untuk melaksanakan tugas pemerintahannya. Tabel 3.5.2.3.1 menunjukkan bahwa pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mempunyai tingkat penyerapan belanja kumulatif triwulan IV di bawah 100 persen yaitu sebesar 97,79 persen dan 98,13 persen. Hal ini dapat diartikan bahwa realisasi pengeluaran belanja pemerintah provinsi lebih kecil 2,21 persen dan pemerintah kabupaten/kota lebih kecil 1,87 persen dari anggarannya.

Tabel 3.5.2.3.1**Tingkat Penyerapan Belanja Kumulatif Triwulanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota Menurut Jenis Belanja (persen), 2015**

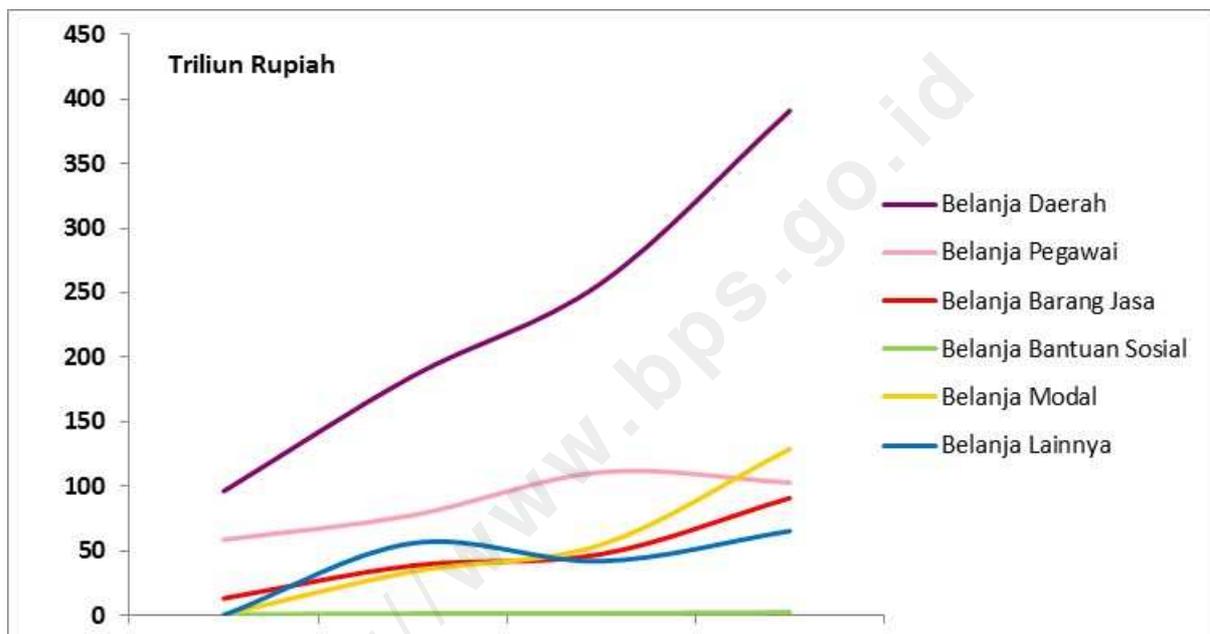
Jenis Belanja (1)	Triwulan			
	I (2)	II (3)	III (4)	IV (5)
Provinsi				
1. Belanja Daerah	10,67	31,39	59,36	97,79
a. Belanja Pegawai	6,08	12,84	22,40	31,18
b. Belanja Bantuan Sosial	19,79	32,81	66,42	97,04
c. Belanja Barang Jasa	5,23	24,64	49,60	97,03
d. Belanja Modal	5,50	21,83	53,95	99,64
e. Belanja Lainnya	13,37	38,32	65,02	98,43
Kabupaten/ Kota				
2. Belanja Daerah	9,97	29,03	55,91	98,13
a. Belanja Pegawai	13,00	30,78	56,27	79,97
b. Belanja Bantuan Sosial	5,81	30,67	46,94	81,44
c. Belanja Barang Jasa	7,36	26,84	50,32	95,47
d. Belanja Modal	2,30	14,25	37,57	103,52
e. Belanja Lainnya	5,60	31,90	59,61	118,86

Dilihat dari kontribusi masing-masing rincian belanja, tingkat penyerapan belanja pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mempunyai pola tidak yang sama. Pada pemerintah provinsi, belanja bantuan sosial mendominasi penyerapan belanja pada triwulan I yaitu sebesar 19,79 persen; triwulan IV belanja modal mempunyai tingkat penyerapan belanja tertinggi yaitu sebesar 99,64 persen. Sedangkan pada pemerintah kabupaten/kota, belanja pegawai cenderung mendominasi dimana menyerap sebesar 13,00 persen pada triwulan I; 30,78 persen pada triwulan II; 56,27 persen pada triwulan III; dan 79,97 persen pada triwulan IV.

Belanja pegawai merupakan jenis belanja yang cenderung mempunyai tingkat penyerapan terkecil pada tiap triwulannya untuk pemerintah provinsi. Pada triwulan I pemerintah provinsi mampu menyerap sebesar 6,08 persen; 12,84 persen untuk triwulan II; 22,40 persen untuk triwulan III dan 31,18 persen untuk triwulan IV. Belanja modal mempunyai tingkat penyerapan yang cukup rendah untuk pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan belanja modal merupakan

belanja yang memerlukan perencanaan cukup panjang dan pelaksanaannya memerlukan prosedur-prosedur khusus seperti pengadaan, lelang dan lain-lainnya. Belanja modal mampu menyerap sebesar 2,30 persen pada triwulan I; 14,25 persen pada triwulan II; 35,57 persen pada triwulan III; dan 103,52 persen pada triwulan IV.

Grafik 3.5.2.3
Perkiraan Penyerapan Belanja Triwulanan Pemerintah Daerah di
Indonesia, 2015



Dalam hal besarnya nilai penyerapan belanja pemerintah daerah setiap triwulannya, terlihat bahwa penyerapan cenderung meningkat tajam pada triwulan IV. Belanja pegawai menjadi komponen yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pengeluaran belanja daerah sedangkan belanja bantuan sosial adalah belanja yang mempunyai kontribusi terkecil dalam perkiraan penyerapannya. Pada triwulan I, belanja bantuan sosial mempunyai perkiraan penyerapan sebesar 0,91 triliun rupiah; 1,46 trilliun rupiah pada triwulan II; 1,81 trilliun rupiah pada triwulan III; dan 2,45 trilliun rupiah pada triwulan IV.

Tabel 3.5.2.3.2**Tingkat Pertumbuhan Belanja Pemerintah Daerah Menurut Jenis Belanja (persen), 2015**

Uraian	Triwulan			
	I	II	III	IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Quarter to Quarter (Q to Q)				
Belanja Daerah	-73,51	92,22	38,88	51,90
a. Belanja Pegawai	-43,07	32,32	43,00	-7,33
b. Belanja Barang Jasa	-84,24	190,74	23,09	91,55
c. Belanja Bantuan Sosial	-69,71	60,01	24,03	35,49
d. Belanja Modal	-93,99	314,16	95,70	135,14

Sama halnya dengan pendapatan pemerintah, pengeluaran belanja pemerintah juga menunjukkan pertumbuhan tiap triwulannya. Pertumbuhan triwulanan (Q to Q) memiliki nilai yang fluktuatif, dimana triwulan I mempunyai nilai sebesar -73,51 persen; naik menjadi 92,22 persen pada triwulan II; 38,88 persen pada triwulan III dan tumbuh cukup signifikan pada triwulan IV yaitu sebesar 51,90 persen, yang artinya belanja daerah triwulan IV lebih besar 51,90 persen dari belanja daerah untuk triwulan III. Pada tahun 2015 terjadi penghematan anggaran untuk kementerian dan lembaga yang mengakibatkan turunnya tingkat pertumbuhan belanja pegawai pemerintah daerah di triwulan IV. Tingkat pertumbuhan belanja daerah secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.5.2.3.2.

Pertumbuhan belanja daerah pada triwulan I selalu menunjukkan nilai yang negatif karena mayoritas pemerintah daerah belum menyerap belanja daerah secara maksimal pada triwulan I. Belanja daerah juga selalu mengalami kenaikan pertumbuhan yang signifikan pada triwulan IV. Hal ini disebabkan karena pada triwulan IV banyak kegiatan-kegiatan daerah yang sudah terealisasi sehingga belanja daerah dapat terserap maksimal.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil STKU Terintegrasi 2015, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perdagangan

- Survei Triwulanan Kegiatan Usaha (STKU) sektor perdagangan tahun 2015 dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, dengan unit penelitian survei adalah perusahaan menengah dan besar yang dikategorikan dalam jenis kegiatan usaha Perdagangan Mobil dan Sepeda Motor, Perdagangan Besar (PB) Selain Mobil dan Sepeda Motor, dan Perdagangan Eceran (PE) Selain Mobil dan Sepeda Motor (Swalayan, *Department Store*, dan PE Lainnya).
- Dari 4.360 target sampel didapat 3.661 sampel responden valid yang terdiri atas 661 perdagangan mobil dan sepeda motor, 813 perdagangan besar selain mobil dan sepeda motor dan 2.237 perdagangan eceran selain mobil dan sepeda motor.
- Penyerapan tenaga kerja pada usaha perdagangan tahun 2015 sebanyak 99.116 orang terdiri dari 5.412 orang bekerja pada usaha perdagangan mobil & sepeda motor, 15.041 orang bekerja pada perdagangan besar selain mobil & sepeda motor dan 49.663 orang bekerja di pedagang eceran selain mobil & selain mobil & sepeda motor.
- Indeks Penjualan Triwulanan Indonesia, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku secara keseluruhan memperlihatkan angka tertinggi pada triwulan II 2015, yang mengindikasikan terjadinya kenaikan omset pada pelaku kegiatan usaha perdagangan dengan kisaran sebesar 21,75 hingga 26,03 persen.
- Indeks Pembelian Triwulanan Indonesia baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku menunjukkan pencapaian nilai tertinggi pada triwulan III 2015, yakni masing-masing sebesar 121,70 dan 117,65.
- Sedangkan untuk Indeks Produktivitas Triwulanan atas dasar harga berlaku secara keseluruhan memperlihatkan angka tertinggi pada triwulan II 2015, yakni sebesar 123,98.
- Pada triwulan akhir pengamatan (triwulan IV 2015), optimisme pelaku kegiatan usaha perdagangan terhadap prospek usaha pada triwulan

selanjutnya cukup tinggi. Sebanyak 30,13 persen responden optimis dan berkeyakinan bahwa prospek usaha pada triwulan selanjutnya akan menjadi lebih baik, sementara sebanyak 61,07 persen menyatakan bahwa prospek usaha akan sama dan tidak mengalami perubahan, dan sebagian kecil lainnya, yakni sebanyak 8,80 persen responden, merasa pesimis dan menyatakan bahwa prospek usaha akan menjadi lebih buruk.

2. Transportasi dan Pergudangan

- Jumlah pekerja pada kegiatan usaha pergudangan dan kurir selalu mengalami peningkatan terus menerus dari triwulan I sampai dengan triwulan IV tahun 2015. Hal yang sama terjadi juga pada tahun 2014 yang lalu.
- Balas jasa pekerja pada kegiatan usaha kurir menunjukkan peningkatan setiap triwulannya, sedangkan kegiatan lainnya berfluktuasi antar triwulannya. Pada triwulan IV 2015 terjadi penurunan balas jasa pekerja di beberapa kegiatan usaha yaitu pada kegiatan angkutan penumpang jalan raya, angkutan barang jalan raya, bongkar muat, dan ekspedisi.
- Pendapatan pada kegiatan usaha pergudangan menunjukkan peningkatan terus menerus pada setiap triwulannya. Pertumbuhan pendapatan tertinggi terjadi pada triwulan I tahun 2015 yaitu pada kegiatan bongkar muat sebesar 18,52 persen.
- Produktivitas pekerja pada semua kegiatan usaha transportasi dan pergudangan menunjukkan pola yang cenderung berfluktuasi antar triwulannya.
- Pertumbuhan jumlah penumpang yang diangkut bus dan mobil penumpang umum menunjukkan tren yang cenderung meningkat setiap triwulannya, kecuali pada triwulan I. Sementara itu, jumlah order angkutan taksi mengalami fluktuasi setiap triwulannya.
- Jumlah barang yang diangkut oleh kegiatan usaha angkutan barang jalan raya khususnya truk cenderung mengalami peningkatan setiap triwulannya, kecuali pada triwulan I turun sebesar 0,48 persen. Barang yang diangkut moda *pickup* mengalami tren yang meningkat setiap triwulannya.
- Pertumbuhan jumlah penumpang yang diangkut kegiatan usaha ASDP-Non PT. ASDP (Persero) mengalami peningkatan pada triwulan II dan III. Berbeda dengan jumlah penumpang yang diangkut, untuk jumlah barang yang diangkut mengalami peningkatan pada triwulan III dan IV. Untuk jumlah kendaraan yang diangkut terjadi peningkatan pada triwulan II, III, dan IV.

- Pada kegiatan usaha pergudangan, peningkatan volume gudang tertutup/*cold storage* yang disewakan terjadi pada Triwulan I dan II yaitu sebesar 2,1 persen dan 0,1 persen. Sementara untuk luas gudang terbuka yang disewakan, penurunannya hanya terjadi pada triwulan III yaitu 0,21 persen.
- Jumlah karcis parkir yang terjual pada kegiatan usaha perparkiran selama tahun 2015 mengalami penurunan dari triwulan I sampai sengan triwulan III, dan pada triwulan IV mengalami peningkatan 0,49 persen.
- Pada kegiatan usaha bongkar muat, jumlah barang yang dibongkar dan dimuat mengalami penurunan pada triwulan I. Triwulan II dan III jumlah barang yang dibongkar dan dimuat mengalami peningkatan sebesar 1,30 persen dan 2,83 persen. Pada triwulan IV mengalami penurunan kembali yang cukup besar yaitu 30,53 persen.
- Jumlah barang yang dikirim oleh perusahaan ekspedisi selama tahun 2015 secara keseluruhan mengalami peningkatan kecuali pada triwulan I terjadi penurunan sebesar 0,55 persen.
- Jumlah paket yang dikirim oleh perusahaan kurir mengalami tren yang meningkat setiap triwulannya. Pada triwulan I sampai IV terjadi peningkatan jumlah paket yang dikirim, dengan peningkatan terbesar terjadi pada triwulan III sebesar 13,66 persen.

3. Informasi

- Terdapat indikasi adanya sedikit kenaikan tingkat kesejahteraan pekerja pada triwulan I–III pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar, sedangkan pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta, indikasi adanya kenaikan tingkat kesejahteraan pekerja terjadi pada triwulan I–IV. Adapun pada perusahaan/usaha produksi film, video, dan program televisi, perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah, perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, dan perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta, tingkat kesejahteraan pekerja cenderung konstan.
- Pada triwulan II–III, indeks output berlawanan arah dengan indeks pendapatan pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar, sedangkan pada perusahaan/usaha penyiaran radio swasta indeks output searah dengan indeks pendapatan. Indeks pendapatan perusahaan/usaha produksi film, video, dan program televisi mengalami peningkatan pada triwulan III dan IV, sedangkan indeks outputnya relatif konstan. Pada perusahaan/usaha radio oleh pemerintah dan perusahaan/usaha

penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah, indeks pendapatan meningkat di triwulan II, sedangkan indeks output relatif konstan. Hal yang sedikit berbeda terjadi pada perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh swasta dengan indeks pendapatan yang meningkat di triwulan I dan indeks output yang menurun cukup signifikan di triwulan I.

- Fenomena positif untuk kenaikan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya pekerja pada perusahaan/usaha penerbitan surat kabar tampak terjadi pada triwulan I dan IV, perusahaan/usaha produksi film, video dan program televisi terjadi pada triwulan I, perusahaan/usaha penyiaran radio oleh pemerintah terjadi pada triwulan II, perusahaan/usaha penyiaran radio swasta tampak terjadi pada triwulan II dan IV, perusahaan/usaha penyiaran dan pemrograman televisi oleh pemerintah terjadi pada triwulan I, sedangkan perusahaan/usaha penyiaran radio swasta terjadi pada triwulan II.

4. Lembaga Keuangan Bukan Bank

- Rata-rata tingkat respon sampel perusahaan STKU Lembaga Keuangan pada tahun 2015 adalah sebesar 74,71 persen atau menunjukkan penurunan dibanding tahun 2014 yang sebesar 78,69 persen.
- Penyerapan tenaga kerja usaha lembaga keuangan yang disurvei menunjukkan bahwa pada usaha pedagang valuta asing jumlah pekerjanya meningkat sepanjang triwulan di tahun 2015. Sedangkan pada usaha/perusahaan dana pensiun, pegadaian dan pembiayaan & modal ventura, jumlah pekerjanya cenderung menurun di setiap triwulan. Peningkatan jumlah tenaga kerja tertinggi terjadi di triwulan III pada usaha/perusahaan pedagang valuta asing yang mencapai 17,11 persen. Penyerapan tenaga kerja yang terendah terlihat pada usaha koperasi simpan pinjam yang terjadi pada triwulan IV sebesar 7,44 persen.
- Selaras dengan penyerapan tenaga kerja, balas jasa yang diberikan pada usaha/perusahaan pedagang valuta asing juga meningkat di tiga triwulan pada tahun 2015 kecuali pada posisi triwulan IV yang mengalami penurunan. Berbeda dengan penyerapan tenaga kerja yang terjadi pada usaha/perusahaan dana pensiun dan pegadaian, balas jasa pada kegiatan-kegiatan ini justru mengalami peningkatan pada semua triwulan pada tahun 2015.
- Pendapatan usaha pada usaha/perusahaan pegadaian dan pembiayaan dan modal ventura juga menunjukkan hal yang sama dengan balas jasa yang diberikan yaitu meningkat di semua triwulan pada tahun 2015.

Sedangkan untuk kegiatan asuransi, dana pensiun, pedagang valuta asing, dan penunjang asuransi (aktuaris dan adjuster) terlihat berfluktuasi di setiap triwulan pada tahun 2015. Penerimaan pendapatan yang terendah terlihat pada usaha dana pensiun yang terjadi pada triwulan IV yang mencapai sebesar 34,43 persen. Sedangkan kinerja yang menunjukkan penerimaan pendapatan terbesar terlihat pada usaha asuransi sebesar 27,00 persen pada triwulan IV tahun 2015.

5. Lembaga Keuangan Pemerintah Daerah

- Pada pemerintah provinsi, pendapatan asli daerah memberikan kontribusi paling besar dalam pembentukan anggaran pendapatan daerah yaitu sebesar 136,36 triliun rupiah atau sebesar 51,64 persen terhadap total anggaran pendapatan provinsi.
- Pada pemerintahan kabupaten/kota, pendapatan daerah didominasi oleh dana perimbangan dengan kontribusi sebesar 67,53 persen terhadap total anggaran pendapatan kabupaten/kota.
- Pengeluaran pemerintah provinsi didominasi oleh belanja lainnya yaitu sebesar 103,26 triliun rupiah atau sebesar 37,02 persen dari total anggaran.
- Pemerintah kabupaten/kota, belanja pegawai mempunyai kontribusi yang sangat besar yaitu sebesar 321,35 triliun rupiah atau sebesar 48,02 persen.
- Realisasi tingkat pencapaian pendapatan provinsi cenderung lebih rendah di banding realisasi tingkat pencapaian daerah kabupaten/kota. Namun realisasi tingkat pencapaian belanja provinsi cenderung lebih tinggi di banding realisasi tingkat pencapaian belanja daerah kabupaten/kota.
- Pada tahun 2015 terjadi penghematan anggaran untuk kementerian dan lembaga yang mengakibatkan turunnya tingkat pertumbuhan belanja pegawai pemerintah daerah di triwulan IV.

4.2 Saran

Beberapa saran yang perlu dipertimbangkan untuk penyempurnaan dan perbaikan STKU Terintegrasi di tahun mendatang, yaitu:

1. Monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara kontinyu di awal, tengah, dan akhir tiap periode karena pengalaman pelaksanaan STKU 2015 ini masih

belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan terhadap hasil pencacahan sehingga hasil isian sering tidak konsisten, salah satuan, tidak lengkap, dan tidak tepat waktu. Salah satunya dengan melakukan *Video Conference* (*Vicon*) dengan daerah.

2. Perlu adanya *refreshing* kembali untuk petugas STKU di Daerah seiring dengan banyaknya petugas yang baru (karena rotasi, promosi). Dengan *refreshing* ini pada akhirnya akan menghasilkan data STKU yang lebih akurat, konsisten, dan tepat waktu.
3. Perlu dibahas dengan *intens* antara *user* dan *compiler*.
4. Perlu dijumpatani kepentingan antara penyedia data (perusahaan) dengan pengumpul data.

<http://www.bps.go.id>

LAMPIRAN

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 1. Kuesioner STKU-G 2015

RAHASIA		STKU - G TRIWULAN - 2015
<p>REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK</p> <p>SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA PERDAGANGAN DAN JASA REPARASI</p> <p>2015</p>		
<p>Tujuan Survei : Untuk memperoleh data mengenai perkembangan margin perdagangan dan pengangkutan yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB sektor perdagangan</p> <p>Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik</p> <p>Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)</p> <p>Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)</p>		

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN			
		<i>diisi oleh pencacah</i>	
1. Provinsi	:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
2. Kabupaten/Kota*)	:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
3. Nomor Urut Perusahaan	:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
4. Nama Perusahaan	:	
a. Alamat	:	
b. E-mail	:	
c. Nomor Telepon	:	(.....)	
5. Kegiatan Utama	:	Perdagangan Mobil -1 Swalayan -5 <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> Perdagangan Sepeda Motor -2 <i>Department Store</i> -6 Perdagangan Besar**) -3 <i>Jasa Reparasi Mobil</i> -7 Perdagangan Eceran**) -4 <i>Jasa Reparasi Sepeda Motor</i> -8	
6. Jenis/Kelompok Komoditi	:	KBLI Lapangan <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>
7. Hasil pencacahan	:	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>

Ket: *) Coret yang tidak sesuai
 **) Tidak termasuk perdagangan mobil dan sepeda motor

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang identitas perusahaan.

Rincian 1: Provinsi: tuliskan nama dan kode provinsi.

Rincian 2: Kabupaten/Kota: tuliskan nama dan kode kabupaten/kota.

Rincian 3: Nomor Urut Perusahaan: tuliskan nomor urut perusahaan.

Rincian 4: Nama Perusahaan: tuliskan nama perusahaan, dan alamat lengkap perusahaan pada R.4a, *E-mail* perusahaan pada R.4b, serta nomor telepon perusahaan pada R.4c.

Rincian 5: Kegiatan Utama: pilih salah satu jenis kegiatan utama perusahaan dan tuliskan kodenya.

Rincian 6: Tuliskan jenis/kelompok komoditi/jasa dan lima digit kode KBLI 2009 pada kotak yang tersedia

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Rincian 1: Nilai penjualan barang dagangan (omset)/suku cadang kendaraan: Isikan seluruh nilai penjualan barang dagangan/suku cadang, tidak termasuk barang/suku cadang konsinyasi.

Rincian 2: Nilai pembelian barang dagangan/suku cadang kendaraan yang terjual: isikan seluruh nilai pembelian barang dagangan/suku cadang yang terjual termasuk biaya pengangkutan dan tidak termasuk barang/suku cadang konsinyasi.

Rincian 3: Pendapatan dari komisi barang konsinyasi/fee: isikan pendapatan dari komisi barang konsinyasi/fee yang diterima.

Rincian 4: Jumlah Pekerja: isikan seluruh pekerja yang biasanya terlibat dalam kegiatan di perusahaan. Pekerja yang diisikan adalah seluruh pekerja yang terlibat dalam kegiatan usaha perdagangan/ jasa reparasi kendaraan baik yang mendapatkan maupun yang tidak mendapatkan upah/gaji.

Rincian 5: Pendapatan dari jasa reparasi kendaraan: Isikan nilai pendapatan dari kegiatan jasa reparasi. Pendapatan jasa reparasi = Jumlah kendaraan direparasi X Biaya jasa reparasi kendaraan

Rincian 6: Jumlah kendaraan yang direparasi: isikan banyaknya kendaraan bermotor yang telah direparasi

BLOK III. PROSPEK USAHA

Rincian 1: Rincian ini terisi jika ada perbedaan isian Blok II R1 antar triwulan (perbedaan jumlah tiap triwulan). Penyebab perubahan nilai, bisa karena perubahan volume dan/atau harga.

a. Volume : Volume barang yang terjual triwulan sekarang naik/turun/tetap dari triwulan sebelumnya.

b. Harga : Harga barang yang terjual triwulan sekarang naik/turun/tetap dari triwulan sebelumnya.

Rincian 2: Rincian ini terisi jika ada kenaikan/penurunan harga dan yang terjual lebih dari satu komoditi

a. Rincian diisi jika barang yang terjual lebih dari satu komoditi. Tuliskan nama komoditi yang menjadi penyebab utama kenaikan/penurunan harga tersebut. Jika satu komoditi/suku cadang, rincian ini tidak perlu diisi.

b. Tuliskan besarnya persentase kenaikan/penurunan harga komoditi/suku cadang tersebut.

Rincian 3: Rincian ini terisi jika ada kenaikan/penurunan harga, tuliskan persentase kenaikan/penurunan harga komoditi/suku cadang tersebut.

Rincian 4: Opini pengusaha terhadap keadaan usaha pada triwulan mendatang.

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang dianggap penting dan perlu yang masih ada kaitannya dengan data yang dituliskan dalam kuesioner.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA							
Uraian	Satuan	Triwulan Sebelumnya (..... - 201...)			Triwulan Sekarang (..... - 201...)		
		Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Nilai penjualan barang dagangan (omset)/suku cadang kendaraan	Juta Rp						
2. Nilai pembelian barang dagangan/suku cadang kendaraan yang terjual	Juta Rp						
3. Pendapatan dari komisi barang konsinyasi/fee	Juta Rp						
4. Jumlah Pekerja	orang						
5. Pendapatan dari jasa reparasi kendaraan	Juta Rp						
6. Jumlah kendaraan yang direparasi	Mobil/ Motor						

BLOK III. PROSPEK USAHA			
<p>1. Jika nilai penjualan barang dagangan/suku cadang kendaraan (Blok II R1) mengalami perubahan pada triwulan sekarang dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, apa penyebabnya?</p> <p style="text-align: center;">Naik Turun Tetap</p> <p>a. Volume 1 2 3</p> <p>b. Harga 1 2 3</p>			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>2. Jika ada kenaikan/penurunan harga (R1b kode 1 atau 2) dan yang terjual lebih dari satu jenis komoditi/suku cadang kendaraan,</p> <p>a. Komoditi/suku cadang kendaraan apa yang menjadi penyebab utama kenaikan/penurunan harga tersebut?</p> <p>b. Berapa persen kenaikan/penurunan harga tersebut? %</p>			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>3. Secara umum berapa persen kenaikan/penurunan harga pada triwulan sekarang dibanding triwulan sebelumnya? %</p>			<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<p>4. Bagaimana prospek omset/pendapatan triwulan yang akan datang dibanding triwulan sekarang?</p> <p>lebih baik 1 lebih buruk 3</p> <p>sama 2</p>			<input type="checkbox"/>

BLOK IV. CATATAN

Large empty rectangular box for notes.

http://www.bps.go.id

Diisi dengan sebenarnya,

Nama *Contact Person* : 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....

Lampiran 2. Kuesioner STKU-H 2015

RAHASIA

STKU - H
TRIWULAN - 2015



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
2015

- Tujuan Survei** : Memperoleh informasi tentang perkembangan perusahaan/usaha untuk mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan
- Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
- Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Provinsi :
2. Kabupaten/Kota *) :
3. Nomor Urut Perusahaan :
4. Nama Perusahaan :
- a. Alamat :
- b. E-mail :
- c. Nomor Telepon : (.....)
5. Kegiatan Utama :

Angkutan Penumpang	1	Perparkiran	5	<input type="checkbox"/>
Angkutan Barang	2	Bongkar Muat	6	
ASDP [Non PT ASDP (Persero)]	3	Ekspedisi	7	
Pergudangan/ <i>Cold Storage</i>	4	Kurir	8	
6. Uraian Kegiatan Utama : KBLI Lapangan
diisi pengawas
7. Hasil Pencacahan :
diisi pencacah

*) coret yang tidak sesuai

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang identitas perusahaan.

- Rincian 1: Provinsi: tuliskan nama dan kode provinsi.
- Rincian 2: Kabupaten/Kota: tuliskan nama dan kode kabupaten/kota.
- Rincian 3: Nomor Urut Perusahaan: tuliskan nomor urut perusahaan.
- Rincian 4: Nama Perusahaan: tuliskan nama perusahaan, dan alamat lengkap perusahaan pada Rincian 4a, E-mail perusahaan pada Rincian 4b, serta nomor telepon perusahaan pada Rincian 4.c.
- Rincian 5: Kegiatan Utama: pilih salah satu jenis kegiatan utama perusahaan dan tuliskan kodenya.
- Angkutan penumpang, terdiri dari angkutan bus dan angkutan non bus (mobil penumpang umum, taksi).
 - Angkutan barang, terdiri dari angkutan barang umum dan barang khusus, menggunakan truk dan pick up.
 - ASDP, yang dicakup disini adalah perusahaan selain PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).
 - Perdagangan, dapat berupa gudang tertutup dan gudang terbuka, termasuk *cold storage*.
 - Perparkiran, terdiri dari perparkiran di badan jalan (*on street*) dan di luar badan jalan (*off street*).
 - Bongkar muat, mencakup kegiatan memuat dan membongkar barang atau bagasi (barang penumpang).
 - Ekspedisi, terdiri dari Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), EMKA & EAD, EMKL, dan EMPU.
 - Kurir, mencakup usaha jasa pelayanan kirim mengirim barang cetakan, surat kabar, paket, dan uang.
- Rincian 6: Uraian kegiatan utama: tuliskan uraian kegiatan utama, dengan mengacu pada kegiatan utama perusahaan pada Rincian 5, dan isikan kode KBLI (diisi pengawas) sesuai hasil pencacahan di lapangan.
- Rincian 7: Hasil Pencacahan : tuliskan hasil pencacahan sesuai dengan keadaan perusahaan pada saat pencacahan dan tuliskan kodenya pada kotak yang tersedia. Hasil pencacahan adalah informasi yang diperoleh petugas di lapangan. Penjelasan Rincian 7 dapat dilihat di buku pedoman.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perusahaan. Informasi yang ditanyakan adalah jumlah pekerja, nilai balas jasa pekerja, pendapatan, dan produksi perusahaan per bulan pada triwulan sebelumnya dan triwulan sekarang.

- Rincian 1: **Jumlah Pekerja**: tuliskan jumlah pekerja per bulan.
Pekerja adalah semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan proses produksi di perusahaan, baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar (pemilik dan pekerja keluarga).
- Rincian 2: **Nilai Balas Jasa Pekerja**: tuliskan nilai balas jasa untuk seluruh pekerja yang dibayar per bulan, dalam satuan juta rupiah.
Balas jasa adalah seluruh pengeluaran yang diberikan kepada pekerja yang dibayar, seperti: upah/gaji, upah lembur, tunjangan, bonus dan sejenisnya, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain baik dalam bentuk uang atau barang.
- Rincian 3: **Pendapatan** : tuliskan jumlah pendapatan perusahaan per bulan, dalam satuan juta rupiah.
Pendapatan disini adalah total seluruh pendapatan dari kegiatan utama perusahaan (seperti yang tertera pada Blok I Rincian 5) dan pendapatan lainnya seperti bunga atas simpanan, deviden, royalti, dan sejenisnya.
- Rincian 4: **Produksi Perusahaan**: tuliskan jumlah dari produksi perusahaan transportasi per bulan.
Responden hanya mengisi **satu kelompok sub rincian** saja, sesuai dengan kegiatan utama responden pada Blok I Rincian 5.

BLOK III. PROSPEK USAHA

Blok ini digunakan untuk mengetahui pendapat dari masing-masing responden mengenai keadaan perusahaannya.

- Rincian 1: **Jika pendapatan usaha mengalami perubahan (meningkat/menurun), disebabkan karena**
Rincian ini terisi jika pendapatan usaha pada Blok II R.3 mengalami peningkatan/penurunan pada triwulan sekarang dibanding triwulan sebelumnya (jumlah masing-masing triwulan).
Tuliskan penyebab dari peningkatan/penurunan pendapatan usaha tersebut.
- Rincian 2.a: **Bagaimana perkiraan pendapatan usaha triwulan yang akan datang dibanding triwulan sekarang**
Pilih salah satu kode mengenai perkiraan pendapatan usaha sesuai dengan pendapat dari responden.
- Rincian 2.b: **Berapa persen peningkatan/penurunan pendapatan tersebut**
Rincian ini terisi jika perkiraan pendapatan usaha pada Rincian 2.a meningkat (kode 1) atau menurun (kode 3)
Isikan besarnya persentase peningkatan/penurunan pendapatan usaha tersebut.

BLOK IV. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang dianggap penting dan perlu yang masih ada kaitannya dengan data yang dituliskan dalam daftar isian ini.

BLOK IV. CATATAN

Large empty rectangular box for notes.

http://www.bps.go.id

Diisi dengan sebenarnya,

Nama *Contact Person* : 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....

Lampiran 3. Kuesioner STKU-J 2015

RAHASIA	STKU - J Triwulan - 2015
 <p style="text-align: center;">REPUBLIK INDONESIA BADAN PUSAT STATISTIK SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA INFORMASI 2015</p>	
<p>Tujuan Survei : Untuk memperoleh data mengenai perkembangan usaha/perusahaan untuk mendukung penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulanan</p> <p>Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik</p> <p>Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik)</p> <p>Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No.16 tahun 1997 tentang Statistik)</p>	

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN																
1. Provinsi : diisi pencacah <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>															
2. Kabupaten / Kota *) : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>															
3. Nomor Urut Perusahaan : <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="text"/>															
4. Nama Perusahaan :															
a. Alamat :															
b. Email :															
c. Nomor Telepon :															
5. Kegiatan Utama :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Penerbitan Surat Kabar</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-1</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;"><input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Penyiaran Radio oleh Swasta</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-2</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Penyiaran Radio oleh Pemerintah (RRI)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-3</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah (TVRI)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-4</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Produksi Film, Video dan Program Televisi **)</td> <td style="text-align: right; padding: 2px;">-5</td> <td></td> </tr> </table>	Penerbitan Surat Kabar	-1	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>	Penyiaran Radio oleh Swasta	-2		Penyiaran Radio oleh Pemerintah (RRI)	-3		Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah (TVRI)	-4		Produksi Film, Video dan Program Televisi **)	-5	
Penerbitan Surat Kabar	-1	<input style="width: 20px; height: 15px; border: 1px solid black;" type="checkbox"/>														
Penyiaran Radio oleh Swasta	-2															
Penyiaran Radio oleh Pemerintah (RRI)	-3															
Penyiaran dan Pemrograman Televisi oleh Pemerintah (TVRI)	-4															
Produksi Film, Video dan Program Televisi **)	-5															
6. Kode KBLI :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> </table> diisi pemeriksa															
7. Hasil Pencacahan :	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; border: 1px solid black; text-align: center;"> </td> </tr> </table> diisi pengawas															

*) Coret yang Tidak Sesuai

**) Tidak termasuk kegiatan distribusi dan pasca produksi

BLOK I. KETERANGAN UMUM

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang identitas perusahaan.

- Rincian 1 : Provinsi : Tuliskan nama dan kode provinsi.
- Rincian 2 : Kabupaten/Kota : Tuliskan nama dan kode kabupaten/kota.
- Rincian 3 : Nomor Urut Perusahaan : Tuliskan nomor urut perusahaan yang disalin dari daftar sampel perusahaan.
- Rincian 4 : Nama Perusahaan : Tuliskan nama lengkap perusahaan.
- Rincian 4a : Alamat : Tuliskan alamat lengkap perusahaan.
- Rincian 4b : Email : Tuliskan alamat email perusahaan.
- Rincian 4c : Nomor Telepon : Tuliskan nomor telepon perusahaan.
- Rincian 5 : Kegiatan Usaha : Pilih salah satu jenis kegiatan usaha yang sesuai dan masukkan kodenya pada kotak yang tersedia.
- Rincian 6 : KBLI Lapangan : Tuliskan kode KBLI lima digit sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Rincian 7 : Hasil Pencacahan : Tuliskan salah satu kode yang sesuai dengan keadaan perusahaan pada saat pencacahan dan masukkan pada kotak yang tersedia (penjelasan kode lihat buku pedoman).

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Blok ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang perkembangan usaha perusahaan.

Informasi yang ditanyakan mencakup pekerja, balas jasa pekerja, pendapatan, dan indikator produksi per bulan pada triwulan sebelumnya dan triwulan sekarang.

- Rincian 1: Jumlah Pekerja/Karyawan : Tuliskan jumlah pekerja/karyawan per bulan.
Pekerja/Karyawan adalah semua orang yang bekerja atau terlibat dalam kegiatan proses produksi di perusahaan, baik pekerja dibayar maupun tidak dibayar (pemilik dan pekerja keluarga).
- Rincian 2 : Balas Jasa Pekerja : Tuliskan nilai balas jasa untuk seluruh pekerja/karyawan yang dibayar, seperti : upah/gaji; upah lembur; tunjangan; bonus dan sejenisnya; asuransi, dana pensiun dan lain-lain baik dalam bentuk uang/barang.
- Rincian 3 : Pendapatan : Tuliskan jumlah pendapatan per bulan dalam satuan juta rupiah.
Pendapatan disini adalah total seluruh pendapatan yang mencakup pendapatan dari kegiatan utama dan pendapatan dari lainnya seperti pendapatan yang diperoleh dari iklan.
- Rincian 4: Indikator Usaha : Tuliskan jumlah indikator produksi yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
- Rincian 4a: **Penerbitan Surat Kabar** : Jumlah Tiras/Oplah per Periode Terbit
Tuliskan banyaknya tiras/oplah surat kabar yang diproduksi per periode terbit per bulan. Rincian ini khusus untuk perusahaan penerbitan surat kabar, rincian dikosongkan jika perusahaan bergerak pada kegiatan penyiaran radio oleh swasta.
- Rincian 4b: **Penyiaran Radio Oleh Swasta** : Jumlah Durasi Iklan yang Disiarkan
Tuliskan jumlah durasi iklan yang disiarkan per bulan dalam satuan spot. Rincian ini khusus untuk perusahaan penyiaran radio oleh swasta, rincian dikosongkan jika perusahaan bergerak pada kegiatan penerbitan surat kabar.

BLOK III. CATATAN

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan tambahan yang dianggap penting dan perlu yang masih ada kaitannya dengan data yang dituliskan dalam kuesioner ini.

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

No.	Uraian	Satuan	Triwulan Sebelumnya (..... - 201...)			Triwulan Sekarang (..... - 201...)		
			Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan	Bulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Pekerja	Orang						
2.	Balas Jasa Pekerja	Juta Rp						
3.	Pendapatan	Juta Rp						
4.	Indikator Usaha							
	a. Penerbitan Surat Kabar Jumlah Tiras/Oplah	Eksemplar						
	b. Penyiaran Radio Oleh Swasta Jumlah Durasi Iklan yang Disiarkan	Spot						

BLOK III. CATATAN

Diisi dengan sebenarnya,

Nama Contact Person :

Nomor Telepon/HP :

Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :

Pencacah

(.....)

Nama dan Tanda tangan

Tanggal :

Pengawas/Pemeriksa

(.....)

Nama dan Tanda tangan

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota

Nama :

Alamat/ No. Telp :

.....

<http://www.bps.go.id>

Lampiran 4. Kuesioner STKU-K 2015

RAHASIA



STKU - K
TRIWULAN - 2015

REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
LEMBAGA KEUANGAN BUKAN BANK
TAHUN 2015

- Tujuan Survei** : Untuk memperoleh data mengenai perkembangan usaha lembaga keuangan bukan bank yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB
- Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
- Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN PERUSAHAAN

diisi pencacah

1. Provinsi :

2. Kabupaten/Kota*) :

3. Nomor urut perusahaan :

4. Nama perusahaan :

 a. Alamat :

 b. E-mail :

 c. No. Telepon : (.....) Ext:.....

5. Kegiatan utama:

Asuransi - 1	Pedagang Valuta Asing - 5
Dana Pensiun - 2	Pembiayaan dan Modal Ventura - 6
Koperasi Simpan Pinjam - 3	Penunjang Asuransi - 7
Pegadaian - 4	

6. Uraian kegiatan utama : KBLI Lapangan

diisi pengawas

7. Hasil pencacahan :

diisi pencacah

*) Coret yang tidak sesuai

BLOK II. PERKEMBANGAN USAHA

Tujuan blok ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan usaha perusahaan. Isikan jawaban pada pada tempat yang tersedia. Perhatikan satuan (kolom 2) di setiap rincian pertanyaan.

PERHATIAN

Unit sampel pada survei ini menggunakan pendekatan *establishment*, untuk itu seluruh rincian pada blok ini diisi sesuai dengan kondisi kantor perusahaan responden yang sedang dicacah, bukan merupakan konsolidasi dengan cabang lain.

Rincian 1: Jumlah pekerja

Pekerja adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya dari perusahaan tersebut, baik berupa uang maupun barang. Yang termasuk dalam pekerja adalah pekerja tetap, pekerja kontrak dan pekerja tidak tetap.

Dana Pensiun: Pada usaha Dana Pensiun, pekerja yang dimaksud adalah pengelola usaha Dana Pensiun yang memperoleh gaji/upah dari kegiatan usaha dana pensiun.

Koperasi Simpan Pinjam: Pekerja yang dimaksud pada kegiatan ini adalah pengelola koperasi, yakni orang yang diangkat dan diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus koperasi untuk mengelola usaha.

Rincian 2: Balas jasa pekerja

Balas jasa pekerja adalah seluruh pengeluaran perusahaan untuk balas jasa pekerja, seperti: upah/gaji; upah lembur, tunjangan, bonus dan sejenisnya; asuransi, dana pensiun dan lain-lain baik dalam bentuk uang maupun barang.

Rincian 3: Pendapatan

Pendapatan adalah posisi seluruh pendapatan yang berhubungan langsung dan tidak langsung dengan kegiatan usaha pada periode pencacahan.

Rincian 4: Indikator usaha

Responden hanya dapat mengisi **satu** kelompok sub rincian saja yang sesuai dengan kegiatan usaha responden.

Khusus kegiatan usaha penunjang asuransi, reponden hanya memilih satu rincian pertanyaan dari rincian 4.g, yakni 4.g.1 atau 4.g.2.

BLOK III. PROSPEK USAHA

Blok ini untuk mengetahui pendapat masing-masing responden tentang keadaan perusahaannya.

Rincian 1: Perkiraan pendapatan usaha di triwulan yang akan datang

Pilih salah satu kode perkiraan pendapatan usaha dan isikan ke dalam kotak yang tersedia.

Rincian 2: Persentase kenaikan/penurunan

Isikan persentase penurunan/kenaikan pendapatan tersebut pada kotak yang tersedia.

BLOK IV. CATATAN

Empty box for notes.

http://www.bps.go.id

Diisi dengan sebenarnya,

Nama *Contact Person* : 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....

Lampiran 5. Kuesioner STKU-O 2015

RAHASIA



STKU - O
TRIWULAN - 2015

**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI TRIWULANAN KEGIATAN USAHA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
2015**

- Tujuan Survei** : Untuk memperoleh data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara Triwulanan yang akan digunakan dalam penyusunan PDB/PDRB
- Dasar Hukum** : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- Kerahasiaan** : Data yang diberikan responden dijamin kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang (pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)
- Kewajiban** : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang (pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik)

BLOK I. KETERANGAN UMUM

- diisi oleh pencacah*
1. Provinsi :
2. Kabupaten/Kota *) :
3. Alamat Kantor :
- E-mail* :
- Nomor Telepon : (.....)

*) Coret yang tidak sesuai

A. PENDAPATAN DAERAH

Adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Rincian 1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Rincian 2 Dana Perimbangan

Adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah

Adalah pendapatan lainnya dari pemerintah pusat dan atau dari instansi pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana bagi hasil dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

B. BELANJA DAERAH

Adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Rincian 1 Belanja Tidak Langsung

Rincian 1.1 Belanja Pegawai

Adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Rincian 1.2 Belanja Bantuan Sosial

Adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan

Rincian 1.3 Belanja Tidak Langsung Lainnya

Adalah belanja yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa, dan Belanja Tidak Terduga.

Rincian 2 Belanja Langsung

Adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah

Rincian 2.1 Belanja Pegawai

Adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Rincian 2.2 Belanja Barang dan Jasa

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah

Rincian 2.3 Belanja Modal

Adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

C. PEMBIAYAAN

Blok ini digunakan untuk mengetahui besaran pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan Neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.

D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (D) = Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (C)

BLOK II. REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
TAHUN ANGGARAN 2015				
Rincian		Anggaran 2015 (Juta Rp)	Penyerapan (Juta Rp)	
			s/d Triwulan Sebelumnya *) Januari -	s/d Triwulan Sekarang Januari -
(1)		(2)	(3)	(4)
A	PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)			
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1.1	Pajak Daerah			
1.2	Retribusi Daerah			
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
2	DANA PERIMBANGAN			
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			
B	BELANJA DAERAH (1 + 2)			
1	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
1.1	Belanja Pegawai			
1.2	Belanja Bantuan Sosial			
1.3	Belanja Tidak Langsung Lainnya			
2	BELANJA LANGSUNG			
2.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Barang dan Jasa			
2.3	Belanja Modal			
C	PEMBIAYAAN			
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH			
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH			
D	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN			

*) Untuk triwulan I, kolom ini dikosongkan

BLOK IV. CATATAN

Large empty rectangular box for notes.

http://www.bps.go.id

Diisi dengan sebenarnya,

Nama *Contact Person* : 201....

Nomor Telepon/HP :
(.....)
Nama, Tanda tangan dan Cap Perusahaan

Tanggal :
Pencacah
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Tanggal :
Pengawas/Pemeriksa
(.....)
Nama dan Tanda tangan

Untuk hal-hal yang kurang jelas, harap hubungi BPS Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Nama :

Alamat/ No. Telp. :

.....

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id

ISSN 2460-982X



9 772460 982004 >